



LAPORAN KINERJA

2024

 @bnnpjawatimur



 infobnnp_jatim



 BNN Provinsi
Jawa Timur



 jatim_bnnp



 infobnnp_jatim



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Ikhtisar Eksekutif	4
BAB I	6
A. Gambaran Umum	6
B. Dasar Hukum	10
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. RENPROJA BNNP Jawa Timur	13
B. Rencana Kinerja Tahunan	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Analisis Capaian Sasaran	19
B. Akuntabilitas Keuangan	77
BAB IV PENUTUP	82
Lampiran	83

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Laporan Kinerja ini menyajikan hasil capaian kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran yang diukur dengan beberapa indikator kegiatan. Tujuan utama akuntabilitas kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas publik instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja organisasi pemerintah serta meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Laporan Kinerja ini merangkum semua pelaksanaan kegiatan P4GN di Jawa Timur, terkhusus di BNNP dan BNKK jajarannya. Secara umum, beberapa sasaran dan target dapat tercapai, bahkan ada beberapa yang over prestasi / melebihi target bukan hanya output tetapi menghasilkan outcome juga. Diharapkan kendala dan hambatan yang muncul di T.A. 2024 akan menjadi pembelajaran untuk tahun kedepannya.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja BNNP Jawa Timur Tahun 2024 dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNNP Jawa Timur secara keseluruhan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati usaha kita semua. Aamiin.

Kepala BNNP Jawa Timur

Awang Joko Runitro, S.I.K,M.Si.

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 disusun sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja yang diwujudkan dalam bentuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang disertai dengan target kinerja. Penetapan Kinerja 2022 BNNP Jawa Timur mengacu pada sasaran Rencana Strategis (Renstra) BNN yaitu Meningkatkan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Terwujudnya manajemen organisasi yang professional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi. Sasaran Kinerja pada BNNP Jawa Timur yaitu meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif di Jawa Timur yang dibagi atas capaian pada tiap indikator kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi
2. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi
3. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi
4. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"
5. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi
6. Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup
7. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih
8. Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis
9. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi
10. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi
11. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Timur
12. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21
13. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan
14. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba
15. Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21

16. Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Timur
17. Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target
18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Timur
19. Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target
20. Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal

Secara umum BNNP Jawa Timur beserta BNNK jajaran mampu mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Ini dapat dilihat pada :

- a. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi dengan target 17 (tujuh belas) kabupaten/kota dengan realisasi 17 (tujuh belas) kabupaten/kota.
- b. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari ‘Bahaya” menjadi “Waspada” dengan target 1 (satu) kawasan terealisasi 1 (satu) kawasan.
- c. Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan target 68 % tercapai 96.54%.
- d. Jumlah petugas penyelenggara IBM yang terlatih dengan target 10 orang terealisasi 10 orang.
- e. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dengan target 2 (dua) lembaga dapat terealisasi 3 (tiga) lembaga.
- f. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dengan target 36 (tiga puluh enam) unit terealisasi 37 (tiga puluh tujuh) unit.
- g. Indeks kepuasan layanan Klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Timur dengan target 3.77 realisasi 3.87.
- h. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang P-21 dengan target 22 (dua puluh dua) berkas dengan realisasi 40 (empat puluh) berkas.
- i. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan terpenuhi target 100.
- j. Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkoba dan Non Narkoba terpenuhi target 100.
- k. Nilai Kinerja Anggaran BNNP Jawa Timur dengan target nilai 88 terealisasi 99,82
- l. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Timur dengan target nilai 97,83 tercapai 99,64.
- m. Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal dengan target indeks 88 tercapai indeks 88.19

BAB I

A. Gambaran Umum

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menjalankan tugas di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Perkembangan situasi dunia yang begitu cepat dan tidak terduga, membuat kejahatan narkotika semakin kompleks dan sulit untuk dikendalikan, seiring dengan munculnya modus-modus baru dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terus berkembang. Kejahatan narkotika yang kian meresahkan dan membahayakan masa depan bangsa ini telah mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan permasalahan narkoba sebagai salah satu isu strategis yang diangkat dalam misi Asta Cita ke-7. Presiden juga menguatkan “Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba” menjadi program prioritas ke-6 dalam rangka mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai tindak lanjut atas komitmen dan tekad Presiden, Kemenkopolkam telah membentuk “Desk Pemberantasan Narkoba” sebagai langkah untuk mengakselerasi penanganan permasalahan narkoba pada instansi pemerintah terkait. BNN tentunya sangat mendukung upaya-upaya tersebut, sehingga upaya penanganan permasalahan narkoba akan lebih terkonsolidasi dengan baik. Pada tahun transisi perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang maupun jangka menengah ini, BNN melakukan transformasi arah kebijakan dan strategi dalam penanganan permasalahan narkotika untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman narkoba dan mewujudkan visi Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba). Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., menetapkan 5 (lima) arah kebijakan dan strategi yang menjadi fokus dalam upaya penanganan permasalahan narkotika, yaitu **(1) penguatan kolaborasi (2) penguatan intelijen (3) penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara (4) penguatan kerja sama dengan negara perbatasan, serta (5) tematik dan ikonik**. Kelimanya adalah langkah strategis yang sangat relevan dalam memperkuat penanganan permasalahan narkotika di Indonesia untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan menyeluruh.

Gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan pembangunan P4GN dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN Provinsi Jawa Timur pada periode 2025-2029.

Kinerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap narkoba, sebagaimana menjadi mandat konstitusional keberadaan BNN, merupakan perwujudan

kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan narkoba. Dalam kaitan tersebut, kinerja BNN akan selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan atau menggambarkan situasi penyalahgunaan narkoba yang sedang terjadi saat ini.

Secara obyektif, Indonesia melalui berbagai institusi dengan BNN sebagai *Leading Sector* masih harus bekerja keras untuk benar-benar keluar dari kondisi darurat tersebut. Penanganan tersebut harus benar-benar tepat agar konfigurasi penyalahgunaan narkoba kalangan coba pakai tidak terus membesar pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga tidak berkembang menjadi pecandu. Dalam hal ini, penyalahguna narkoba coba pakai harus secara tepat mendapat penanganan agar dapat ditekan perkembangannya.

BNN Provinsi Jawa Timur melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Pemberantasan. Melalui bidang-bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4G, Advokasi, dan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat. Bidang Rehabilitasi melakukan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan Bidang Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Penyidikan dan penyelidikan jaringan peredaran gelap narkoba serta pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba sedangkan Bagian Umum melaksanakan Program Dukungan Manajemen sebagai pendukung kegiatan P4GN yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2019-2024. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di lingkungan instansi masing-masing. Untuk hal tersebut, BNN telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi baik untuk Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Filosofi penetapan Inpres tersebut adalah perlunya kebersamaan seluruh komponen masyarakat bangsadan negara melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan.

Dalam Inpres tersebut, BNN ditugaskan untuk menjadi penjurur guna mengkoordinir laporan realisasi Rencana Aksi dari seluruh Kementerian/ Lembaga baik di Pusat maupun daerah untuk dilaporkan secara berkala ke Presiden. BNN Provinsi Jawa Timur yang merupakan perpanjangan dari BNN RI, wilayah kerjanya mencakup wilayah hukum dan wilayah

geografis Provinsi Jawa Timur , BNN Provinsi Jawa Timur resmi menjadi Lembaga Negara Vertikal sejak tahun 2011. BNN Provinsi Jawa Timur berlokasi di Jl. Raya Sukomanunggal No. 55-56, Surabaya.

BNNP Jawa Timur memiliki 17 (tujuh belas) satker BNN Kab/Kota yang menjadi perpanjangan tangan BNNP di kewilayahan Kabupaten/Kota dan pada Agustus 2024 telah dilakukan langkah awal pembentukan satker BNN Kabupaten Banyuwangi, dengan bantuan berupa hibah dari Pemkab Banyuwangi. Kinerja organisasi didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang harus sesuai dengan kebutuhan. Adapun secara keseluruhan komposisi SDM pada BNNP Jawa Timur dan jajaran pada T.A. 2024 adalah sebagai berikut:

DAFTAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN BNNP JAWA TIMUR SESUAI DSP KEP 175/III/KA/KP.07.00/2022/BNN TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BNN								
NO	NAMA SATKER	JUMLAH PERSONEL PNS	JUMLAH PERSONEL TNI	JUMLAH PERSONEL POLRI	JUMLAH PERSONEL PPPK	JUMLAH PERSONEL PPNPN	TOTAL SELURUH PERSONEL	KETERANGAN
1	BNNP JAWA TIMUR	33	0	26	0	30	90	2 BKO POLRI
2	BNN KOTA SURABAYA	13	0	6	1	17	37	
3	BNN KOTA BATU	13	0	5	1	16	35	
4	BNN KOTA MALANG	14	0	6	0	19	39	
5	BNN KOTA KEDIRI	16	0	3	0	17	36	
6	BNN KOTA MOJOKERTO	7	0	4	0	14	25	
7	BNNK SIDOARJO	12	0	7	0	16	35	
8	BNNK PASURUAN	5	0	2	0	18	25	
9	BNNK TRENGGALEK	9	0	4	0	14	27	
10	BNNK TULUNGAGUNG	15	0	4	1	18	38	
11	BNNK KEDIRI	9	0	5	0	19	33	
12	BNNK NGANJUK	10	0	6	0	16	32	
13	BNNK BLITAR	11	0	3	0	18	32	
14	BNNK LUMAJANG	11	0	1	0	16	28	
15	BNNK TUBAN	9	0	4	0	16	29	
16	BNNK SUMENEP	12	0	4	1	15	32	
17	BNNK MALANG	12	1	4	0	18	35	
18	BNNK GRESIK	9	0	3	0	17	29	
JUMLAH		220	1	97	4	314	637	
NOTE :								
NO	NAMA SATKER	JUMLAH PERSONEL PNS	JUMLAH PERSONEL TNI	JUMLAH PERSONEL POLRI	JUMLAH PERSONEL PPPK	JUMLAH PERSONEL PPNPN	TOTAL SELURUH PERSONEL	KETERANGAN
19	BNNK BANYUWANGI	7	0	7	0	3	17	SEMUA STATUS PENUGASAN

Dari data di atas dapat dilihat bahwa SDM yang tersedia pada tahun anggaran 2024 pada BNNP Jawa Timur dan BNNK jajaran terdapat penambahan jumlah personel sebanyak 5 (lima) orang secara keseluruhan. Dimana ada penambahan 7 (tujuh) orang di BNNP Jawa Timur, dan beberapa pengurangan jumlah pegawai pada beberapa BNN Kab/Kota. Komposisi masih jauh dari DSP yang seharusnya. Satker pada BNNP Jajaran secara keseluruhan merasakan ini sebagai kendala dalam melaksanakan kegiatan P4GN. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, satker melakukan efisiensi atas penggunaan SDM dalam pencapaian kinerja dengan cara memberdayakan pegawai lintas seksi bila ada kegiatan yang memang diperlukan SDM yang lebih banyak dan memberdayakan mahasiswa/pelajar yang sedang menjalani magang di BNNP Jawa Timur, BNN Kab/Kota jajaran.

Selain Sumber Daya Manusia, untuk menjalankan fungsi organisasi dibutuhkan juga Sumber Daya Anggaran. Berikut adalah komposisi anggaran BNNP Jatim T.A. 2024, dimana pada awal tahun 2024 berdasarkan pada Surat Edaran Kepala BNN Nomor : SE/5/I/SU/PR.02.01/2024/BNN tanggal 11 Januari 2024, DIPA T.A. 2024 BNNP Jawa Timur terkena Automatic Adjustment.

DIPA Awal BNNP Jawa Timur T.A. 2024 dengan pagu **Rp. 22.159.980.000**, yang kemudian terkena Automatic Adjustment sebesar **Rp. 361.075.000**.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
4. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional tanggal 2 Agustus 2023

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 pasal 2, yaitu BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi

2. Fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

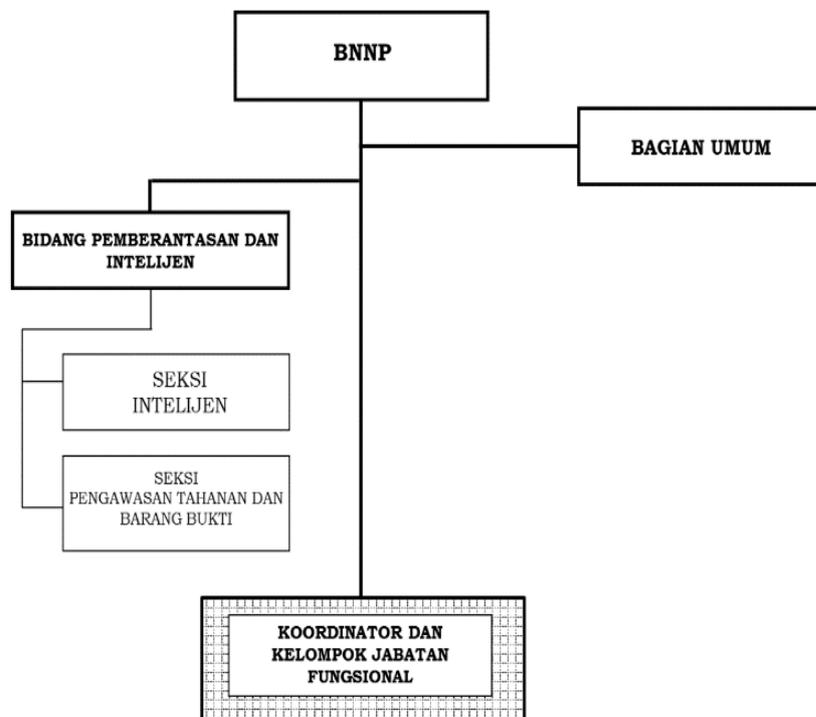
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;

- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. Pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, Kepala BNNP mempunyai tugas memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi, dan mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Menteri Pan&RB Nomor B/879/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan BNN yang kemudian disahkan dengan Peraturan Badan Narkotika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, sehingga struktur organisasi BNNP Jawa Timur menjadi :

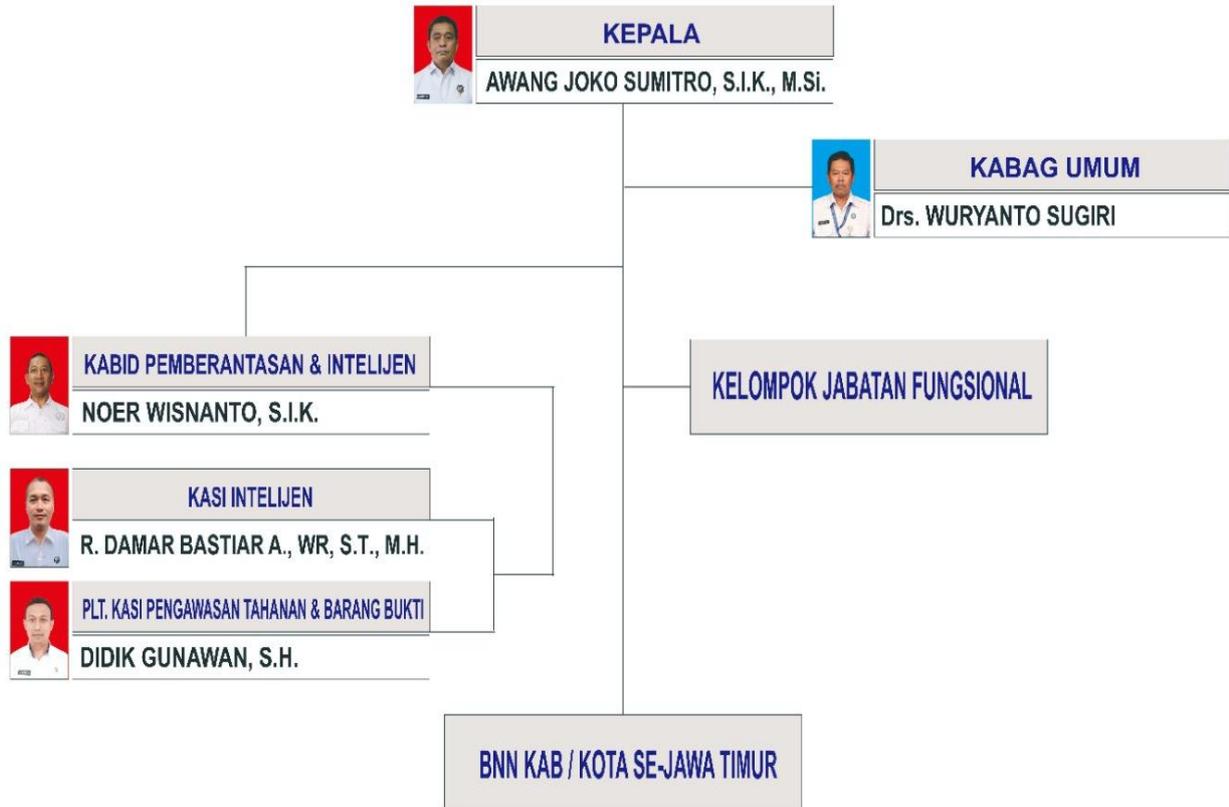




BNNP JATIM

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

Sesuai Peraturan Badan Narkotika Nasional No. 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi & BNN Kabupaten/ Kota



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENPROJA BNNP Jawa Timur

Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2020–2024 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024. Renstra BNN 2020–2024 dirancang dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan menjadi pedoman bagi penyusunan program kerja tahunan lembaga, yaitu Rencana Kerja (Renja) BNN dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BNN. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan proses teknokratik, politik, partisipatif, top down, dan bottom up, dengan pendekatan substansial yang holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS). Dokumen Renstra menjadi dasar bagi gerak strategis dan operasional BNN sebagai LPNK dalam menangani isu nasional dan sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba.

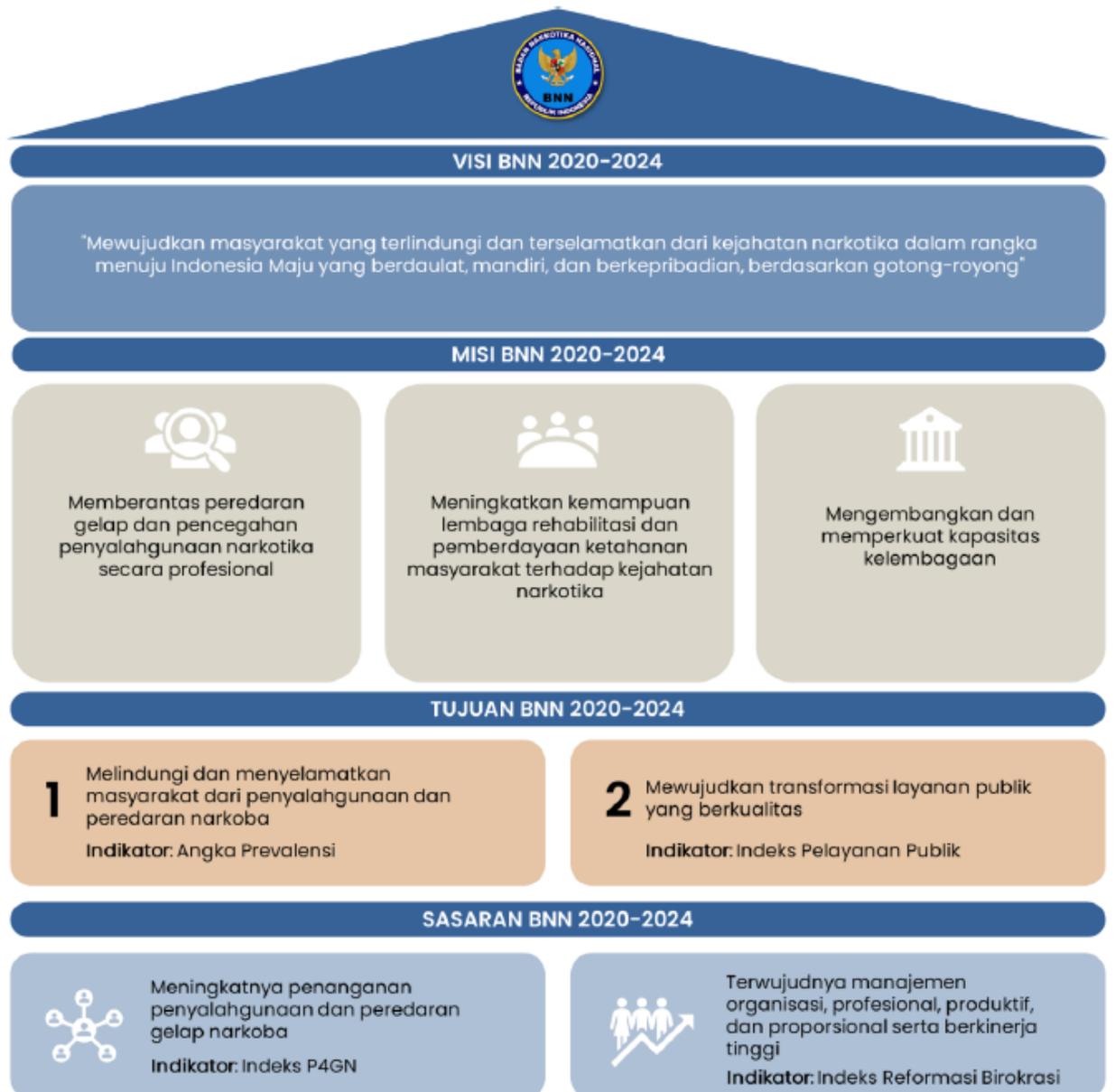
Dalam penyusunan visi dan misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024, yaitu ***“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”***.

Kepala BNN telah menetapkan visi BNN, yaitu:

“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam rangka pencapaian visi, BNN juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi BNN yaitu:

- 1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional;**
- 2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika;**
- 3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan.**



Visi dan misi BNN tersebut dijabarkan ke dalam tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2024, yaitu:

- Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan tolok ukur dan target capaian Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika sebesar 1,69; serta
- Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas, dengan tolok ukur dan target capaian Indeks Pelayanan Publik berkategori "Sangat Baik"

Untuk mendukung pencapaian tujuan yang terukur dan dapat dicapai, BNN menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai pada akhir periode perencanaan, yaitu:

- Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan indikator Indeks P4GN; dan

2. Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel Rencana Program Kerja BNNP Jawa Timur (lihat pada lampiran)

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kerja Unit Kerja Vertikal BNNP Jawa Timur TA 2024 telah disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (dokumen terlampir).

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan capaian kinerja pada T.A. 2023 dimana ada target yang belum tercapai, strategi yang kemudian diambil adalah dengan melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, baik materiil maupun manusia. Hal ini disikapi oleh Pembina fungsi di pusat dengan adanya Automatic Adjustment segera setelah terbitnya DIPA BNNP Jawa Timur T.A. 2024.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Unit Organisasi Eselon II : BNNP Jawa Timur
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	17 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	17 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	17 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3.10 indeks
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	2 Lembaga

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	36 Unit
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,77 indeks
11	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	22 Berkas Perkara
12	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 indeks
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 indeks
14	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Timur	88 indeks
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	8 Kabupaten/Kota
16	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Timur	97.83 indeks
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	17 Kabupaten/Kota
18	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	88 Indeks

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan kegiatan untuk mencapai kinerja, melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan.

Pada Tahun 2023 BNNP Jawa Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 13 (tiga belas) sasaran kegiatan, dengan indikator kinerja sebanyak 18 (delapan belas) indikator kinerja. Tabel berikut dijelaskan realiasi dari capaian target sasaran kinerja tahun 2024, sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	17 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	17 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	17 Kabupaten/Kota	17 Kabupaten/Kota

4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3.10 indeks	2.82 indeks
5	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	96.54 %
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 orang
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	2 Lembaga	3 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	36 Unit	37 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,77 indeks	3.87 indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	22 Berkas Perkara	40 Berkas Perkara

10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 indeks	100 indeks
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 indeks	100 indeks
11	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Timur	88 indeks	99.82 indeks
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	8 Kabupaten/Kota	17 Kabupaten/Kota
12	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Timur	97.83 indeks	99.64
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	17 Kabupaten/Kota	16 Kabupaten/Kota
13	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	88 Indeks	88.19 indeks

Adapun rincian perjanjian kinerja yang terdiri dari 13 (tiga belas) sasaran kegiatan dan 18 (delapan belas) indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

1

2024

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi"	17	12	70.5 %

	di wilayah Provinsi dengan nilai indeks minimal sesuai PK yang ditentukan oleh masing-masing satker.			
--	--	--	--	--

2023

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi dengan nilai indeks minimal 53.00	17	13	76 %

2022

N O	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi dengan nilai indeks minimal 52.00	17	13	76 %

DEFINISI OPERASIONAL

Ketahanan Diri Anti Remaja terhadap adalah kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba yang diukur melalui 3 (tiga) dimensi yaitu Self Regulation, dan Reaching Out. Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba yang di ukur kepada siswa melalui program Pengembangan Softskill di SMP/SMA Sederajat dan Pelatihan Remaja Teman Sebaya. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan Pengembangan Softskill di 10 (sepuluh) sekolah dengan peserta guru BK untuk target BNNP dan Pelatihan Remaja Teman Sebaya sebanyak total 170 (seratus tujuh puluh siswa di satker BNNK. Adapun rangkaian kegiatan dari program Ketahanan Diri adalah sebagai berikut.

Pengembangan Softskill di SMP/SMA (Satker BNNP)

1. Audiensi Pelaksanaan Pengembangan Softskill di Sekolah
2. Rapat Koordinasi Pengembangan Softskill
3. Pelatihan Softskill di SMP dan SMU Sederajat
4. Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Softskill di Sekolah

Pelatihan Remaja Teman Sebaya

1. Dialog Interaktif Teman Sebaya Anti Narkoba

METODE PENGUKURAN

Metode Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja tertuang pada Petunjuk Teknis Panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Pencegahan Tahun 2020. Indeks Ketahanan Diri Remaja diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Ketahanan Diri Remaja yang meliputi Dimensi Self Regulation, Assertiveness dan Reaching Out dalam kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi yang dibandingkan dengan Data Sekunder yaitu Kasus Narkoba Remaja(pada lokus kegiatan), Kegiatan Positif Remaja serta Jumlah Remaja yang mengikuti kegiatan Positif.

Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Pencegahan BNN RI sebagai pembina fungsi berperan melakukan supervisi pada tingkat BNNP hingga BNNK yang melakukan pengumpulan data berupa kuesioner dalam aplikasi berbasis web yang dinamakan Dektari Aja yang bisa diakses di halaman web dektari.bnn.go.id dengan instrumen alat ukur ketahanan diri berupa Anti Drug Scale (ADS). Kuesioner di isi oleh peserta program ketahanan diri remaja usia 12 s.d 21 tahun yang merupakan siswa target intervensi program ketahanan diri remaja atau yang mendapat informasi P4GN dengan minimum sample 50 (lima puluh) per satuan kerja. Pengolahan hasil akhir Dektari juga menambahkan faktor Dependen yang berupa jumlah pelaksanaan output pelaksanaan informasi dan edukasi melalui Media dan juga evaluasi kegiatan.

HASIL CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM

Hasil perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja BNNP Jatim dan jajaran dituangkan secara resmi dalam Surat Deputi Pencegahan BNN RI Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 24 Desember 2024 tentang Hasil Penghitungan Dektari Tahun 2024. Hasil angka penghitungan Dektari tahun 2024 secara nasional yaitu 52.04 (kategori TINGGI). Rata-rata untuk satker BNNP Jatim adalah 54.15 (kategori TINGGI). Berikut rekapitulasi nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di wilayah Provinsi Jawa Timur :

NO	SATKER	CAPAIAN TAHUN 2023				CAPAIAN TAHUN 2024			
		TARGET	HASIL	KATEGORI	KET	TARGET	HASIL	KATEGORI	KET
1	BNNP Jawa Timur	53.00	52.97	Tinggi	Tidak tercapai	53.00	54.71	Sangat Tinggi	Tercapai
2	BNNK Sumenep	53.00	55.32	Sangat Tinggi	Tercapai	55.32	55.67	Sangat Tinggi	Tercapai
3	BNN Kota Mojokerto	53.00	53.95	Sangat Tinggi	Tercapai	53.95	53.49	Tinggi	Tidak Tercapai Target Indeks
4	BNN Kota Malang	53.00	55.7	Sangat Tinggi	Tercapai	55.7	54.85	Tinggi	Tidak Tercapai Target Indeks
5	BNN Kota Batu	53.00	55.5	Sangat Tinggi	Tercapai	55.5	56.07	Sangat Tinggi	Tercapai
6	BNNK Tulungagung	53.00	55.59	Sangat Tinggi	Tercapai	55.59	56.07	Sangat Tinggi	Tercapai
7	BNNK Nganjuk	53.00	52.39	Tinggi	Tidak tercapai	52.39	54.38	Tinggi	Tercapai
8	BNNK Sidoarjo	53.00	54.54	Sangat Tinggi	Tercapai	54.54	55.21	Sangat Tinggi	Tercapai
9	BNN Kota Surabaya	53.00	53.88	Sangat Tinggi	Tercapai	53.88	46.84	Rendah	Tidak Tercapai
10	BNN Kota Kediri	53.00	55.67	Sangat Tinggi	Tercapai	55.67	55.65	Sangat tinggi	Tidak Tercapai Target Indeks

11	BNNK Malang	53.00	55.86	Sangat Tinggi	Tercapai	55.86	55.86	Sangat Tinggi	Tercapai
12	BNNK Gresik	53.00	53.62	Sangat Tinggi	Tercapai	53.62	44.80	Sangat Rendah	Tidak Tercapai
13	BNNK Trenggalek	53.00	51.55	Tinggi	Tidak tercapai	52.00	54.17	Sangat Tinggi	Tercapai
14	BNNK Lumajang	53.00	54.20	Sangat Tinggi	Tercapai	54.20	55.86	Sangat Tinggi	Tercapai
15	BNNK Blitar	53.00	46.76	Rendah	Tidak tercapai	52.00	55.11	Sangat Tinggi	Tercapai
16	BNNK Kediri	53.00	53.38	Sangat Tinggi	Tercapai	53.38	55.50	Sangat Tinggi	Tercapai
17	BNN Kabupaten Pasuruan	53.00	55.10	Sangat Tinggi	Tercapai	55.10	55.87	Sangat Tinggi	Tercapai
18	BNNK Tuban	53.00	52.79	Tinggi	Tidak tercapai	52.79	54.87	Sangat Tinggi	Tercapai

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2023 BNNP Jatim dan jajaran menetapkan target Indeks Ketahanan Diri Remaja dengan kategori minimal **“TINGGI”** di 17 BNNK/Kota dengan target capaian nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja minimal **53.00** yang dimana target indeks tersebut hanya berhasil di capai oleh 13 Satuan kerja yang mendapatkan indeks dibawah dan salah satu satker yaitu BNN Kab Blitar mendapatkan indeks 46.76 dengan kategori **“SANGAT RENDAH”** yang membuat BNN Kab Blitar belum berhasil mencapai target kategori maupun target capaian indeks.

Pada tahun 2024 terdapat arahan kebijakan baru dalam penetapan capaian. BNNP Jatim dan jajaran masih menetapkan Indeks Ketahanan Diri Remaja dengan kategori minimal **“TINGGI”** di 17 Satuan Kerja BNNP/BNNK namun indeks capaian berbeda-beda yang ditentukan berdasarkan Dialog Kinerja awal tahun 2024 dan diberikan arahan oleh pembina fungsi dalam penetapan target indeks ketahanan diri 2024 minimal adalah capaian indeks ketahanan diri tahun 2023 (sesuai tabel). Dari hasil kebijakan tersebut didapatkan hasil 2 (dua) satker belum bisa mencapai target Indeks dengan kategori **“TINGGI”** yaitu BNNK Surabaya dengan hasil Dektari 46.84 (RENDAH) dan BNNK Gresik dengan hasil Dektari 44.80 (SANGAT RENDAH). Terdapat pula 3 (tiga) satker yang mencapai target kategori **“TINGGI”** namun belum bisa mencapai target indeks yaitu BNN Kota Kediri, BNN Kota Malang dan BNN Kota Mojokerto.

Dari data capaian pengukuran Dektari pada 2023 dan 2024 terlihat bahwa terdapat satker yang mengalami peningkatan target yaitu satker BNNK Trenggalek, BNNK Tuban, BNNK Nganjuk, dan BNNK Blitar.

HAMBATAN DAN KENDALA

Penilaian Dektari merupakan komposit dari 3 faktor, yaitu :

- Faktor sekunder (banyaknya kegiatan positif di sekolah),
- Faktor nilai Anti Drugs Scale (banyaknya responden pengisian dan jawaban yang sesuai),
- Faktor evaluasi kegiatan program Informasi dan Edukasi (banyaknya pemuatan media informasi P4GN sesuai pelaksanaan DIPA).

Beberapa satuan kerja masih belum dapat mencapai target indeks dektari bahkan mencapai kategori Rendah dan Sangat Rendah. Adapun hambatan dan kendala yang dihimpun antara lain:

BNN Kota Surabaya (Capaian Indeks 46.84 Rendah)

- Kurangnya informasi tentang kegiatan positif remaja pada pengisian sasaran di aplikasi Indeks Ketahanan Diri Remaja. (Faktor Sekunder)
- Dalam pengisian kuesioner Dektari, masih ada peserta tidak memahami pertanyaan yang ada dalam kuesioner. (Faktor ADS)

BNN Kab Gresik (Capaian Indeks 44.80 Sangat Rendah)

- Adanya pengurangan anggaran DIPA pada kegiatan Informasi dan Edukasi yang dimana kegiatan media informasi menjadi salah satu aspek perhitungan tingginya Indeks Ketahanan Diri Remaja. BNNK Gresik telah melakukan beberapa kegiatan informasi dan edukasi yang bersifat non-DIPA namun kegiatan non-DIPA tidak dapat diperhitungkan untuk penghitungan skor. (Faktor Program Informasi dan Edukasi)

BNN Kota Kediri, BNN Kota Mojokerto, dan BNN Kota Malang (Mencapai target Kategori namun belum mencapai target indeks)

- Adanya pengurangan anggaran pemuatan media informasi P4GN karena Automatic Adjustment. Dan kegiatan non DIPA tidak dihitung dalam penghitungan skor.
- Setiap tahunnya ada perubahan tingkat demografi peserta kegiatan sehingga kemampuan mengisi kuesioner berbeda-beda.
- Target capaian tahun berjalan (2024) merupakan capaian tahun lalu (2023) sehingga dirasa terlalu tinggi dan menjadi beban target capaian tahun yang akan datang.

ALTERNATIF SOLUSI:

- Memperbanyak pemanfaatan media informasi P4GN dan melaporkan kegiatan tersebut di aplikasi Dektari.
- Memperdalam materi ketahanan diri pada remaja dan memperbanyak contoh-contoh nyata tentang konsep *self regulation*, *assertiveness* dan *reachingout* agar bisa dipahami oleh peserta.
- Memberikan pemahaman kepada pihak sekolah (Kepala Sekolah, Guru BK maupun Guru Kelas) tentang materi ketahanan diri remaja sehingga konsep ketahanan diri remaja dapat disampaikan secara berkesinambungan oleh pihak sekolah
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah secara berkala.

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERMASALAHAN SELANJUTNYA

- Berkoordinasi dengan stakeholder terkait yaitu Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mendukung melaksanakan rencana aksi sekolah target program ketahanan diri remaja.
- Mendalami materi ketahanan diri remaja perlu disebarluaskan secara komprehensif dan kontinyu dengan pembuatan materi yang mudah diterima oleh remaja sehingga remaja memiliki softskill tentang *self regulation*, *assertiveness* dan *reachingout*.
- Melakukan variasi Pemasangan media informasi akan lebih diperbanyak dengan konten yang kreatif untuk masyarakat untuk memperkuat data sekunder penghitungan di aplikasi Dektari.
- Berkoordinasi dengan Pembina fungsi untuk evaluasi pengisian di aplikasi agar bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi pelaksanaan kegiatan di satuan kerja wilayah.

2. Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

T.A. 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi dengan indeks minimal sesuai dengan ketentuan satker	17 Kabupaten/ Kota	13 Kabupaten/ Kota	76.47%

T.A. 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi dengan indeks minimal 78.69	17 Kabupaten/ Kota	17 Kabupaten/ Kota	100%

T.A. 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi dengan indeks minimal 78.68	17 Kabupaten/ Kota	16 Kabupaten/ Kota	94.11%

DEFINISI OPERASIONAL

Program intervensi ketahanan keluarga merupakan program yang bertujuan untuk mendorong keluarga (orang tua/wali dan anak) untuk meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga tentang keterampilan program pengasuhan orang tua, keterampilan hidup anak terkait bahaya penyalahgunaan narkoba serta penerapan pola hidup sehat dalam keluarga. Adapun program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di lakukan dengan tahapan antara lain:

- Rapat Koordinasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pelaksanaan intervensi keterampilan hidup keluarga anti narkoba kepada stakeholder baik instansi pemerintah, swasta/BUMN, kelompok/organisasi masyarakat dan institusi pendidikan serta kepala desa/kelurahan tempat pelaksanaan intervensi.

- Pembentukan Fasilitator Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemetaan fasilitator dan narasumber yang akan dilibatkan dalam proses kegiatan.

- Intervensi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba:

Pelaksanaan intervensi program ketahanan keluarga anti narkoba merupakan kegiatan peningkatan keterampilan hidup keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4x pertemuan dan diikuti 10 (sepuluh) keluarga yang terdiri dari 10 anak berusia 12-15 tahun dan 10 ayah/ibu/wali dengan total peserta 20 (dua puluh) per satuan kerja BNNP/BNNK.

METODE PENGUKURAN

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal. Pengukurannya menggunakan metode survey di isi oleh seluruh peserta ketahanan keluarga pada 173 Kabupaten/Kota wilayah kerja BNNK. Adapun instrumen yang digunakan untuk mengukur indeks antara lain:

- Kuesioner Demografi Keluarga, di isi oleh orang tua di pertemuan pertama
- Kuesioner *Strength and Difficulties* (SDQ), di isi oleh orang tua dalam bentuk pre tes yang di isi di pertemuan pertama dan post tes di pertemuan ke empat.
- Kuesioner *Parent and Family Adjustment Scales* (PAFAS), di isi oleh orang tua dalam bentuk pre tes yang di isi di pertemuan pertama dan post tes di pertemuan ke empat.
- Kuesioner *The Child and Youth Resilience Measure* (CYRM), di isi oleh anak dalam bentuk pre tes yang di isi di pertemuan pertama dan post tes di pertemuan ke empat.
- Kuesioner Angket Kepuasan Intervensi, di isi oleh anak dan orang tua pada pertemuan ke empat.

Hasil pengolahan hasil Indeks sepenuhnya dilakukan oleh pembina fungsi Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Pencegahan dengan klasifikasi capaian indeks sebagai berikut:

- 1) Kategori nilai 88,31 – 100 yaitu SANGAT TINGGI

- 2) Kategori nilai 76,61 – 88,30 yaitu TINGGI
- 3) Kategori nilai 65,00 – 76,60 yaitu RENDAH
- 4) Kategori nilai 25,00 – 64,49 yaitu SANGAT RENDAH

HASIL CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM

Pada tahun 2024 program intervensi ketahanan keluarga anti narkoba di satuan kerja BNNP Jawa Timur dan jajaran telah dilaksanakan kepada total 180 keluarga dengan total peserta 360 orang (terdiri dari 180 orang tua ayah/ibu/wali dan 180 anak). Hasil penghitungan Dektara Tahun 2024 di beritahukan secara resmi dalam surat Deputi Pencegahan BNN RI Nomor: B/4201/XII/DE/PC.01/2023/BNN tanggal 23 Desember 2024 tentang Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) Tahun 2024. Hasil penghitungan secara nasional secara nasional adalah **86,787 (kategori TINGGI)** dengan target angka 78.70 (Kategori tinggi). Adapun hasil capaian Data Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) di wilayah BNNP Jatim dan Jajaran adalah sebagai berikut:

NO	SATKER	CAPAIAN TAHUN 2023				CAPAIAN TAHUN 2024			
		TARGET	HASIL	KATEGORI	KET	TARGET	HASIL	KATEGORI	KET
1	BNNP Jawa Timur	78.69	79.107	TINGGI	tercapai	79.10	90.179	SANGAT TINGGI	tercapai
2	BNNK Sumenep	78.69	84.732	TINGGI	tercapai	84.73	87.946	TINGGI	tercapai
3	BNN Kota Mojokerto	78.69	81.161	TINGGI	tercapai	81.16	81.875	TINGGI	tercapai
4	BNN Kota Malang	78.69	86.429	TINGGI	Tercapai	86.42	82.500	TINGGI	belum mencapai target indeks
5	BNN Kota Batu	78.69	94.018	SANGAT TINGGI	Tercapai	94.10	90.179	SANGAT TINGGI	belum mencapai target indeks
6	BNNK Tulungagung	78.69	85.625	TINGGI	Tercapai	85.62	90.000	SANGAT TINGGI	tercapai
7	BNNK Nganjuk	78.69	87.143	TINGGI	Tercapai	87.14	90.446	SANGAT TINGGI	tercapai
8	BNNK Sidoarjo	78.69	81.071	TINGGI	Tercapai	81.07	84.821	TINGGI	tercapai
9	BNN Kota Surabaya	78.69	82.411	TINGGI	Tercapai	82.41	87.441	TINGGI	tercapai
10	BNN Kota Kediri	78.69	89.911	SANGAT TINGGI	Tercapai	89.91	91.696	SANGAT TINGGI	tercapai

11	BNNK Malang	78.69	93.125	SANGAT TINGGI	Tercapai	93.12	94.375	SANGAT TINGGI	tercapai
12	BNNK Gresik	78.69	93.750	SANGAT TINGGI	Tercapai	93.75	87.589	TINGGI	belum mencapai target indeks
13	BNNK Trenggalek	78.69	94.107	SANGAT TINGGI	Tercapai	94.10	96.875	SANGAT TINGGI	tercapai
14	BNNK Lumajang	78.69	93.839	SANGAT TINGGI	Tercapai	93.83	94.821	SANGAT TINGGI	tercapai
15	BNNK Blitar	78.69	85.625	TINGGI	Tercapai	85.89	84.286	TINGGI	belum mencapai target indeks
16	BNNK Kediri	78.69	84.018	TINGGI	Tercapai	84.01	85.625	TINGGI	tercapai
17	BNN Kabupaten Pasuruan	78.69	90.268	SANGAT TINGGI	Tercapai	90.26	92.321	SANGAT TINGGI	tercapai
18	BNNK Tuban	78.69	87.768	TINGGI	tercapai	87.76	80.286	TINGGI	belum mencapai target indeks

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2023 BNNP Jatim menetapkan target Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “TINGGI” untuk 17 satker BNNP/BNNK dengan nilai indeks minimal 78.69. Dari target tersebut di dapatkan hasil sebanyak 17 Satker BNNP/BNNK berhasil memenuhi target yang di tetapkan dengan capain kategori **TINGGI** 11 Satker BNNP/BNNK dan capaian kategori **SANGAT TINGGI** untuk 8 satker BNNP/BNNK

Pada tahun 2024 terdapat arahan kebijakan baru dalam penetapan capaian kinerja. BNNP Jatim dan jajaran masih menetapkan nilai Indeks Ketahanan Keluarga minimal berkategori “**TINGGI**” dengan indeks capaian berbeda-beda yang ditentukan berdasarkan Dialog Kinerja awal tahun 2024 dengan hasil kesepakatan bahwa capaian indeks tahun 2023 merupakan minimal target indeks ketahanan keluarga tahun 2024. Dari hasil tersebut di dapatkan keseluruhan satker berhasil mencapai target kategori yaitu minimal “TINGGI” namun terdapat 5 (lima) satuan kerja yang belum bisa mencapai target indeks dari yang di tetapkan. Kelima satker tersebut adalah BNNK Tuban, BNNK Blitar, BNNK Gresik, BNNK Batu, BNN Kota Malang.

HAMBATAN DAN KENDALA

Beberapa satuan kerja masih belum dapat mencapai target indeks dektara antara lain BNNK Tuban, BNNK Blitar, BNNK Gresik, BNNK Batu, BNN Kota Malang. Adapun hambatan dan kendala yang dihipun dari satuan kerja wilayah tersebut antara lain:

- Tingkat pendidikan dan ekonomi keluarga yang diintervensi tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya dimana kebanyakan peserta orang tua tingkat pendidikan hanya SD dan SMP sehingga menjadi kendala dalam pengisian kuesioner indeks ketahanan keluarga.
- Bebarapa fasilitator dari dalam dan luar BNN ada yang belum mendapatkan pelatihan intervensi ketahanan keluarga secara khusus dari BNN dan ilmunya hanya sekedar mendalami modul.
- Pelaksanaan ketahanan keluarga mengharuskan peserta orang tua/wali dan anak yang selalu sama dalam empat kali pertemuan. Namun daalam pelaksanaan program terdapat pergantian peserta orangtua dikarenakan kesibukan pribadi sehingga dalam pengisian kuesioner akhir tidak efektif karena tidak mengikuti keseluruhan materi.

ALTERNATIF SOLUSI :

- *Upgrade Skill* Fasilitator sehingga dapat menguasai materi dan memberikan pemahaman yang baik kepada peserta terkait program Ketahanan keluarga.
- Dalam pengisian indeks, keluarga akan di dampingi oleh fasilitator agar hasil pengisian lebih efektif dan tepat sasaran
- Berkoordinasi dengan Satuan Tugas Anti Narkoba yang telah dibentuk di masing-masing Kelurahan Bersinar untuk memantau tindak lanjut pelaksanaan program

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERMASALAHAN SELANJUTNYA

- BNNP Jatim telah melakukan koordinasi untuk penguatan sinergitas dengan Pemerintah Daerah serta Kepala Desa/Lurah serta mendukung program ketahanan keluarga di wilayah lokus intervensi.
- Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait peningkatan kapasitas fasilitator seperti HIMPSI dan PKK dengan harapan pemberian materi ketahanan keluarga lebih efektif dirasakan oleh peserta.

3. **Sasaran** : Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba

T.A. 2024

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah Provinsi dengan nilai indeks sesuai dengan ketentuan satuan kerja.	17 Kabupaten/ Kota	17 Kabupaten/ Kota	100 %

T.A. 2023

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah Provinsi dengan nilai indeks minimal 3.25	17 Kabupaten/ Kota	17 Kabupaten/ Kota	100%

T.A. 2022

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah Provinsi	17 Kabupaten/ Kota	17 Kabupaten/ Kota	100%

DEFINISI OPERASIONAL

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

Adapun tahap kegiatan program ini adalah sebagai berikut :

1. **Pemetaan kelompok sasaran / Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba.** Dalam kegiatan ini para peserta kegiatan memetakan calon penggiat anti narkoba yang nantinya akan dilatih untuk menjadi penggiat anti narkoba di masing-masing lingkungan.
2. **Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba** di masing-masing lingkungan dalam bentuk kegiatan

Workshop Penggiat P4GN (Instansi Pemerintah, Lingkungan Swasta, Lingkungan Masyarakat dan Lingkungan Pendidikan). *Workshop* Penggiat P4GN merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan peserta dalam membuat rencana aksi P4GN yang akan diimplementasikan di lingkungan masing-masing. Seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut mendapatkan pin dan sertifikat penggiat anti narkoba.

3. **Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urine.** Kegiatan ini dilaksanakan untuk deteksi dini apakah ada/tidak ada penyalahgunaan narkoba di lingkungan sasaran masing-masing.
4. **Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba (Lingkungan Pemerintah, Lingkungan Swasta).** Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan program untuk mendukung kebijakan KoTAN kepada lingkungan sasaran dalam upaya penyusunan Komponen Pendukung KoTan yaitu Perundang-Undangan, Anggaran, Implementasi hingga Evaluasi Kegiatan, Sumber Daya Manusia (Penggiat Anti Narkoba), Kemitraan Masyarakat dan Lembaga / Stakeholder terkait.
5. **Sinkronisasi Program dan Kerja / Konsolidasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Instansi Pemerintah, Lingkungan Swasta, Lingkungan Pendidikan).** Menyatukan visi misi masing-masing lingkungan sasaran agar mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan P4GN.
6. **Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba.** Mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan program KoTAN, Mengukur keberhasilan, hambatan dan kendala yang dialami masing-masing lingkungan sasaran.

METODE PENGUKURAN

Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipatif di berikan kepada penggiat anti narkoba yang telah mengikuti kegiatan bimbingan teknis maupun workshop yang dilaksanakan oleh satuan kerja BNNP Jatim dan jajaran. Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) pertanyaan yang terdiri dari aspek variabel sebagai berikut :

- a. Aspek Manusia (*Man*), adalah orang-orang, tokoh, Penggiat P4GN yang perlu ditemukan untuk diajak melakukan P4GN. Tujuan dari pemanfaatan aspek ini adalah untuk meningkatkan kepedulian terhadap waspada dini narkoba, dimana semakin banyak orang yang bisa diajak kerjasama akan semakin waspada lingkungan.
- b. Aspek Metode (*Methods*), adalah cara-cara yang digunakan, diciptakan, dikreasikan, dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan instansi setempat. Tujuan pemanfaatan aspek ini bagaimana penggiat meningkatkan kreatifitas dalam P4GN, dimana makin kreatif makin mudah kegiatan P4GN dilakukan dan diterima.
- c. Aspek Anggaran (*Money*), adalah biaya atau pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan P4GN di lingkungannya. Tujuan dari pemanfaatan dari aspek ini, bagaimana penggiat dapat meningkatkan volume kegiatan (kuantitas dan kualitas) dan menjamin keberlanjutan P4GN, di mana makin banyak anggaran peluang kegiatan P4GN ini diulang-ulang dan dilanjutkan akan semakin besar.
- d. Aspek Sistem (*System*), adalah aturan, norma/regulasi yang digunakan dalam mendukung atau memperkuat pelaksanaan P4GN di lingkungannya. Tujuan dari pemanfaatan aspek ini untuk

mengokohkan norma, kebiasaan (habit), budaya dan karakter, di mana semakin P4GN dijadikan peraturan tertulis maka keberlanjutan program akan terjamin.

- e. Aspek Sarana dan Prasarana (Machine & Material), peralatan atau media yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan P4GN. Adapun tujuan dari aspek ini, untuk mendukung terciptanya makin banyak bahan-bahan sosialisasi dalam P4GN baik untuk lingkungan dalam maupun masyarakat luas.
- f. Aspek Kegiatan (Activity). Jumlah frekuensi dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh seorang penggiat.

Selanjutnya dari 6 (enam) aspek yang menjadi indikator penilaian ini dibuat menjadi sebuah kuesioner. Kuesioner ini yang digunakan oleh BNNP dan BNN Kabupaten/Kota sebagai instrumen para penggiat dalam rangka mengukur Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)

Kuesioner yang telah diisi lengkap oleh penggiat, hasilnya diolah oleh BNNP dan BNN Kabupaten/Kota kemudian dihitung sesuai prosedur penghitungan dan dianalisis. Hasil analisis akan mengindikasikan lingkungan dalam 4 kategorisasi yaitu:

- a. Kategori A kriteria Sangat Mandiri
- b. Kategori B kriteria Mandiri
- c. Kategori C kriteria Kurang Mandiri
- d. Kategori D kriteria Tidak Mandiri

Jika hasil penghitungan didapat kategorisasi C (kurang mandiri) dan D (tidak mandiri) maka penggiat diharapkan mampu memperbaiki dengan menciptakan berbagai kegiatan P4GN di lingkungan tersebut.

HASIL CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM

Hasil perhitungan IKP yang dilakukan oleh BNNP Jatim dan jajaran Tahun 2024 tertuang resmi dalam surat hasil pengukuran IKP Deputi Pemberdayaan Masyarakat Nomor : B/4050/XII /DE/PM.00/2024/BNN tanggal 11 Desember 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2024. Adapun hasil capaian IKP rata-rata nasional adalah 3.59 (SANGAT MANDIRI). Capaian BNNP Jatim dan jajaran di dapatkan dengan hasil sebagai berikut:

NO	INSTANSI	TARGET ADVOKASI LEMBAGA	NILAI IKP	CAPAIAN IKP	KRITERIA	TARGET IKP 2024	KET
1	BNNP Jatim	1. Lingkungan Pemerintah	3.69	3.66	A (Sangat Mandiri)	3.67	Belum Mencapai Target Indeks
		2. Lingkungan Pendidikan	3.62				
2	BNNK TULUNGAGUNG	1. Lingkungan Pemerintah	3.73	3.87	A (Sangat Mandiri)	3.87	Tercapai
		2. Lingkungan Pendidikan	4				
3	BNNK TUBAN	1. Lingkungan Masyarakat	3.71	3.63	A (Sangat Mandiri)	3.54	Tercapai
		2. Lingkungan Pemerintah	3.55				
4	BNNK TRENGGALEK	1. Lingkungan Pemerintah	3.6	3.55	A (Sangat Mandiri)	3.45	Tercapai
		2. Lingkungan Pendidikan	3.5				
5	BNNK SUMENEP	1. Lingkungan Masyarakat	3.68	3.32	A (Sangat Mandiri)	3.30	Tercapai
		2. Lingkungan Pendidikan	2.96				
6	BNNK SIDOARJO	1. Lingkungan Pendidikan	3.76	3.80	A (Sangat Mandiri)	3.81	Belum Mencapai
		2. Lingkungan Masyarakat	3.84				

							Target Indeks
7	BNNK PASURUAN	1. Lingkungan Masyarakat	3.88	3.82	A (Sangat Mandiri)	3.74	Tercapai
		2. Lingkungan Pendidikan	3.76				
8	BNNK MOJOKERTO	1. Lingkungan Pemerintah	3.29	3.32	A (Sangat Mandiri)	3.31	Tercapai
		2. Lingkungan Masyarakat	3.34				
9	BNN KAB MALANG	1. Lingkungan Pemerintah	3.72	3.72	A (Sangat Mandiri)	3.70	Tercapai
		2. Lingkungan Pendidikan	3.72				
10	BNNK LUMAJANG	1. Lingkungan Pemerintah	3.56	3.56	A (Sangat Mandiri)	3.30	Tercapai
		2. Lingkungan Pendidikan	3.56				
11	BNN KAB KEDIRI	1. Lingkungan Masyarakat	3.84	3.52	A (Sangat Mandiri)	3.32	Tercapai
		2. Lingkungan Pendidikan	3.2				
12	BNNK GRESIK	1. Lingkungan Pemerintah	4	3.96	A (Sangat Mandiri)	3.94	Tercapai
		2. Lingkungan Masyarakat	3.92				
13	BNNK BLITAR	1. Lingkungan Pemerintah	3.47	3.41	A (Sangat Mandiri)	3.34	Tercapai
		2. Lingkungan Masyarakat	3.34				
14	BNN KOTA SURABAYA	1. Lingkungan Masyarakat	3.76	3.76	A (Sangat Mandiri)	3.30	Tercapai
		2. Lingkungan Pendidikan	3.76				
15	BNN KOTA MALANG	1. Lingkungan Pendidikan	3.78	3.52	A (Sangat Mandiri)	3.41	Tercapai
		2. Lingkungan Masyarakat	3.26				
16	BNN KOTA KEDIRI	1. Lingkungan Pemerintah	3.84	3.82	A (Sangat Mandiri)	3.80	Tercapai
		2. Lingkungan Masyarakat	3.8				
17	BNN KOTA BATU	1. Lingkungan Pemerintah	3.52	3.62	A (Sangat Mandiri)	3.54	Tercapai
		2. Lingkungan Pendidikan	3.72				
18	BNNK NGANJUK	1. Lingkungan Masyarakat	3.88	3.71	A (Sangat Mandiri)	3.67	Tercapai
		2. Lingkungan Pemerintah	3.54				

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2023 BNNP Jatim menetapkan target IKP “Mandiri” untuk 17 satker BNNP/BNNK dengan nilai indeks minimal 3.25. Dari target tersebut di dapatkan hasil sebanyak 17 Satker BNNP/BNNK dapat memenuhi target dengan kategori “Mandiri” dan berhasil mencapai target IKP minimal yaitu 3.25. Pada tahun 2024 BNNP kembali menetapkan target IKP yaitu kategori “Mandiri” yang berhasil dicapai oleh semua satuan kerja 17 BNNP/K dengan kategori “Sangat Mandiri”.

Pada tahun 2024 terdapat arahan kebijakan baru dalam penetapan capaian kinerja. BNNP Jatim dan jajaran masih menetapkan nilai Indeks Kemandirian Partisipatif dengan indeks capaian berbeda-beda yang ditentukan berdasarkan Dialog Kinerja awal tahun 2024. Dan dari hasil tersebut terdapat satuan kerja BNNK Sidoarjo kekurangan 0.1 point dari target (target 3.81 capaian 3.80). Oleh arahan pembina fungsi masih dianggap mencapai target penetapan kinerja BNNP dikarenakan capaian BNNK Sidoarjo sudah melebihi capaian renstra Deputi Pemberdayaan Masyarakat.

FAKTOR KEBERHASILAN:

BNNP Jatim dan jajaran menetapkan Indeks Kemandirian Partisipatif dengan minimal katategori “Mandiri” di 17 wilayah Kab/Kota keseluruhan satker berhasil melampaui target kategori dengan capaian ke 17 Kab/Kota yaitu “Sangat Mandiri”. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan antara lain:

- Dilakukan pemetaan kepada stakeholder untuk menentukan penggiat anti narkoba yang akan diberikan intervensi Bimbingan Teknis Penggiat P4GN
- Penggiat Anti Narkoba yang menjadi target intervensi kegiatan telah melakukan rencana aksi P4GN sesuai dengan tugas pokok penggiat sesuai dengan materi kegiatan Bimbingan Teknis Penggiat Anti Narkotika
- Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan penggiat anti narkotika

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERMASALAHAN SELANJUTNYA

1. Dari hasil pemilihan lembaga, belum ada satuan kerja yang melakukan intervensi di lingkungan swasta dikarenakan keterbatasan badan usaha/swasta dalam melakukan rencana aksi yang dapat mempengaruhi output dan outcome masing-masing satker. Untuk tahun selanjutnya akan diadakan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur untuk mendukung pembentukan penggiat P4GN di lingkungan swasta.
2. Memberikan pandangan kepada masing-masing penggiat lingkungan bahwa permasalahan narkoba bukan hanya tugas Badan Narkotika Nasional namun dibutuhkan sinergi seluruh *stakeholder* melaksanakan kegiatan P4GN dalam rencana aksi P4GN agar masyarakat mempunyai daya tangkal dan menerapkan pola hidup sehat tanpa narkoba demi terwujudnya Indonesia Bersih Narkoba (BERSINAR).
3. Melaporkan hambatan dan kendala kepada pembina fungsi yaitu Deputi Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan program yang lebih efektif.

4. Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	1	1	100%
2	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	3.1	2.82	91 %

DEFINISI OPERASIONAL

Status keterpulihan suatu kawasan rawan ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba yang telah diintervensi program lifeskill pemberdayaan alternatif yang dilaksanakan di desa atau kelurahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan narkoba dengan kategori Bahaya atau Waspada. Adapun rangkaian kegiatan dari Program Pemberdayaan Alternatif di Kawasan Rawan Narkoba antara lain:

1. Pemetaan Potensi SDM dan SDA pada kawasan rawan narkoba.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan (Strong), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai lokus intervensi pemberdayaan alternatif lifeskill di kawasan rawan. Kegiatan ini dilaksanakan pada awal tahun dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder di Desa/Kelurahan setempat untuk menghimpun data-data seperti kondisi geografis, demografis, dan potensi wilayah. Dari hasil pemetaan potensi tersebut akan diberikan rekomendasi terkait jenis pelatihan yang akan diberikan di wilayah intervensi kawasan rawan. Untuk satuan kerja BNNP Jatim tidak dianggarkan kegiatan Pemetaan Potensi SDM dan SDA pada kawasan rawan narkoba sesuai arahan Pembina Fungsi Deputi Pemberdayaan Masyarakat yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor : B/3484/IX/DE/PM/2023/BNN tanggal 20 September 2023 tentang Pemberitahuan Kebijakan Anggaran Tahun 2024. Dalam pemenuhan data potensi SDM dan SDA di dapatkan secara NON-DIPA melalui sinergitas program.

2. Rapat Kerja dalam Rangka Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif dengan Stakeholder

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan menggali informasi terkait prioritas sasaran, metode, waktu pelaksanaan dan lokasi prioritas kegiatan. Peserta kegiatan ini maksimal 30 (tiga puluh orang) yang merupakan *stakeholder* dari kalangan instansi pemerintah, dunia usaha, dan tokoh masyarakat dari kawasan rawan yang terpilih. Kegiatan dilakukan dengan diskusi yang membahas tentang penentuan lokasi, calon penerima manfaat, program alternated yang dikembangkan, rencana kerja/rencana aksi oleh *stakeholder* yang berperan. Untuk satuan kerja

BNNP Jatim tidak dianggarkan kegiatan Rapat Kerja Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif sesuai arahan Pembina Fungsi Deputi Pemberdayaan Masyarakat yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor : B/3484/IX/DE/PM/2023/BNN tanggal 20 September 2023 tentang Pemberitahuan Kebijakan Anggaran Tahun 2024.

3. Audiensi dengan Stakeholder dalam rangka Harmonisasi Program Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Narkoba

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membangun sinergi program pemberdayaan alternatif dengan stakeholder melalui audiensi yang bertujuan melakukan konsolidasi program, kegiatan dan anggaran dari stakeholder yang berpotensi dana atau di implementasikan pada kawasan rawan narkoba. Sasaran kegiatan yaitu bersinerginya stakeholder dalam program pemberdayaan alternatif dalam program pemberdayaan alternatif mengentaskan kawasan rawan narkoba. Kegiatan audiensi stakeholder juga dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan dunia usaha untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi (TJSL) sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemberdayaan Alternatif Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Koorporasi. Untuk satuan kerja BNNP Jatim tidak dianggarkan kegiatan Audiensi dengan stakeholder sesuai arahan Pembina Fungsi Deputi Pemberdayaan Masyarakat yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor : B/3484/IX/DE/PM/2023/BNN tanggal 20 September 2023 tentang Pemberitahuan Kebijakan Anggaran Tahun 2024.

4. Bimbingan Teknis Lifeskill bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba

Kegiatan ini merupakan kegiatan inti dari program pemberdayaan alternatif di kawasan rawan dengan tujuan pendidikan dan pelatihan tentang pola hidup sehat, praktek keterampilan dan kewirausahaan bagi masyarakat di kawasan rawan yang terpilih untuk mengikuti kegiatan. Peserta kegiatan ditentukan oleh Kepala desa sesuai dengan kriteria sejumlah 15 (lima belas) orang yang merupakan mantan penyalahguna narkoba dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan ini di harapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kemauan masyarakat dalam ketrampilan kerja ataupun kewirausahaan serta mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas narkoba.

5. Bimbingan Teknis Pendamping dalam Rencana Aksi Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Narkoba

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas para pendamping masyarakat dalam implementasi pemberdayaan alternatif pada kawasan rawan narkoba. Dalam kegiatan ini diberikan materi tentang tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban serta penyusunan rencana aksi pemberdayaan alternatif. Peserta kegiatan maksimal 20 (dua puluh) orang yang merupakan pendamping peserta *lifeskill*. Untuk satuan kerja BNNP Jatim tidak dianggarkan kegiatan Bimbingan Teknis Pendamping sesuai arahan Pembina Fungsi Deputi Pemberdayaan

Masyarakat yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor : B/3484/IX/DE/PM/2023/BNN tanggal 20 September 2023 tentang Pemberitahuan Kebijakan Anggaran Tahun 2024.

6. Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Narkoba

Kegiatan ini bertujuan untuk melihat suatu program dan kegiatan berproses sesuai yang direncanakan di organisasikan guna menghasilkan capaian sesuai yang diharapkan serta mendeteksi kendala dan hambatan sehingga menghasilkan evaluasi dan rekomendasi untuk di perbaiki kualitas dan kuantitasnya. Salah satu rangkaian dari monitoring dan evaluasi program pemberdayaan alternatif juga dilakukan pengukuran indeks keterpulihan kawasan rawan, survey kepuasan masyarakat dan indeks kewirausahaan.

METODE PENGUKURAN

Indikator keberhasilan sesuai penetapan kinerja adalah perubahan status keterpulihan kawasan rawan intervensi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada” dan nilai indeks keterpulihan kawasan rawan yang dihasilkan melalui pengukuran kuesioner yang mengukur sejauh mana intervensi program dapat berhasil dan dirasakan masyarakat. Dalam proses penetapan hasil kinerja program pemberdayaan alternatif kawasan rawan terdapat perbedaan metode pengukuran indeks keterpulihan kawasan rawan awal dan keterpulihan akhir. Perhitungan indeks keterpulihan kawasan awal menggunakan metode lama sesuai dengan kuesioner Petunjuk Teknis Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Tahun 2019. Sedangkan mengukur status keterpulihan akhir menggunakan kuesioner pengukuran kawasan rawan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Pemberdayaan Alternatif Pengukuran Kawasan Rawan Narkoba Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023.

Berikut adalah table perbedaan metode pengukuran lama dan metode pengukuran baru.

METODE LAMA (JUKNIS TAHUN 2019)	METODE BARU (JUKNIS TAHUN 2024)
<ul style="list-style-type: none"> - Terdiri dari 1 jenis kuesioner yang berisi 20 pertanyaan yang di isi oleh Kepala Desa, Perwakilan Camat, APH, dan peserta lifeskill - Tidak ada minimum jumlah responden dan target adalah pemenuhan data kerawanan sesuai indikator. 	<p>Tediri 3 Jenis Kuesioner yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seri Masyarakat (di isi oleh minimal 30 responden perwakilan masyarakat Desa/Kel atau peserta lifeskill dan berisi 33 pertanyaan) 2. Seri Kepala Desa/Lurah (di isi oleh Kepala Desa/Lurah berisi 28 pertanyaan) 3. Seri Aparat Penegak Hukum (disi oleh Penegak Hukum minimal 3 responden berisi 21 pertanyaan)
<p>Menggunakan kuesioner untuk mengukur 8 (delapan) indikator pokok dan 5 (lima) indikator pendukung yaitu :</p> <p>Indikator pokok</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasus kejahatan narkoba 	<p>Menggunakan kuesioner mengukur kerawanan narkoba dengan 3 variabel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba (kondisi keluarga, sekolah, teman sepermainan,

<ul style="list-style-type: none"> - Angka kriminalitas - Jumlah bandar narkoba - Kegiatan produksi - Angka pengguna narkoba - Jumlah Barang bukti narkoba - Jumlah entry bukti narkoba - Jumlah Kurir Narkoba <p>Indikator pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lokasi hiburan - Jumlah tempat kos dan hunian privacy tinggi - Jumlah angka kemiskinan - Adanya sarana publik - Rendahnya interaksi masyarakat 	<p>gangguan perilaku, kenakalan, gangguan kejiwaan dan kemiskinan).</p> <p>2) Pengurangan pasokan narkoba (upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum).</p> <p>3) Pengurangan permintaan narkoba (upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat dan dukungan masyarakat)</p>
---	--

HASIL CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM

Lokus intervensi kawasan rawan program pemberdayaan alternatif Tahun Anggaran 2024 diselenggarakan di Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Sebanyak 15 (lima belas) orang peserta laki-laki yang terdiri dari karang taruna, mantan pecandu narkoba, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan jenis pelatihan yang dipilih berdasarkan pemetaan potensi SDM dan SDA adalah pelatihan Servie AC. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah para peserta memiliki keahlian untuk melakukan berbagai keahlian service ac seperti mengenali komponen AC, mencuci AC, mengisi freon, bongkar pasang AC. Dalam rangkaian program juga diberi materi tentang menjalin relasi dan sinergitas keberlanjutan program dengan berbagai stakeholder terkait seperti APITU (Asosiasi Praktisi Pendingin Tata Udara Indonesia) untuk memperdalam materi kegiatan dan juga Dinas Tenaga Kerja Kab Lamongan melalui Balai Latihan Kerja Lamongan untuk peluang kerja.

REKAPITULASI PERHITUNGAN
INDEKS KETERPULIHAN KAWASAN RAWAN T.A 2024

NO	NAMA SATKER	IKKR AWAL (MENGUNAKAN JUKNIS 2019)		IKKR AKHIR (MENGUNAKAN JUKNIS 2024)			KET
		INDEKS	KATEGORI	TARGET	HASIL	KATEGORI	
1	BNNP Jatim (Lokus Intervensi Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)	1.74	BAHAYA	3.1	2.82	AMAN	TERCAPAI KETERPULIHAN NAMUN BELUM MENCAPAI TARGET INDEKS

INDEKS KETERPULIHAN KAWASAN RAWAN
BNNP JAWA TIMUR DAN JAJARAN T.A. 2023

NO	NAMA SATKER	STATUS KERAWANAN	IKKR AWAL	TARGET	IKKR AKHIR	KET
1	BNNP Jawa Timur (Lokus Intervensi Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwarum Kab Tulungagung)	Bahaya	1.68	2.45	3.02 (AMAN)	Tercapai Keterpulihan dan Mencapai Target

INDEKS KETERPULIHAN KAWASAN RAWAN
BNNP JAWA TIMUR DAN JAJARAN T.A. 2022

NO	NAMA SATKER	STATUS KERAWANAN	IKKR AWAL	TARGET	IKKR AKHIR	KET
1	BNNP Jawa Timur (Lokus Intervensi Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang)	Bahaya	1.68	2.45	2.45	Tercapai Keterpulihan dan Mencapai Target
2	BNN Kota Malang (Desa Lokus Intervensi Ngadilangkung, Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang)	Bahaya	1.73	2.45	3.05	

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Pelaksanaan program pemberdayaan alternatif yang dilaksanakan pada tahun 2024 dialokasikan anggaran hanya untuk satuan kerja BNNP Jatim sama seperti di tahun sebelumnya 2023. Pada tahun 2023 BNNP Jatim berhasil mencapai target keterpulihan yang semula BAHAYA menjadi AMAN dan berhasil pula mencapai target Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan. Pada tahun 2024 BNNP Jatim juga berhasil mencapai target keterpulihan yaitu dari BAHAYA menjadi AMAN namun untuk capaian indeks kawasan rawan dengan target indeks kawasan rawan yaitu 3.1 masih belum terpenuhi dari capaian BNNP Jatim yang hanya mencapai indeks 2.82. Adanya perbedaan jenis kuesioner dalam mengukur hasil indeks awal awal dan indeks akhir yang menggunakan menjadi pertimbangan dalam kurangnya pencapaian target indeks keterpulihan satker BNNP Jatim.

HAMBATAN DAN KENDALA

Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan alternatif di wilayah BNNP Jatim antara lain:

1. Nilai indeks keterpulihan kawasan rawan yang belum mencapai target indeks yang ditargetkan dengan indeks kawasan rawan 3.1 hanya bisa dicapai di angka indeks 2.8.
2. Dari 15 (lima belas) peserta pelatihan belum semua yang melakukan alih profesi. Masih belum semua peserta pelatihan mampu menjalankan usaha kerajinan service AC karena kesibukan dalam pekerjaan lain.
3. Keterbatasan anggaran BNN hanya dapat mengampu tahapan dayatif sampai dengan pemberian pelatihan, sehingga belum ada dukungan anggaran khusus guna keberlanjutan program seperti pelatihan lanjutan, permodalan, pemasaran, dan pendampingan pengembangan usaha.

ALTERNATIF SOLUSI :

1. Mengevaluasi juknis dan variable dalam kuesioner pengukuran kawasan rawan sehingga di tahun depan dapat melakukan pendampingan agar kusioner yang di isi oleh masyarakat bisa efektif.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder untuk dapat mendukung program pemberdayaan alternatif serta dapat membantu proses pemasaran produk.
3. BNNP Jatim akan berupaya untuk memantau dan melakukan asistensi pada peserta kegiatan agar bisa kembali produktif dalam mengaplikasikan hasil pelatihan.

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERMASALAHAN SELANJUTNYA

1. Melakukan Pendampingan kepada Masyarakat secara berkala diperlukan untuk keberlanjutan dan pengembangan kewirausahaan pada masyarakat Kawasan rawan Narkoba.

2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah tentang P4GN sehingga OPD yang terlibat dapat mendukung secara maksimal pelaksanaan program pemberdayaan alternatif yang ada di wilayahnya.
3. Pendekatan kepada Dunia Usaha yg berperan aktif dalam percepatan pemulihan kawasan Rawan Narkoba, baik melalui TJSL/CSR, sinergi program ataupun dana hibah yang diperuntukkan dalam pemulihan kawasan rawan narkoba
4. Melakukan monitoring secara periodik terhadap peserta pelatihan.

5. Sasaran : Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
5	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	96,54 %	141,97

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	-	-	93,15 %	96,54 %

DEFINISI OPERASIONAL

Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba klien rehabilitasi rawat jalan di Klinik BNNP Jawa Timur yang mengalami peningkatan kualitas hidup.

METODE PENGUKURAN

Evaluasi perkembangan klien adalah suatu proses yang bertujuan untuk menilai perubahan-perubahan yang terjadi pada klien selama mengikuti program rehabilitasi dengan menggunakan berbagai instrumen sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, salah satunya pengukuran perubahan kualitas hidup (BNN, 2022).

Mekanisme pengukuran perubahan kualitas hidup penerima layanan berdasarkan 4 (empat) aspek: fisik, psikologis, hubungan sosial, dan sumber daya lingkungan yang diberikan pada penerimaan awal rawatan serta pada akhir layanan rajal dan/atau akhir layanan pascarehabilitasi. Pada layanan lebih dari 3 bulan, maka pengukuran dilakukan tiap triwulan. Pengukuran menggunakan instrumen WHO-QoL Bref.

Kualitas hidup didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap kehidupan yang dijalannya sesuai dengan budaya dan nilai-nilai tempat individu tersebut tinggal serta membandingkan kehidupannya dengan harapan, standar dan tujuan yang telah ditetapkan oleh individu (WHO, 1997). Pengukuran kualitas hidup merupakan salah satu evaluasi perkembangan klien yang dinilai saat mengikuti rehabilitasi. Layanan pascarehabilitasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup klien. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup, maka diharapkan klien akan memiliki kapital pemulihan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang sehat produktif dan bermakna.

a. Waktu Pelaksanaan.

Peningkatan kualitas hidup diukur berdasarkan hasil evaluasi penilaian perubahan perilaku dengan menggunakan instrumen WHOQoL (WorldHealth Organization Quality of Life) - BREF yang mengukur 4 (empat) domain kehidupan yaitu fisik, psikologis, lingkungan dan hubungan sosial. Pengisian WHOQoL-BREF dimaksudkan untuk melihat ada atau tidaknya peningkatan kualitas hidup dari setiap klien. Pengukuran kualitas hidup menggunakan instrumen WHOQoL-BREF yang diisi langsung oleh klien didampingi oleh petugas rehabilitasi yang telah mengikuti pelatihan. Setelah itu dilakukan penilaian kualitas hidup pada masing-masing domain. Durasi pengukuran kualitas hidup dilakukan dalam waktu \pm 30 menit. Waktu pelaksanaan pengukuran WHOQoL- BREF pada saat awal klien menerima layanan rehabilitasi dan pada akhir penerimaan layanan pascarehabilitasi.

b. Tata Cara Pengukuran.

Tahapan pengukuran kualitas hidup adalah sebagai berikut:

1. Klien mengisi sendiri form WHOQoL-BREF;
2. Dilakukan skoring terhadap jawaban klien;
3. Evaluasi hasil WHOQoL-BREF klien;
4. Pencatatan dan pendokumentasian hasil WHOQoL-BREF.

Tahapan pengisian WHOQoL-BREF:

1. Kuesioner WHOQoL-BREF dilaksanakan pada saat klien datang atau sampai dengan H+7, dengan melihat kondisi klien. Diharapkan pada saat pengisian klien dalam keadaan stabil dan nyaman.
2. Kuesioner berbentuk pernyataan dan jawaban atas pernyataan tersebut.
3. Pengisian kuesioner didampingi oleh petugas.
4. Petugas dilarang mengarahkan jawaban klien.

Cara Penilaian WHOQOL-BREF dilakukan dengan perhitungan data:

1. Domain Fisik = (Q3) + (Q4) + Q10 + Q15 + Q16 + Q17 + Q18).
2. Domain Psikologis = (Q5 + Q6 + Q7 + Q11 + Q19 + (Q26).
3. Domain Hubungan Sosial = (Q20 + Q21 + Q22).
4. Domain Lingkungan = (Q8 + Q9 + Q12 + Q13 + Q14 + Q23 + Q24+Q25).

Hasil diprosentasikan dengan cara pemberian skor dan diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

- 76 – 100 % = kualitas hidup baik;
- 56 – 75 % = kualitas hidup cukup;
- < 56 % = kualitas hidup kurang;
- Apabila dari 20% data tidak lengkap, maka asesmen dibatalkan.

Data yang didapat kemudian dikonversi ke transformasi masing masing domain dengan skor 0-100 yang telah dikeluarkan oleh WHO.

c. Pelaporan.

Pelaporan merupakan hasil evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan efektifitas layanan rehabilitasi berupa peningkatan skor kualitas hidup klien yang didokumentasikan dan diinput ke dalam sistem informasi rehabilitasi narkotika (SIRENA).

Indikator kinerja persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup baru ada di tahun 2023, sedangkan tahun 2021 dan 2022 belum ada indikator kinerja ini. Pada tahun 2023, Indikator kinerja persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup BNNP Jawa Timur yaitu sebesar 93,15%. sedangkan pada tahun 2024 sebesar 100%.

Berikut rincian capaian indikator kinerja persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup BNNP Jawa Timur dan BNN Kab/Kota Jajaran pada tahun 2024 :

NO	BNNP/K	PERSENTASE (%)
1	BNNP Jawa Timur	96,54
2	BNN Kota Surabaya	85,37
3	BNN Kota Mojokerto	83,65
4	BNN Kota Malang	78,70
5	BNN Kota Kediri	71,88
6	BNN Kota Batu	96,59
7	BNN Kab. Blitar	80,26
8	BNN Kab. Gresik	86,90
9	BNN Kab. Kediri	97,28
10	BNN Kab. Lumajang	83,82
11	BNN Kab. Malang	82,81
12	BNN Kab. Nganjuk	91,67
13	BNN Kab. Pasuruan	97,50
14	BNN Kab. Sidoarjo	92,50
15	BNN Kab. Sumenep	79,17
16	BNN Kab. Trenggalek	91,67
17	BNN Kab. Tuban	87,93
18	BNN Kab. Tulungagung	77,78
TOTAL		1562,02
RATA-RATA		87,46

FAKTOR KEBERHASILAN

1. Adanya petugas rehabilitasi yang kompeten dalam layanan rehabilitasi rawat jalan
2. Terlaksananya layanan rehabilitasi sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

TINDAK LANJUT UNTUK TAHUN BERIKUTNYA

1. Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi kepada klien
2. Sosialisasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada kepada semua petugas layanan rehabilitasi
3. Meningkatkan kompetensi petugas rehabilitasi kepada klien

6. Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
6	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara IBM yang terlatih	138 Org	115 Org	216 Org	10 Org

DEFINISI OPERASIONAL

Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

METODE PENGUKURAN

Pengukuran dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Kondisi umum kejahatan narkoba dalam hal *demand side* salah satunya adalah rehabilitasi. Dalam hal ini BNN mendapatkan mandat dari undang-undang untuk melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi dan melakukan rehabilitasi itu sendiri. Penguatan lembaga rehabilitasi meliputi penguatan fasilitas rehabilitasi, tenaga rehabilitasi dan akhirnya melakukan standarisasi terhadap lembaga rehabilitasi yang ada. BNN telah melakukan rehabilitasi secara komprehensif dan berkelanjutan mulai dari rehabilitasi medis dan/atau sosial hingga layanan pascarehabilitasi.

Program rehabilitasi terus dilakukan sebagai upaya agar para pencandu dan korban penyalahgunaan dapat pulih dan mempertahankan pemulihannya serta meningkatkan fungsi sosialnya di masyarakat. Terbatasnya jumlah lembaga rehabilitasi yang ada mengakibatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi yang masih minim. Oleh karenanya diperlukan penambahan aksesibilitas fasilitas rehabilitasi untuk menjangkau kebutuhan layanan rehabilitasi di masyarakat melalui peningkatan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat yang nantinya dikembangkan sendiri oleh masyarakat dan untuk masyarakat guna meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan rehabilitasi di masyarakat yakni dengan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, dengan cara menghadirkan layanan rehabilitasi di masyarakat, mengingat ketersediaan dan aksesibilitas layanan yang masih terbatas jumlahnya. Program ini dilakukan dengan pendekatan dalam bentuk sederhana, yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan yang sulit untuk terlibat di dalamnya. Program IBM dilakukan dengan memberdayakan agen pemulihan (AP) yang merupakan kader IBM di desa/kelurahan. Agen pemulihan dipilih oleh Kepala Desa/Lurah untuk kemudian ditetapkan sebagai AP melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah mengenai pembentukan IBM

dan penetapam AP, serta ditembuskan kepada Camat setempat. Kemudian, BNNP Jatim memberikan pelatihan bagi masyarakat yang menjadi petugas AP.

Capaian indikator kinerja petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih BNNP dan BNNKab/Kota se-Jawa Timur tahun 2021 sebanyak 138 orang, tahun 2022 sebanyak 115 orang, tahun 2023 sebanyak 216 orang. Tahun 2024 capaian petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih BNNP Jawa Timur sebanyak 10 orang, sedangkan secara keseluruhan layanan IBM yang terlatih BNNP dan BNNKab/Kota se-Jawa Timur sebanyak 188 orang. Secara keseluruhan dari tahun 2021 s.d. tahun 2024, BNNP Jawa Timur dan BNNKab/Kota se-Jawa Timur telah memiliki petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih sebanyak 653 orang. Secara rinci target dan capaian petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih BNNP dan BNNKab/Kota se-Jawa Timur tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

NO	SATKER	TARGET		CAPAIAN	
	Provinsi Jawa Timur	180	Orang	188	Orang
1	BNNP Jawa Timur	10	Orang	10	Orang
2	BNN Kota Surabaya	10	Orang	10	Orang
3	BNN Kota Mojokerto	10	Orang	10	Orang
4	BNN Kota Malang	10	Orang	10	Orang
5	BNN Kota Kediri	10	Orang	10	Orang
6	BNN Kota Batu	10	Orang	10	Orang
7	BNN Kab. Blitar	10	Orang	12	Orang
8	BNN Kab. Gresik	10	Orang	10	Orang
9	BNN Kab. Kediri	10	Orang	10	Orang
10	BNN Kab. Lumajang	10	Orang	10	Orang
11	BNN Kab. Malang	10	Orang	10	Orang
12	BNN Kab. Nganjuk	10	Orang	10	Orang
13	BNN Kab. Pasuruan	10	Orang	10	Orang
14	BNN Kab. Sidoarjo	10	Orang	11	Orang
15	BNN Kab. Sumenep	10	Orang	15	Orang
16	BNN Kab. Trenggalek	10	Orang	10	Orang
17	BNN Kab. Tuban	10	Orang	10	Orang
18	BNN Kab. Tulungagung	10	Orang	10	Orang

FAKTOR KEBERHASILAN

1. Antusias warga masyarakat untuk menjadi petugas Agen Pemulihan di desa/kelurahan masing-masing.
2. Adanya dukungan dari Kepala Desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta instansi terkait untuk membentuk Agen Pemulihan di wilayahnya.

Alternatif solusi:

1. Melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi mengenai program IBM, agar tidak lagi ada stigma dari masyarakat.
2. Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan jadwal antara AP dan klien
3. Meminta komitmen AP agar dapat fokus dalam melakukan kegiatan IBM meskipun ada kesibukan lain.

TINDAK LANJUT UNTUK TAHUN BERIKUTNYA

Memberikan saran kepada Kepala desa/ Lurah untuk memilih AP (Agen pemulihan) sesuai dengan kriteria salah satunya yang memiliki komitmen. Selain itu, melakukan koordinasi dan komunikasi apabila terdapat AP yang tidak aktif untuk selanjutnya dilakukan penambahan/pergantian AP sehingga tidak menghambat kegiatan IBM.

7. Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	2	3	150

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi	Jumlah Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lemba ga	12 Lemba ga	8 Lemba ga	3 Lemba ga

DEFINISI OPERASIONAL

Lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

Peningkatan aksesibilitas fasilitas rehabilitasi dalam menjangkau kebutuhan layanan rehabilitasi di masyarakat selain dari peningkatan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat juga dari penyelenggara layanan rehabilitasi dari Klinik BNNP/BNNK, LRIP dan LRKM.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan fasilitas layanan, BNNP Jawa Timur melakukan peningkatan kinerja lembaga melalui pelaksanaan standarisasi lembaga rehabilitasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM adalah acuan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, penyalahguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, agar layanan rehabilitasi yang diselenggarakan berkualitas. Tujuan SPM salah satunya untuk mempersiapkan penyelenggara layanan rehabilitasi baik BNN maupun mitra BNN sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8807 tahun 2022.

Capaian indikator kinerja Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi tahun 2021 sebanyak 1 (satu) lembaga, tahun 2022 sebanyak 12 (dua belas) lembaga, tahun 2023 sebanyak 8 (delapan) lembaga, dan tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) lembaga. Secara keseluruhan sejak tahun 2021 s.d tahun 2024, capaian indikator kinerja Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi sebanyak 24 (dua puluh empat) lembaga. Target lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun anggaran 2024 sebanyak 2 (dua) Lembaga, dengan capaian sebanyak 3 (tiga) Lembaga. Berikut Lembaga rehabilitasi yang memenuhi SPM.

NO	LEMBAGA REHABILITASI	SETTING
1	Klinik Pratama BNN Kab. Lumajang	Rawat Jalan Medis
2	Klinik Pratama BNN Kab. Sumenep	Rawat Jalan Medis
3	Ghana Recovery	Rawat Inap Sosial

FAKTOR KEBERHASILAN

1. Adanya kemauan dan kemampuan dari SDM untuk melengkapi persyaratan yang kurang dalam bimtek pertama.
2. Adanya kerjasama antar tim yang solid.
3. Adanya sarana prasarana yang mendukung.

HAMBATAN DAN KENDALA DISERTAI ALTERNATIF SOLUSI

1. Beberapa Lembaga rehabilitasi belum memenuhi persyaratan SDM. Belum memiliki perawat/pekerja sosial
2. Beberapa Lembaga rehabilitasi belum memenuhi persyaratan sarana prasarana
3. Beberapa Lembaga rehabilitasi belum tertib administrasi

Alternatif solusi:

- a. Memberikan bimtek dan arahan kepada petugas rehabilitasi agar dapat memenuhi persyaratan SDM dan sarana prasarana
- b. Memberikan bimtek terkait administrasi dalam layanan rehabilitasi

TINDAK LANJUT UNTUK TAHUN BERIKUTNYA

Memberikan bimtek SPM kepada BNNK untuk mempersiapkan target tapkin tahun berikutnya.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	36	37	102,78

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi intervensi berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah prov	20 Unit	22 Unit	42 Unit	37 Unit

DEFINISI OPERASIONAL

Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya.

METODE PENGUKURAN

Pengukuran dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Salah satu respon BNN dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan Narkoba adalah dengan membentuk program Desa Bersinar, yaitu desa yang diupayakan memiliki kemampuan untuk mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba di wilayahnya secara mandiri. Program IBM merupakan salah satu bentuk respon masyarakat terhadap layanan rehabilitasi minimal dalam kaitan dengan program P4GN terkait Desa Bersinar. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam mengentaskan masalah penyalahgunaan narkoba, karena masalahnya ada di masyarakat dan potensi sumber untuk menanganinya pun ada di masyarakat.

Capaian indikator kinerja unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2021 sebanyak 20 unit, tahun 2022 sebanyak 22 unit, tahun 2023 sebanyak 42 unit, dan tahun 2024 sebanyak 37 unit. Secara

keseluruhan capaian indikator kinerja unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2021 s.d. tahun 2024 sebanyak 121 unit. Secara rinci target dan capaian unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

NO	SATKER	TARGET		CAPAIAN	
	Provinsi Jawa Timur	36	Unit	37	Unit
1	BNNP Jawa Timur	2	Unit	2	Unit
2	BNN Kota Surabaya	2	Unit	2	Unit
3	BNN Kota Mojokerto	2	Unit	2	Unit
4	BNN Kota Malang	2	Unit	2	Unit
5	BNN Kota Kediri	2	Unit	2	Unit
6	BNN Kota Batu	2	Unit	2	Unit
7	BNN Kab. Blitar	2	Unit	2	Unit
8	BNN Kab. Gresik	2	Unit	2	Unit
9	BNN Kab. Kediri	2	Unit	2	Unit
10	BNN Kab. Lumajang	2	Unit	2	Unit
11	BNN Kab. Malang	2	Unit	2	Unit
12	BNN Kab. Nganjuk	2	Unit	2	Unit
13	BNN Kab. Pasuruan	2	Unit	2	Unit
14	BNN Kab. Sidoarjo	2	Unit	2	Unit
15	BNN Kab. Sumenep	2	Unit	3	Unit
16	BNN Kab. Trenggalek	2	Unit	2	Unit
17	BNN Kab. Tuban	2	Unit	2	Unit
18	BNN Kab. Tulungagung	2	Unit	2	Unit

FAKTOR KEBERHASILAN

1. Dari 37 (tiga puluh tujuh) unit penyelenggara IBM terdapat 16 (enam belas) unit IBM dengan Fase Prima, dimana unit IBM tersebut didukung oleh dana desa. Sedangkan 221 (dua puluh satu) unit IBM dengan Fase Tangguh.
2. Terdapat 1 (satu) unit IBM mandiri, yang mendapatkan dana hibah penuh dalam penyelenggaraan Intervensi Berbasis Masyarakat, yaitu IBM Kalimook dari BNN Kab. Sumenep
3. Adanya komitmen perangkat desa dan Agen Pemulihan (AP) untuk menyelenggarakan layanan IBM.

HAMBATAN DAN KENDALA

1. Tidak semua unit IBM didukung oleh dana desa.
2. Adanya kegiatan yang dilaksanakan di desa/kelurahan, terutama di bulan-bulan tertentu seperti bulan Agustus, yang menghambat pelaksanaan kegiatan IBM.

Alternatif solusi:

- a. Melakukan pendekatan kepada desa/kelurahan penyelenggara IBM serta pihak-pihak terkait, agar pelaksanaan kegiatan IBM dapat tetap berjalan serta berkoordinasi agar desa/kelurahan dapat menganggarkan dana desa untuk kegiatan IBM.
- b. BNNP/BNNK melakukan pendekatan lebih intens dengan pihak perangkat desa dalam rangka pencapaian target klien.

TINDAK LANJUT UNTUK TAHUN BERIKUTNYA

1. Diperlukan komitmen desa atau kelurahan agar dapat mendukung kegiatan IBM, dengan menganggarkan dana desa dan memfasilitasi AP dalam menjangkau klien.
2. Mendorong pemerintah desa/kota untuk mengeluarkan peraturan daerah terkait regulasi kegiatan IBM, salah satunya mengenai dukungan anggaran bagi kegiatan IBM.

8. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,77	3,87	102,65

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehab pada fasilitas rehab BNN	3,48	3,707	3,99	3,87

DEFINISI OPERASIONAL

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

METODE PENGUKURAN

Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Capaian indikator capaian indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas di BNNP Jawa Timur dari tahun 2021 s.d. tahun 2023 mengalami peningkatan, tahun 2021 yaitu 3,48, tahun 2022 yaitu 3.71, tahun 2022 yaitu 3,99. Sedangkan tahun 2024 ada perbedaan cara perhitungan., yaitu dengan menggunakan "true score". True score yaitu perhitungan indeks berdasarkan bobot dari setiap butir pernyataan. Mampu mengurangi kesalahan pengukuran karakteristik yang diukur, sehingga meningkatkan akurasi representasi IKM. Dengan proses transformasi data menjadi z-score dan factor score, indeks menjadi dinamis sesuai dengan jumlah data pengisian survey. Mengakomodir variasi perbedaan Tingkat kesetujuan antar butir pernyataan. Capaian indikator capaian indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas di BNNP Jawa Timur tahun 2024 yaitu 3,87. Berikut target dan capaian indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas di BNNP Jawa Timur dan BNN Kab/Kota Jajaran Tahun 2024:

NO	BNNP/K	2024
1	BNNP Jawa Timur	3,87
2	BNN Kota Surabaya	3,46
3	BNN Kota Mojokerto	3,74
4	BNN Kota Malang	3,87
5	BNN Kota Kediri	3,45
6	BNN Kota Batu	3,73
7	BNN Kab. Blitar	3,4
8	BNN Kab. Gresik	3,75
9	BNN Kab. Kediri	3,36
10	BNN Kab. Lumajang	3,62
11	BNN Kab. Malang	3,53
12	BNN Kab. Nganjuk	3,56
13	BNN Kab. Pasuruan	3,21
14	BNN Kab. Sidoarjo	3,89
15	BNN Kab. Sumenep	3,37
16	BNN Kab. Trenggalek	3,57
17	BNN Kab. Tuban	3,6
18	BNN Kab. Tulungagung	3,62
TOTAL		64,6
RATA RATA		3,59

Beberapa poin yang ditanyakan dalam kuesioner IKM, antara lain:

1. Persyaratan layanan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur layanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk dan spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

FAKTOR KEBERHASILAN

1. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan berpedoman pada kepuasan klien.

TINDAK LANJUT UNTUK TAHUN BERIKUTNYA

Agar petugas layanan rehabilitasi memberikan layanan yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.

Selain penyelenggaraan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi milik BNN, BNN juga mendukung lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat dalam upaya optimalisasi layanan rehabilitasi, berupa peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi dan fasilitasi layanan rehabilitasi.

Tantangan aksesibilitas layanan rehabilitasi menjadi hal pokok yang harus segera ditangani. Hal ini dikarenakan kapasitas tersebut masih sangat jauh apabila dibandingkan kebutuhan jangkauan dari mereka yang seharusnya menjadi prioritas rehabilitasi.

Berikut adalah capaian lembaga rehabilitasi milik BNN maupun lembaga rehabilitasi mitra yang operasional yang bekerjasama dengan BNNP/BNNK Tahun 2024 :

NO	LEMBAGA REHABILITASI	OPERASIONAL /TIDAK OPERASIONAL	JUMLAH KLIEN	
			RI	RJ
1	BNNP Jawa Timur	OPERASIONAL	0	72
2	RSUD Dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo	OPERASIONAL	0	10
3	Yayasan Berkas Bersinar Abadi Kabupaten Lamongan	OPERASIONAL	51	0
4	Klinik Ghana Prima Pamekasan	OPERASIONAL	0	63
5	Rumah Rehabilitasi Al Hidayat Sampang	OPERASIONAL	11	2
6	LRPPN BI Banyuwangi	OPERASIONAL	45	20
7	Gendhug Nemu Sariro Banyuwangi	OPERASIONAL	6	0
8	KP2M Banyuwangi	OPERASIONAL	12	0
9	Klinik An-Nisa Probolinggo	OPERASIONAL	2	4
10	Ghana Recovery Pamekasan	OPERASIONAL	42	0
11	BNN Kab Malang	OPERASIONAL	0	19
12	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	OPERASIONAL	96	0
13	HMC DAU	OPERASIONAL	19	0
14	BNN Kab Gresik	OPERASIONAL	0	27
15	RSUD Ibnu Sina Gresik	OPERASIONAL	0	4
16	RS Fathma Medika Gresik	OPERASIONAL	0	1
17	RS Wates Husada Kab Gresik	TIDAK OPERASIONAL	0	0
18	Rumah Rehabilitasi Supri Soli Gresik	OPERASIONAL	0	4
19	BNN Kab Tuban	OPERASIONAL	0	20
20	RSUD Dr. R Koesma Tuban	TIDAK OPERASIONAL	0	0
21	Puskesmas Tuban	OPERASIONAL	0	1

22	Klinik Ar Rochma	OPERASIONAL	0	9
23	BNN Kab Sidoarjo	OPERASIONAL	0	10
24	Yayasan Rehabilitasi Rumah Merah Putih	OPERASIONAL	78	108
25	Yayasan Rehabilitasi Korban Narkoba (KOBRA)	OPERASIONAL	0	114
26	Yayasan Rehabilitasi Sahwahita Nusantara	OPERASIONAL	58	21
27	Yayasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Al Kholiqi	OPERASIONAL	7	45
28	BNN Kota Kediri	OPERASIONAL	0	29
29	Eklesia Kediri Foundation	OPERASIONAL	8	19
30	BNN Kab Tulungagung	OPERASIONAL	0	43
31	Puskesmas Bangunjaya	OPERASIONAL	0	2
32	RSUD DR Iskak Tulungagung	OPERASIONAL	0	5
33	Klinik Lapas Klas IIB Tulungagung	OPERASIONAL	0	15
34	BNN Kota Batu	OPERASIONAL	0	25
35	Puskesmas Batu	OPERASIONAL	0	23
36	RS Karsa Husada Batu	TIDAK OPERASIONAL	0	0
37	Pondok Pemulihan Doulos Batu	OPERASIONAL	21	0
38	BNN Kab Lumajang	OPERASIONAL	0	32
39	Puskesmas Klakah	OPERASIONAL	0	3
40	Puskesmas Jatiroto	OPERASIONAL	0	22
41	BNN Kab Pasuruan	OPERASIONAL	0	10
42	RSUD Bangil	OPERASIONAL	0	11
43	RSI Masyithoh	OPERASIONAL	0	8
44	BNN Kota Mojokerto	OPERASIONAL	0	21
45	Puskesmas Gedongan	OPERASIONAL	0	3
46	RS Kamar Medika	OPERASIONAL	0	3
47	BNN Kota Surabaya	OPERASIONAL	0	42
48	Yayasan Rumah Kita Surabaya	OPERASIONAL	77	4
49	Yayasan Orbit Surabaya	OPERASIONAL	149	10
50	PLATO Foundation	OPERASIONAL	129	37
51	Yayasan LRPPN- BI Surabaya	OPERASIONAL	12	26
52	Yayasan Rumah Merah Putih Surabaya	OPERASIONAL	21	26
53	Yayasan Ashefa Surabaya	OPERASIONAL	225	158
54	RSJ Menur Surabaya	OPERASIONAL	151	51
55	BNN Kab Sumenep	OPERASIONAL	0	30
56	Puskesmas Dasuk	OPERASIONAL	0	3
57	BNN Kab Blitar	OPERASIONAL	0	11
58	RSU An Nisaa	OPERASIONAL	0	3
59	BNN Kota Malang	OPERASIONAL	0	19
60	Puskesmas Kendalsari	OPERASIONAL	0	19
61	Yayasan Sadar Hati	OPERASIONAL	0	6
62	BNN Kab. Kediri	OPERASIONAL	0	36

63	BNN Kab. Trenggalek	OPERASIONAL	0	44
64	BNN Kab. Nganjuk	OPERASIONAL	0	40
TOTAL			1220	1393

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari 22 LRKM yang berPKS dengan BNN, terdapat 21 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang operasional dan sebanyak 1 lembaga belum operasional. Sedangkan yang dimaksud dengan jumlah fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang operasional adalah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang bekerjasama dengan BNNP/BNNK untuk menjalankan layanan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial baik rawat jalan/rawat inap dan telah melaksanakan layanan rehabilitasi pada klien.

FAKTOR KEBERHASILAN

- a. Banyak lembaga baik LRIP maupun LRKM yang antusias ingin bekerjasama dengan BNN.
- b. Tenaga layanan rehabilitasi sudah terlatih.
- c. Adanya dukungan dari SKPD terkait.

HAMBATAN DAN KENDALA DISERTAI ALTERNATIF SOLUSI

1. Tidak semua lembaga rehabilitasi yg ter-skep BNN operasional
2. Lembaga yang sudah dilatih petugasnya kesulitan mendapatkan klien.
3. Petugas rehabilitasi yang sudah mendapatkan pelatihan telah dimutasi, meninggal ataupun resign.

Alternatif solusi:

- a. BNNP/BNNK membantu lembaga mendapatkan klien dengan merujuk klien ke lembaga tersebut.
- b. BNNP/BNNK aktif melakukan bimbingan teknis kepada Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP) dan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM)

TINDAK LANJUT UNTUK TAHUN BERIKUTNYA

1. BNNP/BNNK lebih selektif dalam mengajukan SKep lembaga.
2. Merekomendasikan kepada lembaga untuk lebih aktif menjangkau klien.

9. **Sasaran** : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
	Jumlah kasus tindak pidana narkoba yang P-21	22	40	182

DEFINISI OPERASIONAL

Berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkoba yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkoba yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal.

Pada Tahun 2024 BNNP Jawa Timur dan BNNK Jajaran menangani 50 Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba. Dari 50 Berkas Perkara yang ditangani 36 Berkas Perkara telah P.21 dan 14 Berkas Perkara masih dalam proses penyidikan dan dilanjutkan penyidikannya di Tahun 2025. Selain 36 berkas tersebut terdapat 4 berkas perkara yang proses penyidikannya dimulai pada tahun 2023 dan P.21 di tahun 2024. Sehingga jumlah berkas perkara yang P.21 di tahun 2024 adalah 40 berkas perkara.

**JUMLAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG P.21
T.A. 2023**

NO	SATKER	JUMLAH BERKAS PERKARA P-21	KETERANGAN
1	BNNP Jawa Timur	10	1 Berkas Perkara masih dalam proses penyidikan dan dilanjutkan di Tahun 2024.
2	BNN Kota Surabaya	6	
3	BNN Kab. Sidoarjo	2	
4	BNN Kab. Gresik	4	2 Berkas Perkara masih dalam proses penyidikan dan dilanjutkan di Tahun 2024.
5	BNN Kota Mojokerto	10	
6	BNN Kab. Kediri	2	
7	BNN Kab. Tulungagung	2	
8	BNN Kota Kediri	1	
9	BNN Kab. Blitar	3	
10	BNN Kota Batu	2	
11	BNN Kab. Malang	1	
12	BNN Kota Malang	2	1 Berkas Perkara masih dalam proses penyidikan dan dilanjutkan di Tahun 2024.
13	BNN Kab. Sumenep	3	
14	BNN Kab. Nganjuk	2	
15	BNN Kab. Tuban	4	
16	BNN Kab. Trenggalek	1	
17	BNN Kab. Pasuruan	1	
18	BNN Kab. Lumajang	-	
TOTAL		56	

**JUMLAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG P.21
T.A. 2024**

NO	SATKER	JUMLAH BERKAS PERKARA P-21	KETERANGAN
1	BNNP Jawa Timur	35	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Berkas Perkara merupakan Berkas perkara yang proses penyidikannya dimulai tahun 2023 dan P.21 di Tahun 2024. • 14 Berkas Perkara masih dalam proses penyidikan dan dilanjutkan di Tahun 2024.
2	BNN Kab. Gresik	2	Berkas perkara 2023 yang dilanjutkan proses penyidikannya di Tahun 2024
3	BNN Kab. Blitar	2	
4	BNN Kota Malang	1	Berkas perkara 2023 yang dilanjutkan proses penyidikannya di Tahun 2024
TOTAL		40	

Faktor Keberhasilan:

1. Komitmen dan kerjasama yang baik antar personel dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika
2. Dukungan Teknologi Intelijen (TI) yang telah dimiliki oleh BNN dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika
3. Koordinasi yang baik antar instansi dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika

Permasalahan:

1. Kurangnya personel dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
2. Sarana dan Prasarana untuk mendukung kegiatan yang kurang memadai
3. Lamanya hasil pemeriksaan Labfor Narkotika dan Kloning HP sehingga berpengaruh pada waktu penyidikan kasus yang sedang ditangani

Rekomendasi/ Tindak Lanjut:

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan selaku Pembina fungsi
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika
3. Perlunya peningkatan kualitas dan personel karena belum seluruh Kota dan Kabupaten di Jawa Timur terdapat BNNK. Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Kabupaten/Kota yang ada BNNK masih 18 Kabupaten/Kota.

10. Sasaran : Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	100	100	100

DEFINISI OPERASIONAL

Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan yang meliputi: tidak adanya tahanan kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNN. Adapun rumus penghitungan indikator kinerja ini sebagai berikut:

K3T= Nilai Kemanan, Ketertiban dan Keselamatan Tahanan

a = Jumlah tahanan yang kabur

b = Jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian

c = Jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d.100, maka:

$$K3T = \left[\frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c) \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \right] \times 100$$

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan adalah ukuran keberhasilan dalam menjaga kamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan, pada Tahun 2024 tahanan pada BNN Provinsi Jawa Timur sebanyak 58 orang tersangka.

Selama Tahun 2024 tidak terjadi gangguan yang berarti terhadap tahanan baik pada keamanannya dan juga ketertiban tahanan, dalam menjaga kesehatan tahanan, Klinik Pratama BNN Provinsi Jawa Timur rutin memeriksa kesehatan tahanan untuk memastikan tahanan dalam keadaan sehat, selain pemeriksaan Kesehatan BNNP Jawa Timur juga rutin melakukan kegiatan Bimbingan Rohani dan Mental kepada tahanan BNNP Jawa Timur.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100

DEFINISI OPERASIONAL

Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar (secara alamiah/kimiawi) pada barang bukti narkotika dan non-narkotika.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non-narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahterimakan untuk tahap penuntutan (tahap II). Penghitungan kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah: Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA pengeluaran. Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai $a = 1$, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka $a = 0$ KKB= Nilai Keamanan Barang Bukti

a_1 = untuk barang bukti 1;

a_2 = untuk barang bukti 2;

a_y = dst.

Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d. 100 Maka:

$$KKB = \left[\frac{a_1+a_2+\dots+a_y}{y} \times 100\% \right] \times 100$$

JUMLAH TERSANGKA DAN BARANG BUKTI NARKOTIKA T.A. 2024

NO.	SATKER	JUMLAH TERSANGKA	BARANG BUKTI NARKOTIKA		
			SABU (gr)	EKSTASI (butir)	GANJA (gr)
1	BNNP Jawa Timur	56	12.584,635	4.144	4.088,71
2	BNN Kab. Blitar	2	14,53	-	-
TOTAL		58	12,599,165	4.144	4.088,71

Faktor Keberhasilan:

1. Komitmen dan kerjasama yang baik oleh personil dalam melaksanakan tugas pengamanan tahanan dan barang bukti
2. Koordinasi yang baik antar instansi baik Polri maupun Lapas khususnya bantuan dalam penitipan tahanan
3. Sudah adanya register tahanan barang bukti narkotika dan non narkotika beserta papan kontrol dan pelaporan secara rutin
4. Anggaran makan tahanan dan pemeriksaan kesehatan tahanan yang mencukupi

Permasalahan:

1. Kurangnya jumlah CCTV pada ruang penyimpanan barang bukti
2. Kebutuhan renovasi untuk ruang tahanan agar sesuai standar yang berlaku
3. Kurangnya sarana dan prasarana laptop dan printer untuk mempermudah pelaksanaan administrasi penyimpanan BB narkotika maupun narkotika

Rekomendasi / Tindak Lanjut:

Permohonan adanya pengadaan CCTV, laptop dan printer serta kebutuhan renovasi ruang tahanan melalui anggaran hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti Narkotika dan terbukti positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah, dan/atau rambut, ditempatkan di Lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
- b. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

Selama Tahun 2024 BNNP Jawa Timur dan BNN Kab./Kota Jajaran melaksanakan Asesmen Terpadu terhadap 1991 Orang, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATKER	TARGET (ORANG)	CAPAIAN (ORANG)	REKOMENDASI					
				REHAB LEMBAGA REHAB		PROSES HUKUM LANJUT			
				RAWAT INAP	RAWAT JALAN	REHAB LEMBAGA REHAB		REHAB DI LAPAS/RUTAN	TIDAK REHAB
RAWAT INAP	RAWAT JALAN								
1.	BNNP JAWA TIMUR	726	972	837	95	0	0	36	4
2.	BNN KOTA SURABAYA	5	348	305	35	0	0	8	0
3.	BNN KAB. SUMENEP	13	20	3	6	0	0	11	0
4.	BNN KOTA MOJOKERTO	20	85	57	23	0	0	5	0
5.	BNN KOTA MALANG	12	12	3	8	0	0	1	0
6.	BNN KOTA BATU	36	36	6	26	4	0	0	0
7.	BNN KAB. PASURUAN	62	72	39	32	0	0	1	0
8.	BNN KAB. TULUNGAGUNG	10	26	18	0	3	0	3	2
9.	BNN KAB. NGANJUK	46	50	0	48	1	0	1	0
10.	BNN KOTA KEDIRI	30	29	0	22	7	0	0	0
11.	BNN KAB. MALANG	17	30	2	21	0	0	7	0
12.	BNN KAB. GRESIK	38	50	27	14	2	0	1	6
13.	BNN KAB. SIDOARJO	83	80	4	76	0	0	0	0
14.	BNN KAB. TRENGGALEK	16	27	1	22	1	0	3	0
15.	BNN KAB. LUMAJANG	10	25	6	17	0	0	2	0
16.	BNN KAB. BLITAR	40	40	6	12	2	0	20	0
17.	BNN KAB. KEDIRI	25	56	16	33	0	0	7	0
18.	BNN KAB. TUBAN	22	33	2	12	6	0	11	1
JUMLAH		1211	1991	1332	502	26	0	117	13

Faktor Keberhasilan:

1. Komitmen dan kerjasama yang baik oleh personil dalam melaksanakan asesmen terpadu
2. Koordinasi yang baik antar instansi baik Polri, Kejaksaan, Bapas dan Tim Medis dalam pelaksanaan asesmen terpadu
3. Sudah adanya pencatatan data asesmen terpadu secara *online* melalui google drive

Permasalahan:

1. Kurangnya anggaran terkait pelaksanaan asesmen terpadu.
2. Kurangnya sarana dan prasarana laptop dan printer untuk mempermudah pelaksanaan asesmen terpadu

Rekomendasi / Tindak Lanjut:

Permohonan penambahan anggaran untuk kegiatan asesmen terpadu, pengadaan laptop dan printer melalui anggaran hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur

11. Sasaran : Meningkatnya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Timur	88	99.82	113.4 %

DEFINISI OPERASIONAL

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

METODE PENGUKURAN

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan (Monev Kemenkeu)

Manajemen kinerja efektif dan efisien merupakan upaya untuk mendukung Good Governance, manajemen kinerja yang baik merupakan instrument untuk mendapatkan hasil-hasil

yang lebih baik dari organisasi dengan didukung pengelolaan kinerja sesuai tujuan, sasaran dan standar yang ditetapkan mulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Sasaran kinerja terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien ini dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi serta capaian manfaat.

INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024
Nilai Kinerja Anggaran BNNP Jawa Timur	87.42	87.37	99.82

The screenshot shows the 'Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja' page in the MONEV application. The page header includes 'MONEV', 'BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)', 'Role', 'Pilih TA (2024)', and 'Logout'. The main content area displays a table with the following data:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	682480	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	100,00	99,64	99,82

The page also features a 'Download Excel' button, a search bar, and pagination controls showing 'Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri' and 'Sebelumnya 1 Selanjutnya'.

FAKTOR KEBERHASILAN

Pada Tahun 2024 ini nilai capaian NKA dapat mencapai target dikarenakan oleh:

1. Meningkatnya kepatuhan bidang dan bagian terkait Rencana Penarikan Dana sesuai dengan yang telah disusun di awal;
2. Pengelola keuangan bekerja secara efektif dan efisien dan tetap mengedepankan akuntabilitas kinerja;
3. Bidang dan bagian komitmen terhadap pencapaian Capaian RO (capaian output), dimana RO tercapai semua, bahkan ada yang over prestasi.

REKOMENDASI/ TINDAK LANJUT:

Dari hasil analisa, nilai NKA tidak sempurna (indeks 100) dikarenakan realisasi anggaran Satker BNNP Jawa Timur hanya 96.83 %, dimana paling banyak adalah belanja pegawai 51. Untuk tahun selanjutnya, satker akan berusaha mempertahankan performa yang sudah baik dan meningkatkan nilai penyerapan anggaran yang belum sempurna pada TA 2024.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
2..	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target (Target NKA sesuai PK satker)	17	17	100%

Rekapitulasi Indeks Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) TA. 2024

682480	BNN Provinsi Jawa Timur	Target	Realisasi
419247	BNN Kabupaten Sumenep	89	98.18
419248	BNN Kota Mojokerto	89	100
682825	BNN Kota Malang	86	98.7
682832	BNN Kota Batu	86	99.29
682846	BNN Kabupaten Tulungagung	87	100
682850	BNN Kabupaten Nganjuk	89	100
689554	BNN Kabupaten Sidoarjo	85	99.42
689601	BNN Kota Surabaya	88	100
689618	BNN Kota Kediri	91	100
689622	BNN Kabupaten Malang	87	100
689639	BNN Kabupaten Gresik	88	99.52
689643	BNN Kabupaten Trenggalek	89	100
689650	BNN Kabupaten Lumajang	88	99.11
689664	BNN Kabupaten Blitar	87	99.7
689671	BNN Kabupaten Kediri	91	100
403715	BNN Kabupaten Pasuruan	87	98.79
52858	BNN Kabupaten Tuban	86	99.25

INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024
Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan NKA mencapai target	9	7	17

FAKTOR KEBERHASILAN

Pada TA 2024 terlihat peningkatan yang signifikan pada capaian indikator kinerja Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan NKA mencapai target. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan adalah:

1. Adanya evaluasi per TW untuk membahas strategi agar pencapaian NKA dapat tercapai
2. Adanya kepatuhan dan kerjasama yang baik antara seksi, subbag dan pengelola keuangan yang ada di BNN Kab/Kota
3. Adanya komitmen pimpinan sebagai KPA untuk ikut memonev timeline dan RPD kegiatan

REKOMENDASI/ TINDAK LANJUT:

1. Untuk mempertahankan capaian yang sudah baik di 2024, BNNP selaku Pembina fungsi akan membuat sistem pelaporan untuk BNN Kab/Kota dapat melaporkan capaiannya perbulan agar dapat dimonitoring oleh BNNP
2. Kiranya dapat diadakan bimtek terkait cara perhitungan NKA supaya pegawai lebih dalam memahami dan mampu untuk membuat strategi pencapaian targe

- 12. Sasaran :** Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN Provinsi Jawa Timur	97.83	99.64	101,8 %

DEFINISI OPERASIONAL

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

METODE PENGUKURAN

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/20222, Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Indikator	2022	2024 (Reformulasi)
1	Revisi DIPA	Pengendalian revisi pagu tetap secara triwulanan	Pengendalian revisi pagu tetap secara semesteran
2	Deviasi Hal III DIPA	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan rata-rata aritmatik	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja
3	Penyerapan Anggaran	Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan yang dihitung berdasarkan trajektori penyerapan anggaran per jenis belanja.	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan trajektoridan penyerapan anggaran per jenis belanja. • Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang nilai kinerja per jenis belanja dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja.
4	Belanja Kontraktual	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) kontrak dini (pra DIPA efektif), (3) akselerasi kontrak 53.	Berdasarkan (1) kontrak dini (pra DIPA efektif), (2) akselerasi kontrak 53, dan (3) distribusi kontrak sampai triwulan II.
5	Penyelesaian Tagihan	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual	tetap
6	Pengelolaan UP dan TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUPserta terdapat rewarduntuk penggunaan UP KKP yang mencapai target.
7	Dispensasi SPM	Dihitung sebagai bagian dari komponen dalam perhitungan IKPA	Dihitung di luar komponen nilai IKPA, yaitu sebagai pengurang nilai IKPA
8	Capaian Tagihan	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) capaian RO	tetap



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	031	066	682480	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	98.21	100.00	100.00	100.00	100.00	99.64	100%	0.00	99.64
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.64	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.55				100.00				

INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNNP Jawa Timur	97.46	97.73	99.64

FAKTOR KEBERHASILAN

- Bidang dan Bagian sudah memahami pentingnya komitmen dan konsistensi terhadap penyerapan dan pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sehingga indeks IKPA yang tercapai pada 2024 terjadi peningkatan.
- Adanya evaluasi per minggu nya berupa Nota Dinas Kepala sebagai KPA

REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

Dari hasil evaluasi Nilai IKPA TA. 2024, terlihat bahwa yang belum mencapai nilai 100 adalah penyerapan anggaran, ini dikarenakan adanya kelebihan alokasi sebaran anggaran yang diturunkan BNN RI untuk belanja pegawai (akun 51). Strategi selanjutnya adalah memaksimalkan penyerapan anggaran agar berjalan sesuai dengan perencanaan pada awal tahun anggaran.

KOMPOSISI KAS BENDAHARA PENGELUARAN 12 AGUSTUS 2024

JENIS TRANSAKSI	UP	HIBAH
UP RM	Rp 120.000.000	
UP PNBP	Rp 2.000.000	
TUP RM		
HIBAH		Rp 750.000.000
Kas Bank	Rp 2.316.919	Rp 405.003.100
Kas Tunai	Rp 2.664.506	Rp -
Uang Muka	Rp 102.944.040	Rp 53.879.000
Uang Muka terdiri dari		
a. Bagian Umum	Rp 88.811.540	Rp 53.879.000
b. Bidang P2M	Rp -	Rp -
c. Bidang Rehabilitasi	Rp -	
d. Bidang Pemberantasan	Rp 14.132.500	
Saldo BP UP/TUP/Hibah (kas bank + kas tunai + uang muka),	Rp 107.925.465	Rp 458.882.100
Kuitansi yg akan di SP2D	Rp 14.074.535	
Kuitansi RM yang akan di SP2D	Rp 14.074.535	
Kuitansi PNBP yang akan di SP2D	Rp -	
Kuitansi HIBAH yang sudah di SP2HL		Rp 122.617.900
Kuitansi HIBAH yang akan di SP2HL		Rp 168.500.000

DATA RPD DAN REALISASI ANGGARAN

BULAN	JENIS BELANJA	RENCANA PENARIKAN DANA (RPD)	REALISASI S.D. 12 AGUSTUS 2024	REALISASI YG HARUS DIKEJAR
AGUSTUS	BELANJA PEGAWAI (51)	Rp 1.171.148.062	Rp 1.128.254.048	Rp 42.894.014
	BELANJA BARANG (52)	Rp 597.667.404	Rp 345.967.516	Rp 251.699.888
	BELANJA BARANG (53)	Rp 70.309.995	Rp -	Rp 70.309.995

Indikator Deviasi Hal III DIPA bulan Agustus : 100



Contoh Nota Dinas dari Kepala BNNP Jawa Timur kepada Pembina Fungsi di BNNP terkait movev pelaksanaan anggaran beserta pertanggungjawabannya.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
2.	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	17	16	94.11 %

INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024
Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	16	17	16

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BNN KAB/KOTA TA 2024

682480	BNN Provinsi Jawa Timur	TARGET	CAPAIAN
419247	BNN Kabupaten Sumenep	96.91	96.36
419248	BNN Kota Mojokerto	98.31	100
682825	BNN Kota Malang	96.31	97.39
682832	BNN Kota Batu	96.59	98.57
682846	BNN Kabupaten Tulungagung	98.2	100
682850	BNN Kabupaten Nganjuk	100	100
689554	BNN Kabupaten Sidoarjo	97.55	98.83
689601	BNN Kota Surabaya	98.79	100
689618	BNN Kota Kediri	98.73	100
689622	BNN Kabupaten Malang	99.76	100
689639	BNN Kabupaten Gresik	97.57	99.04
689643	BNN Kabupaten Trenggalek	99.93	100
689650	BNN Kabupaten Lumajang	96.82	98.21
689664	BNN Kabupaten Blitar	97.87	99.4
689671	BNN Kabupaten Kediri	100	100
403715	BNN Kabupaten Pasuruan	96.54	97.57
52858	BNN Kabupaten Tuban	97.71	98.49

KENDALA/ HAMBATAN

Pada 2024 ini target BNNP tidak tercapai karena adanya satker yaitu BNNK Sumenep yang indeksinya tidak mencapai target. Adapun yang menjadi kendala adalah nilai kualitas perencanaan anggaran yang tidak maksimal yaitu 92.52 dan kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 98.25.

REKOMENDASI/ TINDAK LANJUT

BNNP Jawa Timur beserta BNN Kab/Kota yang ada di jajaran berkomitmen agar pada tahun berikutnya dapat mencapai target pada PK terkait nilai indeks IKPA, khusus untuk BNNK Sumenep akan dimonitoring secara khusus agar nilai pada aspek halaman III DIPA pada 2025 dapat meningkat.

12.

Sasaran : Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
.	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	88	88.19	100,2 %

No.	Indikator Kinerja	2023	2024
.	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	86.63	88.19

DEFINISI OPERASIONAL

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator dari komponen ini antara lain adanya kebijakan standar pelayanan, implementasi budaya pelayanan prima serta melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan melakukan tindak lanjut atas hasil survei tersebut. Terdapat 6 komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan. Nilai Zona Integritas adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur enam komponen tersebut yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas yang dinilai secara internal oleh Inspektorat.

METODE PENGUKURAN

Nilai Zona Integritas adalah hasil penilaian Inspektorat terhadap Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) dan data dukung yang diisi dan dikumpulkan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas BNN Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kepala BNN RI Nomor: B/658/XII/IR/IR.04.05/2024/INS perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Nilai Zona Integritas Berdasarkan Penilaian Internal pada BNNP Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI ZONA INTEGRITAS BERDASARKAN
PENILAIAN INTERNAL PADA BNNP TAHUN 2024**

No.	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI		
		Pengungkit	Hasil	Jumlah
1	BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta	55.51	36.43	91.94
2	BNNP Jawa Timur	53.21	34.98	88.19
3	BNNP Nusa Tenggara Barat	51.47	36.59	88.06
4	BNNP Sumatera Selatan	51.24	36.26	87.50
5	BNNP Sulawesi Selatan	49.82	36.90	86.72
6	BNNP Jawa Tengah	51.31	34.97	86.28
7	BNNP Bali	49.75	36.52	86.27
8	BNNP Kalimantan Selatan	50.66	34.86	85.52
9	BNNP Kalimantan Tengah	49.97	35.03	85.00
10	BNNP Lampung	50.42	34.53	84.95
11	BNNP Sumatera Barat	51.49	31.83	83.32
12	BNNP Banten	47.17	35.92	83.09
13	BNNP Jawa Barat	48.79	34.24	83.03
14	BNNP Sulawesi Barat	46.53	34.53	81.06
15	BNNP Kepulauan Riau	43.82	36.63	80.45
16	BNNP Sumatera Utara	45.59	34.44	80.03
17	BNNP Papua Barat	45.32	34.48	79.80
18	BNNP Kalimantan Timur	43.10	36.34	79.44
19	BNNP Riau	41.80	34.04	75.84
20	BNNP Maluku	43.62	32.05	75.67
21	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	39.30	35.99	75.29
22	BNNP Kalimantan Barat	40.72	34.33	75.05
23	BNNP Sulawesi Tenggara	41.54	33.50	75.04
24	BNNP DKI Jakarta	41.77	33.26	75.03
25	BNNP Aceh	41.74	33.28	75.02
26	BNNP Sulawesi Utara	31.94	36.87	68.81

FAKTOR KEBERHASILAN

1. Adanya komitmen dari pimpinan untuk mendorong pelaksanaan ZI pada lingkungan satker sangat berpengaruh kepada keberhasilan satker mencapai target nilai.
2. Tingkat pemahaman anggota POKJA terkait pemenuhan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penilaian kinerja satker

REKOMENDASI/ TINDAK LANJUT

Ketua ZI beserta anggota POKJA akan mereview kembali dokumen pendukung yang belum lengkap/ tidak tersedia agar pada tahun selanjutnya penilaian yang didapat akan meningkat atau lebih baik

B. Akuntabilitas Keuangan

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan;
Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 682480 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	23,284,276,000	0	20,129,344,732	2,466,139,282	22,595,484,014	97.04 %	688,791,986
BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	2.816.363,000	0	2.332.119,192	474.176,290	2.806.295,482	99.64 %	10.067,518
BL.3247 Penyelenggaraan Advokasi	120.700,000	0	87.755,598	32.846,578	120.602,176	99.92 %	97,824
BL.3248 Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	151.210,000	0	142.219,398	8.878,900	151.098,298	99.93 %	111,702
BL.3251 Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	208.852,000	0	169.042,457	39.728,496	208.770,953	99.96 %	81,047
BL.3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	22.615,000	0	12.545,000	9,960,000	22.505,000	99.51 %	110,000
BL.3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	267.842,000	0	209.284,788	58.482,700	267.767,488	99.97 %	74,512
BL.3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	646.943,000	0	537.766,762	103.066,800	640.833,562	99.06 %	6.109,438
BL.3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	24.190,000	0	24.190,000	0	24.190,000	100.00 %	0
BL.3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	335.605,000	0	239.073,350	93.690,182	332.763,532	99.15 %	2.841,468
BL.3354 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	759.180,000	0	648.207,854	110.718,634	758.926,488	99.97 %	253,512
BL.3936 Pengelolaan Informasi dan Edukasi	279.226,000	0	262.033,985	16.804,000	278.837,985	99.86 %	388,015
WA Program Dukungan Manajemen	20.467.913,000	0	17.797.225,540	1.991.962,992	19.789.188,532	96.68 %	678.724,468
WA.3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	16.684.617,000	0	14.607.860,188	1.405.201,842	16.013.062,030	95.98 %	671.554,970
WA.3237 Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	149.770,000	0	138.305,974	10.517,026	148.823,000	99.37 %	947,000
WA.3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	38.061,000	0	31.941,503	6.054,000	37.995,503	99.83 %	65,497
WA.3239 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	3.527.155,000	0	2.978.647,875	543.510,124	3.522.157,999	99.86 %	4.997,001
WA.3979 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolalan	68.310,000	0	40.470,000	26.680,000	67.150,000	98.30 %	1.160,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Realisasi Anggaran BNNP Jawa Timur T.A. 2024

Pada awal tahun anggaran 2024 BNN terkena dampak Automatic adjustment, dimana pada akhir tahun 2023 berdasarkan Surat Edaran Kepala BNN Nomor : SE/5/I/SU/PR.02.01/2024/BNN tanggal 11 Januari 2024, DIPA T.A. 2024 BNNP Jawa Timur terkena Automatic Adjustment. Dimana DIPA Awal BNNP Jawa Timur T.A. 2024 dengan pagu **Rp. 22.159.980.000**, yang kemudian terkena Automatic Adjustment sebesar **Rp. 361.075.000**.

Pada tanggal 14 Agustus 2024 BNN RI mengeluarkan Surat dengan Nomor: B/2396/VIII/SU/PR.02.01/2024/BNN perihal Revisi Anggaran yang bersumber dari Relaksasi Automatic Adjustment Belanja Satuan Kerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional TA 2024, dimana BNNP Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran bersumber dari relaksasi anggaran AA.

NO	KODE	SATKER	SEMULA			MENJADI		
			BLOKIR	NON BLOKIR	TOTAL PAGU	BLOKIR	RELAKSASI ANGGARAN AUTOMATIC ADJUSTMENT 3258.BAA.002 Layanan TAT	TOTAL PAGU AKHIR
94	32057	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	112.620.000	1.494.940.000	1.607.560.000	0	15.000.000	1.509.940.000
95	419228	BNN KOTA TEGAL	118.256.000	1.573.280.000	1.691.536.000	0	0	1.573.280.000
96	419246	BNN KABUPATEN BANYUMAS	123.339.000	1.643.941.000	1.767.280.000	0	15.000.000	1.658.941.000
97	682804	BNN KABUPATEN CILACAP	127.876.000	1.707.014.000	1.834.890.000	0	0	1.707.014.000
98	682811	BNN KABUPATEN KENDAL	127.073.000	1.752.461.000	1.879.534.000	0	0	1.752.461.000
99	689582	BNN KABUPATEN BATANG	126.846.000	1.692.699.000	1.819.545.000	0	0	1.692.699.000
100	689596	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	122.948.000	1.638.508.000	1.761.456.000	0	15.000.000	1.653.508.000
101	31963	BNN KABUPATEN MAGELANG	118.124.000	1.571.455.000	1.689.579.000	0	0	1.571.455.000
102	35665	BNN KOTA SURAKARTA	121.932.000	1.624.380.000	1.746.312.000	0	25.000.000	1.649.380.000
103	682494	BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	276.277.000	13.506.659.000	13.782.936.000	0	0	13.506.659.000
104	40256	BNN KABUPATEN SLEMAN	120.166.000	1.639.830.000	1.759.996.000	0	8.600.000	1.648.430.000
105	45165	BNN KOTA YOGYAKARTA	109.978.000	1.458.211.000	1.568.189.000	0	0	1.458.211.000
106	40173	BNN KABUPATEN BANTUL	112.559.000	1.494.080.000	1.606.639.000	0	0	1.494.080.000
107	682480	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	361.075.000	22.834.405.000	23.195.480.000	0	322.273.000	23.156.678.000
108	419247	BNN KABUPATEN SUMENEP	113.716.000	1.818.676.000	1.932.392.000	0	14.000.000	1.832.676.000
109	419248	BNN KOTA MOJOKERTO	118.850.000	1.630.731.000	1.749.581.000	0	14.340.000	1.645.071.000

Selama tahun berjalan, BNNP Jawa Timur berdasarkan NPHD Nomor: 200.1/5647/209.2/2024 tanggal 5 April 2024 mendapatkan alokasi anggaran hibah sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur. Anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan operasional P4GN pada lingkungan BNNP Jawa Timur.

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK UANG**

Nomor : 200.1/ 5647 /209.2/2024
Nomor : B/ 596 /IV/KA/PR.02.03/2024/BNNP

Pada hari ini Jum'at Tanggal Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.
N I P : 19750319 199511 1 002
Jabatan : Kepala
Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Putat Indah No. 1 Surabaya

Yang bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR** yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : Drs. Mohamad Aris Purnomo
No. KTP : 3174081907660001
Alamat Rumah : Komplek POLRI Blok O/34
Jabatan dalam : Kepala BNN Provinsi Jawa Timur
Lembaga/Organisasi :
Alamat Lembaga : Raya Sukomanunggal 55 – 56 Surabaya

Yang bertindak untuk dan atas nama BNN Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU sepakat untuk memberikan Hibah Daerah berupa Uang kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1....

Selain itu juga mendapatkan hibah yang diperuntukan bagi calon BNN Kab Banyuwangi berdasarkan NPHD Nomor: 900/1244/429.206/2024 tanggal 20 November 2024 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
BELANJA HIBAH OPERASIONAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024
KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR

Alamat: Jl. Raya Sukomanunggal NO. 55-56 RT.04/RW.01 Kec. Sukomanunggal Surabaya
TAHUN 2024

Nomor : 900/1244/429.206/2024
Nomor : B/2585/XI/KA/PR.02.03/2024/BNNP

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** di Banyuwangi, yang bertanda tangan dibawah ini :

Drs. R. AGUS MULYONO. M.SI	:	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai pemberi hibah yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .
AWANG JOKO RUMITRO., S.I.K, M.Si	:	Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak atas nama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya di sebut **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan perjanjian hibah, yang selanjutnya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Banyuwangi dengan ketentuan sebagai berikut :

PARA PIHAK saling menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat menjalin kerjasama dalam kegiatan belanja hibah kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Banyuwangi tahun 2024;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur beralamat Jl. Raya Sukomanunggal No. 55-56 RT.04/RW.01 Kec. Sukomanunggal Surabaya;

Sehingga bila ditotal anggaran BNNP Jawa Timur secara keseluruhan adalah senilai Rp. 23.284.276.000 (Dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Pada November 2024, adanya kebijakan penghematan 50% sehingga terdapat anggaran blokir BNNP Jawa Timur pada akun 524xxx sebesar Rp. 37.600.000 (Tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) .Pada akhir tahun anggaran BNNP Jawa Timur mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp. 22.582.165,045 (96.83%).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
JAWA TIMUR

GEDUNG KEUANGAN NEGARA I, JALAN INDRAPURA NO. 5, SURABAYA 60175; TELEPON (031) 3523765, 3525229;
 FAKSIMILE (031) 3558640, 3566201; SUREL kanwil.djpb.jatim@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim

Nomor : S-6635/WPB.16/2024 11 November 2024
 Sifat : Sangat Segera
 Lampiran : 2 (Dua) Berkas
 Hal : Penyampaian Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satker K/L Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 dan menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-314/PB/2024 tanggal 7 November 2024 hal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan penghematan sebesar minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.
2. Selanjutnya, sesuai surat dimaksud disampaikan juga beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.
 - b. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
 - c. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga, maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Kuasa Pengguna Anggaran agar dapat segera

Surat Kementerian Keuangan perihal Penyampaian Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian Lembaga TA. 2024 tanggal 11 November 2024

Rekapitulasi Realisasi Anggaran BNNP Jawa Timur dan jajaran BNN Kab/Kota TA. 2024

NO.	SATUAN KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
1	BNN KAB NGANJUK	Rp 1,770,810,000	Rp 1,770,229,644	Rp 580,356	99.97%
2	BNN KOTA BATU	Rp 1,818,494,000	Rp 1,814,427,307	Rp 4,066,693	99.78%
3	BNN KAB TRENGGALEK	Rp 1,940,426,000	Rp 1,934,987,913	Rp 5,438,087	99.72%
4	BNN KAB GRESIK	Rp 1,971,131,000	Rp 1,964,725,764	Rp 6,405,236	99.68%
5	BNN KOTA MOJOKERTO	Rp 1,784,967,000	Rp 1,778,951,943	Rp 6,015,057	99.66%
6	BNN KAB BLITAR	Rp 1,979,707,000	Rp 1,971,849,947	Rp 7,857,053	99.60%
7	BNN KAB SIDOARJO	Rp 2,407,423,000	Rp 2,397,419,065	Rp 10,003,935	99.58%

8	BNN KAB KEDIRI	Rp 1,652,494,000	Rp 1,645,052,169	Rp 7,441,831	99.55%
9	BNN KAB TULUNGAGUNG	Rp 1,896,376,000	Rp 1,887,609,254	Rp 8,766,746	99.54%
10	BNN KOTA SURABAYA	Rp 2,068,354,000	Rp 2,058,348,111	Rp 10,005,889	99.52%
11	BNN KAB MALANG	Rp 2,173,455,000	Rp 2,157,008,437	Rp 16,446,563	99.24%
12	BNN KAB PASURUAN	Rp 1,794,432,000	Rp 1,770,815,821	Rp 23,616,179	98.68%
13	BNN KOTA KEDIRI	Rp 1,829,851,000	Rp 1,799,564,588	Rp 30,286,412	98.34%
14	BNN KAB LUMAJANG	Rp 1,663,421,000	Rp 1,634,975,246	Rp 28,445,754	98.29%
15	BNN KAB SUMENEP	Rp 1,890,676,000	Rp 1,842,899,911	Rp 47,776,089	97.47%
16	BNNP JAWA TIMUR	Rp 23,321,876,000	Rp 22,582,165,045	Rp 739,710,955	96.83%
17	BNN KAB TUBAN	Rp 1,982,970,000	Rp 1,905,702,385	Rp 77,267,615	96.10%
18	BNN KOTA MALANG	Rp 2,251,931,000	Rp 2,156,144,253	Rp 95,786,747	95.75%
	TOTAL	Rp 56,198,794,000	Rp 55,072,876,803	Rp 1,125,917,197	98.74%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNP Jawa Timur sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNP Jawa Timur telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada T.A. 2024 anggaran yang diterima oleh BNNP Jawa Timur dan BNNK jajaran senilai **Rp56.198.794.000,- (lima puluh enam miliar seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)** terealisasi sebesar **Rp55.072.876.803,- (lima puluh lima miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga rupiah)** dengan sisa senilai **Rp 1.125.917,197,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tujuh belas ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah)** dengan realisasi rata-rata sebesar **98.74%**.

Secara umum Kinerja BNNP Jawa Timur sudah baik pada Tahun 2024 ini, walaupun ada 4 indikator kinerja yang belum tercapai. Hal ini akan ditingkatkan untuk kinerja tahun selanjutnya agar target kinerja dapat tercapai seluruhnya.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan personil yang permanen untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.
2. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik internal maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
3. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.

4. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba
5. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.
6. Optimalisasi IT dan mengupgrade peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi.
7. Untuk meningkatkan nilai Zona Integritas pada satker BNNP, kiranya dapat dipertimbangkan untuk anggaran operasional pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.



Lampiran



Agenda Rapat : Penyusunan LKIP TA 2024
Hari, Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025
Waktu : Pukul 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Kantor BNNP Jawa Timur
Pemimpin Rapat : Kepala BNNP Jawa Timur
Peserta : Kabag Umum, Kabid Pemberantasan dan Intelijen, Katim Rehabilitasi, Katim P2M, perwakilan staf yang membidangi
Jumlah Peserta : 16 (enam belas) orang
Kesimpulan Rapat :

1. Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNP Jawa Timur TA 2024 yang telah disusun dari laporan tiap bidang dan bagian (rekap data capaian kinerja BNN Kab/Kota jajaran) telah disusun dan disepakati bersama.
2. Untuk target kinerja BNNP yang belum tercapai pada TA 2024 adalah;
 - jumlah kab/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi yang sesuai target masing-masing satker
 - Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi yang sesuai target masing-masing satker
 - Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi
 - Jumlah BNN Kab/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target
3. Bidang/ Bagian yang target PK nya belum tercapai akan mengevaluasi kembali terkait kendala dan hambatan yang dialami bersama BNN Kab/Kota jajaran.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Raya Sukomanunggal No. 55 – 56, RT 4 / RW 1
Kel./ Kec. Sukomanunggal, Surabaya – 60188
Telepon : 031 – 99143279, sms center : 08113197272
e-mail : bnp_jatim@bnn.go.id, website : jatim.bnn.go.id

BNNP JATIM

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/1552/XII/KA/PR.03.02/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNP Jawa Timur TA. 2024, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

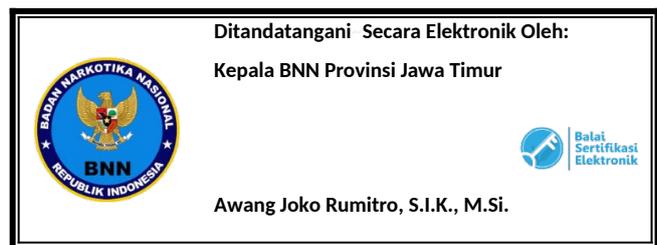
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
4. DIPA BNN Provinsi Jawa Timur TA.2023 Nomor: SP DIPA-066.01.2.682480/2024 tanggal 29 Oktober 2024 DS : 3281-0354-4678-7012.

MEMERINTAHKAN

Kepada : **NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI**

- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terkait penyusunan LKIP BNNP Jawa Timur TA. 2024;
2. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan sebaik-baiknya;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BNNP Jawa Timur;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Surabaya
pada tanggal : 10 Desember 2024



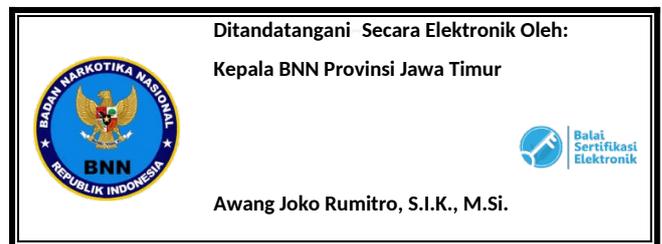
Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

DAFTAR NAMA PEGAWAI PELAKSANA PENYUSUNAN LKIP TA. 2024

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	5	6
1.	Awang Joko Runitro, S.I.K, M.Si	Kepala BNNP Jawa Timur	Penanggung Jawab
2.	Drs. Wuryanto Sugiri	Kepala Bagian Umum	Ketua
3.	Rut Lina Puspita P.S, S.Kep., NS	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Nur Syahbandiah, S.Farm., APT	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Koordinator Data Kepegawaian
5.	Achmad Nur Taufik	Staf	Anggota
6.	Rahajeng Dyah Utami, S.I.Kom.	Analisis Data dan Informasi	Koordinator Data Keuangan
7.	Nur Anissa Amalia Insani, SE	Analisis Aset Negara	Anggota
8.	Ika Rachmawati, S.K.M	Perencana Ahli Pertama	Koordinator Data Sarpras
9.	R. Idam Laksonoputro, S.E.	Staf	Anggota
10.	Damar Bastiar Amarapit, S.T	Kepala Seksi Intelijen	Koordinator Data Sie Intelijen
11.	Citra Rosiana Lutfi, S.I.Kom	Penyidik BNN Ahli Muda	Anggota
12.	Didik Gunawan, S.H	Plh Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Koordinator Data Sie Wastahti
13.	Andik Febriawan, AMK	Pengolah Data Intelijen	Anggota
16.	Titik Trisnowati, S.KM.	Konselor Adiksi Ahli Muda	Koordinator Data Rehabilitasi
17.	Choirul Hidayah Ulfa, AMK	Perawat Mahir	Anggota
18.	Stafrine Jeanife Adelaine Bernadus, S.Psi	Penyuluh Narkoba Ahli Muda	Koordinator Data Seksi Dayamas
19.	Alfiatu Ajizah, A.Md.	Arsiparis Terampil	Anggota
20.	Sri Artanti Maryani, S.Sos	Penyuluh Narkoba Ahli Muda	Koordinator Data Seksi Pencegahan
21.	Anne Putri Harini, S. I. Kom	Penyuluh Narkoba Ahli Muda	Anggota

Dikeluarkan di : Surabaya
pada tanggal : 10 Desember 2024



RENPROJA
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi (<i>nilai xxxx</i>)	-	5	6	7	8
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi (<i>nilai xxxx</i>)	-	10	10	11	11
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	-	17	18	19	20
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	-	3	4	5	6
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-	3,1	3,2	3,3	3,4
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	115	115	120	120

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	-	6	6	6	6
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	-	1	15	5	1
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	-	18	18	19	19
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	-	3,20	3,20	3,25	3,25
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	2	2	2	3	3
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	25	24	25	37	43
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100	100	100

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100	100	100
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	1	1	1	1	2
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP					
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	88	90	90	90	91
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	94	94	94	94	94
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	17	17	17	17	17

**Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020-2024**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2.401.696	2.793.509	2.966.326	3.701.316	4.179.523
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	790.754	956.249	1.474.133	1.727.437	2.024.237
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	3.232.895	3.815.224	4.422.874	4.784.910	5.190.297
4.		Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari	235.820	708.300	937.940	1.095.240	1.378.700

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	narkoba secara berkelanjutan	"Bahaya" menjadi "Waspada"					
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)					
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (3259)	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih		15.336	17.700	17.700	17.700
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis		168.045	205.694	205.694	205.694
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (3260)	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	1.627.166	2.132.615	2.422.363	2.605.674	2.777.616
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi					
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP					

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	300.000	300.000	150.000	300.000	300.000
			Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21					

RENCANA KERJA BNN PROVINSI JAWA TIMUR TA. 2024

Nama Organisasi : BNNP Jawa Timur
Tahun : 2024

Level Kinerja	Kode	Program/Kegiatan/Komponen/Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/Vol	Satuan	Anggaran
							12,430,380,000
Program	066.01.BL	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN)					
Kegiatan	3247	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	17	kab/kota	1,922,700,000
KRO	3247.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga[Base Line]			5	Keluarga	
RO	3247.QDE.002	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba					
Komponen	052	Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba					
Aktivitas	A	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba					
Aktivitas	C	Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba					
KRO	3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa[Base Line]			2	Desa	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	3247.UBB.001	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa					
Komponen	052	Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga AntiNarkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa					
Aktivitas	B	Koordinasi dalam Rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa					
Aktivitas	C	Rapat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa					
Aktivitas	D	Fasilitasi dan Asistensi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa					

Aktivitas	E	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa					
	053	Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa					
Kegiatan	3248	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1	kawasan	89,000,000
				Nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi	3.10	indeks	
KRO	3248.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat[Base Line]			1	kelompok masyarakat	
RO	3248.BDD.001	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika					
Komponen	053	Pengembangan Kapasitas Pada Kawasan Rawan Narkoba					
Aktivitas	A	Bimbingan Teknis Lifeskill bagi masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Wilayah Perkotaan/pedesaan					
Komponen	054	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat					
Aktivitas	A	Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif Pada Kawasan Rawan Perkotaan/Pedesaan					
Kegiatan	3251	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi			3	lapran	150,000,000
KRO	3251.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat[Base Line]					
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	3251.BKA.002	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Unit Vertikal)					
Komponen	051	Pengumpulan Informasi Intelijen					
Aktivitas	A	Pemetaan Informasi Jaringan Inteljen					
Kegiatan	3256	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68	persentase	227,340,000
			Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3.77	indeks	
KRO	3256.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]			36	orang	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	3256.BAA.001	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan					

Komponen	051	Pemantauan dan Pendampingan Pemulihan					
Aktivitas	A	Layanan Pascarehabilitasi					
Komponen	053	Koordinasi Program Rehabilitasi Berkelanjutan					
Aktivitas	A	Rapat Monitoring dan Evaluasi					
Kegiatan	3257	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	17	kab/kota	3,846,817,000
KRO	3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]			2	lembaga	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	3257.QDB.001	Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba					
Komponen	051	Pembinaan teknis					
Aktivitas	A	Rapat Kerja Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024					
Aktivitas	B	Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat					
Komponen	052	Pemetaan kelompok sasaran					
Aktivitas	A	Rapat Koordinasi Pemetaan Program Pemberdayaan Masyarakat					
Aktivitas	C	Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/ kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba					
Komponen	053	Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba					
Aktivitas	A	Bimbingan Teknis Penggiat P4GN					
Aktivitas	C	Workshop Tematik P4GN					
Aktivitas	D	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urine					
Aktivitas	E	Asistensi Kota / Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba					
Aktivitas	F	Sinkronisasi Program dan Kerja Kebijakan Kabupaten / Kota Tanggap Ancaman Narkoba					
Komponen	054	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba					
Aktivitas	A	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat					
	B	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat					
Kegiatan	3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	indeks	692,670,000

				Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	indeks	
KRO	3258.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]			40	orang	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	3258.BAA.002	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal)					
Komponen	051	Pelaksanaan Asesmen Terpadu (unit Vertikal)					
Aktivitas	A	TANPA SUB KOMPONEN					
KRO	3258.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]			2	produk	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	3258.BIA.002	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika (unit Vertikal)					
Komponen	051	Pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika (unit Vertikal)					
Aktivitas	A	Penerimaan Barang Bukti					
Aktivitas	B	Pengeluaran barang Bukti					
KRO	3258.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat[Base Line]			22	orang	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	3258.BIB.002	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU (Unit Vertikal)					
Komponen	051	Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU (Unit Vertikal)					
Aktivitas	A	Perawatan Kesehatan Tahanan					
Aktivitas	B	Pengawasan Tahanan					
Aktivitas	C	Administrasi Tahanan					
Kegiatan	3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	orang	281,475,000
KRO	3259.PDG	Standarisasi Profesi dan SDM[Base Line]			10	orang	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	3259.PDG.001	Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi					
Komponen	051	Bimbingan Teknis Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat					
Aktivitas	A	Bimbingan Teknis Petugas IBM					
Kegiatan	3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	2	lembaga	2,615,978,000

				Jumlah unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	36	unit	
KRO	3260.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]			500	orang	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	3260.BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota					
Komponen	051	Operasional Klinik BNNP dan BNNK/Kota					
Aktivitas	A	Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNP					
Komponen	052	Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan					
Aktivitas	A	Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan					
RO	3260.BAA.003	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)					
Komponen	051	Layanan SKHPN					
Aktivitas	A	Layanan SKHPN					
KRO	3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]			5	lembaga	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	3260.BDB.001	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional					
Komponen	052	Bimbingan Teknis dan Asistensi Lembaga Rehabilitasi					
Aktivitas	A	Bimbingan Teknis Lembaga Rehabilitasi					
Komponen	055	Monitoring fasilitas rehabilitasi					
Aktivitas	A	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi					
KRO	3260.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]			2	unit	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	3260.QDB.001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Operasional					
Komponen	051	Pembentukan IBM					
Aktivitas	A	Koordinasi Pembentukan IBM					
Aktivitas	B	Pembentukan Unit IBM					
Komponen	052	Asistensi dan Supervisi IBM					
Aktivitas	A	Asistensi					
Aktivitas	B	Evaluasi Unit IBM					
Komponen	053	Operasional IBM					
Aktivitas	A	Operasional Unit IBM					
Komponen	054	Layanan IBM					
Aktivitas	A	Penerimaan Awal					
Aktivitas	B	Layanan Wajib					
Aktivitas	C	Layanan Pilihan					
Aktivitas	D	Bina Lanjut/ Pemantauan					
Kegiatan	5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	22	berkas perkara	860,000,000

KRO	5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]			6	berkas	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	5354.BCA.002	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)					
Komponen	051	Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika					
Aktivitas	A	Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika					
Aktivitas	B	Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika					
Aktivitas	C	Koordinasi kegiatan penyelesaian kasus tindak pidana narkotikaa					
Aktivitas	D	Monitoring dan Evaluasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika					
Kegiatan	5355	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika					210,000,000
KRO	5355.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]			1	berkas	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	5355.BCA.002	Berkas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Ditangani BNNP					
Komponen	051	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika					
Aktivitas	A	Kegiatan Penyelidikan dan Pengembangan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika					
Aktivitas	B	Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika					
Aktivitas	C	Kegiatan Pra Tahap II dan Tahap II Kasus TPPU Hasil TPN dan Prekursor Narkotika (menunjukkan kepada JPU lokasi aset tidak bergerak yg disita dari tersangka dan penyerahan dan barang bukti)					
Aktivitas	D	Menghadirkan Saksi untuk Persidangan dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika					
Kegiatan	5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	17	kab/kota	1,534,400,000
KRO	5936.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]			2	lembaga	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	5936.QDB.001	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Soft Skill					

Komponen	051	Pelatihan Pengembangan Softskill di SMP dan SMU sederajat					
Aktivitas	A	Koordinasi Persiapan Pengembangan Softskill di SMP dan SMU Sederajat					
Aktivitas	B	Pelatihan Softskill di SMP dan SMU Sederajat					
Komponen	052	Penyebarluasan Informasi dan Edukasi					
Aktivitas	A	Informasi dan Edukasi melalui talkshow / Tatap Muka					
Aktivitas	C	Informasi dan Edukasi Melalui Insert Konten					
Aktivitas	E	Informasi dan Edukasi melalui Media Luar Ruang					
Aktivitas	F	Informasi dan Edukasi melalui Branding Sarana Publik					
Aktivitas	H	Informasi dan Edukasi Melalui Placement Radio lokal/daerah					
Aktivitas	I	Informasi dan Edukasi Melalui Media Online					
Komponen	053	Monitoring Wilayah					
Aktivitas	A	Monitoring Pelaksanaan Informasi dan Edukasi di BNNK					
	066.01.WA	Program Dukungan Manajemen					41,527,691,000
Kegiatan	3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisiensi	Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97.83	indeks	18,237,796,000
				Jumlah BNN kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA mencapai target	17	kabupaten/kota	
KRO	3236.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]			12	layanan	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	3236.EBA.994	Layanan Perkantoran					
Komponen	001	Gaji dan Tunjangan					
Aktivitas	A	TANPA SUB KOMPONEN					
Komponen	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
Aktivitas	A	ADMINISTRASI KEGIATAN					
Aktivitas	B	PENYAMPAIAN SPM KE KPPN					
Aktivitas	C	PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI TINGKAT UAPA-W					
Aktivitas	D	PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI TINGKAT UAKPA					
KRO	3236.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]			2	dok	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	3236.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan					
Komponen	056	Penyusunan Laporan Keuangan Unit Vertikal					
Aktivitas	A	Rekonsiliasi laporan keuangan unaudited					
Aktivitas	B	Rekonsiliasi dan penelaahan data keuangan semester 1					

Kegiatan	3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia					231,530,000
KRO	3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]			1	layanan	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	3237.EBC.954	Layanan Manajemen SDM					
Komponen	052	Administrasi Kepegawaian BNNP/BNNK					
Aktivitas	A	Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan Eselon III dan IV					
Komponen	053	Pembinaan Kepegawaian BNNP/BNNK					
Aktivitas	A	Pembinaan Rohani dan Mental Pegawai BNNP					
Aktivitas	B	Supervisi Pembinaan Layanan Manajemen Kepegawaian BNN Provinsi					
Komponen	057	Pemberhentian Pegawai					
Aktivitas	A	Pelaksanaan Sidang Disiplin/ Sidang Kode Etik Pegawai					
Komponen	060	Pelayanan Kesehatan pegawai BNNP/BNNK					
Aktivitas	A	Pembinaan Jasmani Pegawai BNNP					
Aktivitas	B	Pelayanan Kesehatan Pegawai					
Kegiatan	3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisiensi	Nilai Kinerja Anggaran	88	indeks	246,314,000
				Jumlah BNN kabuten/kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	8	kabupaten/kota	
			Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	88	indeks	
KRO	3238.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]			4	dok	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	3238.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran					
Komponen	064	Penganggaran Unit Vertikal					
Aktivitas	B	Koordinasi dan Sinkronisasi RKA Pagu Anggaran BNNP dan Wilayah					
Aktivitas	C	Koordinasi dan Sinkronisasi RKA Pagu Alokasi Anggaran BNNP dan Wilayah					
Aktivitas	D	Koordinasi dan Sinkronisasi RKA Pagu Alokasi Anggaran 2025					
RO	3238.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi					
Komponen	062	Pemantauan dan pelaporan kinerja unit vertikal					
Aktivitas	A	Supervisi Manajemen Kinerja BNN Provinsi					
Aktivitas	B	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Laporan Kinerja dan Anggaran Unit Kerja					
Aktivitas	C	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Laporan RAN P4GN Wilayah					

Kegiatan	3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana					22,622,051,000
KRO	3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]			13	layanan	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	3239.EBA.962	Layanan Umum					
Komponen	054	Pelaksanaan Urusan Umum Unit Vertikal					
Aktivitas	A	Rapat Kerja Teknis					
Aktivitas	B	Koordinasi Kelembagaan					
Aktivitas	C	Rapat Koordinasi Kelembagaan					
Aktivitas	D	Pelatihan Menembak					
Aktivitas	E	Operasional K9					
RO	3239.EBA.994	Layanan Perkantoran					
Komponen	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
Aktivitas	A	Pemeliharaan Gedung dan Penataan Ruang Kantor					
Aktivitas	B	Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Kantor					
Aktivitas	C	Perawatan Kendaraan Dinas					
Aktivitas	D	Langganan Daya dan Jasa Lainnya					
Aktivitas	E	Tenaga Kerja Kontrak					
Aktivitas	F	Sewa Tempat Tinggal Dinas Kepala BNNP					
Aktivitas	G	Honor Pengelola BMN					
Aktivitas	H	Honor Pejabat Pengadaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa					
Aktivitas	I	Pengelola Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPPB)wilayah					
Aktivitas	J	Pengelola Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)					
Aktivitas	K	Keperluan Sehari-hari perkantoran					
Aktivitas	L	Rekonsiliasi Laporan BMN Ke KPKNL					
Aktivitas	M	Rekonsiliasi Laporan BMN ke Kanwil					
Kegiatan	3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan					190,000,000
KRO	3979.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]			1	layanan	
		Lokasi : KOTA SURABAYA					
RO	3979.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi					
Komponen	054	Publikasi Informasi Kelembagaan Instansi Vertikal BNN					
Aktivitas	A	Press Release					
Aktivitas	B	Kegiatan Kehumasan					
Aktivitas	D	Pengadaan bahan informasi kelembagaan					
Aktivitas	E	Honor Pengelola Website					
Aktivitas	G	Peliputan Giat Kehumasan di Dalam Kota					
Aktivitas	H	Peliputan Giat Kehumasan di Luar Kota					



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

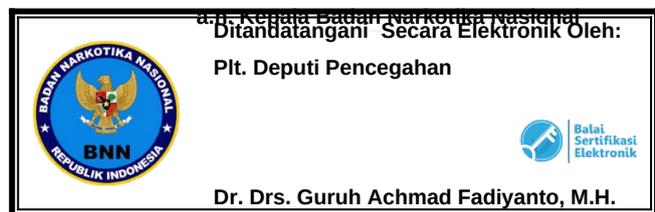
- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Deklara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
 - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
 - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
 - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Deklara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
29	BNNP SUMATERA BARAT	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
34	BNNP RIAU	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
39	BNNP JAMBI	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
43	BNNP LAMPUNG	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNNP KEPULAUAN RIAU	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	BNNP SUMATERA SELATAN	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	BNNP BENGKULU	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	BNNP DKI JAKARTA	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
75	BNNP BANTEN	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
79	BNNP JAWA BARAT	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
94	BNNP JAWA TENGAH	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
104	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
108	BNNP JAWA TIMUR	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	BNN KOTA KEDIRI	91,696	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
126	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
134	BNNP KALIMANTAN TENGAH	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
137	BNNP KALIMANTAN SELATAN	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
146	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAKAN	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI

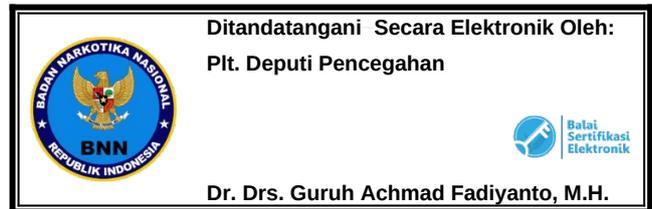
LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNNP SULAWESI TENGGARA	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	BNNP SULAWESI BARAT	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	BNNP MALUKU	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	BNNP MALUKU UTARA	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	BNNP BALI	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANYAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI

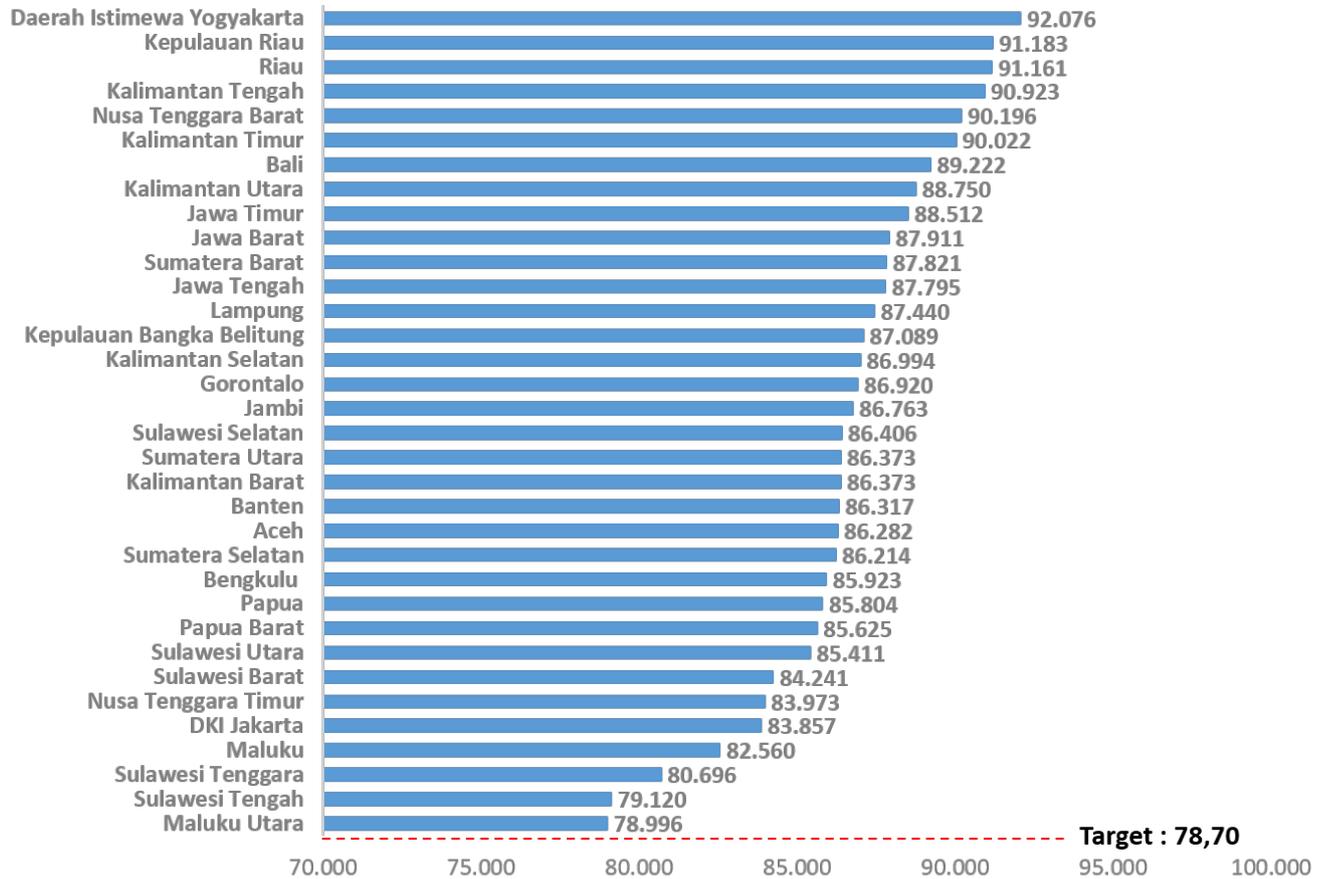
LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI

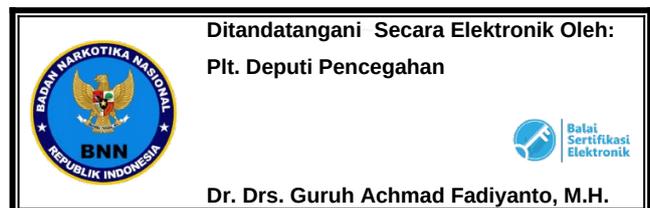
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

**Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota**

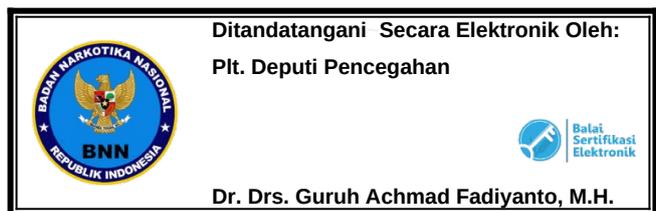
di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ;
- a. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
 - b. Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 104 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 26 Satker
 - c. Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	BNN PUSAT		
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	52.23	TINGGI
1	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	51.92	TINGGI
2	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.60	RENDAH
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	52.04	TINGGI
4	BNN KOTA SABANG	55.47	SANGAT TINGGI
5	BNN KOTA LHOKEUMAWE	50.47	TINGGI
6	BNN KOTA LANGSA	47.27	RENDAH
7	BNN KABUPATEN BIREUEN	48.96	RENDAH
8	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	38.79	SANGAT RENDAH
9	BNN KABUPATEN PIDIE	51.75	Tinggi
10	BNN KOTA BANDA ACEH	55.66	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI ACEH		50,38	TINGGI
2	BNNP SUMATERA UTARA	54.82	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN KARO	55.16	SANGAT TINGGI
12	BNN KOTA BINJAI	55.72	SANGAT TINGGI
13	BNN KOTA TANJUNG BALAI	51.91	TINGGI
14	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.42	TINGGI
15	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	42.08	SANGAT RENDAH
16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	45.42	SANGAT RENDAH
17	BNN KABUPATEN LANGKAT	49.89	TINGGI
18	BNN KABUPATEN ASAHAN	52.48	TINGGI
19	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	36.12	SANGAT RENDAH
20	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55.33	SANGAT TINGGI
21	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.11	TINGGI
22	BNN KOTA TEBING TINGGI	48.20	RENDAH
23	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	54.69	SANGAT TINGGI
24	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.12	TINGGI
25	BNN KABUPATEN BATU BARA	56.15	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
RATA-RATA SUMATERA UTARA		50.85	TINGGI
3	BNNP SUMATERA BARAT	55.80	SANGAT TINGGI
26	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.35	TINGGI
27	BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN SOLOK	53.36	TINGGI
29	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.33	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT		53.24	TINGGI
4	BNNP RIAU	53.28	TINGGI
30	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.26	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN PELALAWAN	54.26	SANGAT TINGGI
32	BNN KOTA PEKANBARU	50.28	TINGGI
33	BNN KOTA DUMAI	49.67	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI RIAU		52.55	TINGGI
5	BNNP JAMBI	38.53	SANGAT RENDAH
34	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.28	TINGGI
35	BNN KOTA JAMBI	53.65	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN BATANGHARI	43.60	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAMBI		47.26	RENDAH
6	BNNP SUMATERA SELATAN	54.23	SANGAT TINGGI
37	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	52.98	TINGGI
38	BNN KOTA PAGARALAM	55.93	SANGAT TINGGI
39	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	41.66	SANGAT RENDAH
40	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	49.38	RENDAH
41	BNN KOTA PRABUMULIH	54.73	SANGAT TINGGI
42	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	54.98	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	49.09	RENDAH
44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.41	RENDAH
45	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA SELATAN		51.83	TINGGI
7	BNNP LAMPUNG	52.30	TINGGI
46	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.60	SANGAT TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.50	SANGAT TINGGI
48	BNN KOTA METRO	39.97	SANGAT RENDAH
49	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.28	RENDAH
50	BNN KABUPATEN WAY KANAN	45.42	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI LAMPUNG		49.35	RENDAH
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	55.73	SANGAT TINGGI
51	BNN KABUPATEN BANGKA	53.15	TINGGI
52	BNN KOTA PANGKAL PINANG	55.65	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
53	BNN KABUPATEN BELITUNG	51.69	TINGGI
54	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	55.94	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		54.43	SANGAT TINGGI
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	54.39	SANGAT TINGGI
55	BNN KABUPATEN KARIMUN	55.84	SANGAT TINGGI
56	BNN KOTA BATAM	54.35	SANGAT TINGGI
57	BNN KOTA TANJUNG PINANG	55.84	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU		55.11	SANGAT TINGGI
10	BNNP BENGKULU	54.88	SANGAT TINGGI
58	BNN KOTA BENGKULU	52.16	TINGGI
59	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	49.61	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI BENGKULU		52.22	TINGGI
11	BNNP DKI JAKARTA	55.70	SANGAT TINGGI
60	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	55.64	SANGAT TINGGI
61	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	43.20	SANGAT RENDAH
62	BNN KOTA JAKARTA UTARA	43.71	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI DKI JAKARTA		49.56	RENDAH
12	BNNP BANTEN	43.44	SANGAT RENDAH
63	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	54.58	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA CILEGON	56.85	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA TANGERANG	55.80	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BANTEN		52.67	TINGGI
13	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.51	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN SLEMAN	52.04	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANTUL	49.75	TINGGI
68	BNN KOTA YOGYAKARTA	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI DI YOGYAKARTA		53.29	TINGGI
14	BNNP JAWA BARAT	47.36	RENDAH
69	BNN KABUPATEN BOGOR	55.52	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN CIANJUR	55.25	SANGAT TINGGI
71	BNN KOTA BANDUNG	56.40	SANGAT TINGGI
72	BNN KOTA CIREBON	55.91	SANGAT TINGGI
73	BNN KOTA CIMAHI	53.62	SANGAT TINGGI
74	BNN KABUPATEN SUKABUMI	55.72	SANGAT TINGGI
75	BNN KABUPATEN GARUT	55.72	SANGAT TINGGI
76	BNN KABUPATEN KUNINGAN	56.18	SANGAT TINGGI
77	BNN KABUPATEN CIAMIS	55.01	SANGAT TINGGI
78	BNN KOTA DEPOK	54.87	SANGAT TINGGI
79	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.59	RENDAH

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
80	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.01	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA TASIKMALAYA	51.02	TINGGI
82	BNN KABUPATEN SUMEDANG	52.10	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT		53.82	SANGAT TINGGI
15	BNNP JAWA TENGAH	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH		53.53	TINGGI
16	BNNP JAWA TIMUR	54.71	SANGAT TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMENEP	55.67	SANGAT TINGGI
93	BNN KOTA MOJOKERTO	53.49	TINGGI
94	BNN KOTA MALANG	54.85	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA BATU	55.87	SANGAT TINGGI
96	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	56.07	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN NGANJUK	54.38	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN SIDOARJO	55.21	SANGAT TINGGI
99	BNN KOTA SURABAYA	46.86	RENDAH
100	BNN KOTA KEDIRI	55.65	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MALANG	55.86	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN GRESIK	44.80	SANGAT RENDAH
103	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	54.17	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.83	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN BLITAR	55.11	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN KEDIRI	55.50	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN PASURUAN	55.87	SANGAT TINGGI
108	BNN KABUPATEN TUBAN	54.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA TIMUR		54.15	SANGAT TINGGI
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	55.59	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	52.02	TINGGI
110	BNN KABUPATEN SINTANG	39.87	SANGAT RENDAH
111	BNN KOTA PONTIANAK	55.79	SANGAT TINGGI
112	BNN KOTA SINGKAWANG	53.51	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
113	BNN KABUPATEN SANGGAU	45.00	SANGAT RENDAH
114	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	48.81	RENDAH
115	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	48.70	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		49.91	TINGGI
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	54.16	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA PALANGKARAYA	55.76	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.08	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		55.00	SANGAT TINGGI
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	55.75	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	52.58	TINGGI
119	BNN KOTA BANJARMASIN	53.40	TINGGI
120	BNN KOTA BANJARBARU	55.93	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BALANGAN	51.04	TINGGI
122	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	55.34	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	50.84	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TABALONG	51.31	TINGGI
125	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.62	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		53.42	TINGGI
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	55.89	SANGAT TINGGI
126	BNN KOTA BALIKPAPAN	54.67	SANGAT TINGGI
127	BNN KOTA SAMARINDA	52.45	TINGGI
128	BNN KOTA BONTANG	42.46	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		51.37	TINGGI
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	55.60	SANGAT TINGGI
129	BNN KOTA TARAKAN	58.30	SANGAT TINGGI
130	BNN KABUPATEN NUNUKAN	56.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA		56.92	SANGAT TINGGI
22	BNNP SULAWESI UTARA	51.16	TINGGI
131	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.16	RENDAH
132	BNN KOTA BITUNG	49.71	RENDAH
133	BNN KOTA MANADO	38.13	SANGAT RENDAH
134	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.27	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI UTARA		46.49	RENDAH
23	BNNP SULAWESI TENGAH	52.27	TINGGI
135	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	44.29	SANGAT RENDAH
136	BNN KABUPATEN MOROWALI	52.20	TINGGI
137	BNN KOTA PALU	41.55	SANGAT RENDAH
138	BNN KABUPATEN DONGGALA	52.05	TINGGI
139	BNN KABUPATEN POSO	51.89	TINGGI

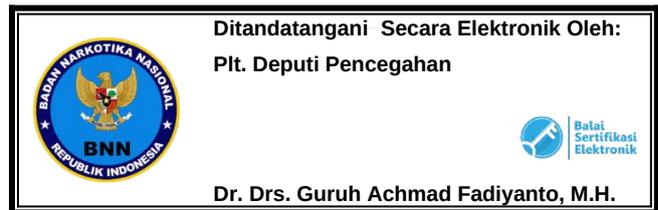
REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
140	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	43.40	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGAH		48.23	RENDAH
24	BNNP SULAWESI SELATAN	53.17	TINGGI
141	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.11	TINGGI
142	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	50.53	TINGGI
143	BNN KOTA PALOPO	54.52	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN		52.08	TINGGI
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	54.55	SANGAT TINGGI
144	BNN KABUPATEN MUNA	50.99	TINGGI
145	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.22	TINGGI
146	BNN KOTA KENDARI	54.96	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BAU-BAU	56.68	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		53.48	TINGGI
26	BNNP SULAWESI BARAT	54.67	SANGAT TINGGI
148	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	51.49	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI BARAT		53.08	TINGGI
27	BNNP MALUKU	46.69	RENDAH
149	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	41.04	SANGAT RENDAH
150	BNN KOTA TUAL	54.73	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU		47.49	RENDAH
28	BNNP MALUKU UTARA	54.68	SANGAT TINGGI
151	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	49.67	RENDAH
152	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.35	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	50.91	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU UTARA		52.66	TINGGI
29	BNNP BALI	55.80	SANGAT TINGGI
154	BNN KOTA DENPASAR	59.17	SANGAT TINGGI
155	BNN KABUPATEN BADUNG	50.41	TINGGI
156	BNN KABUPATEN GIANYAR	47.33	RENDAH
157	BNN KABUPATEN BULELENG	55.71	SANGAT TINGGI
158	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	44.95	SANGAT RENDAH
159	BNN KABUPATEN KARANGASEM	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BALI		52.75	TINGGI
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	55.73	SANGAT TINGGI
160	BNN KABUPATEN BIMA	54.01	SANGAT TINGGI
161	BNN KOTA MATARAM	55.83	SANGAT TINGGI
162	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	46.26	RENDAH
163	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.70	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		52.91	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		50.73	TINGGI
32	BNNP GORONTALO	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI GORONTALO		54.03	SANGAT TINGGI
33	BNNP PAPUA	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI PAPUA		47.51	RENDAH
34	BNNP PAPUA BARAT	54.58	SANGAT TINGGI
RATA-RATA NILAI TAHUN 2024		52.04	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipasi (IKP) Tahun 2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian

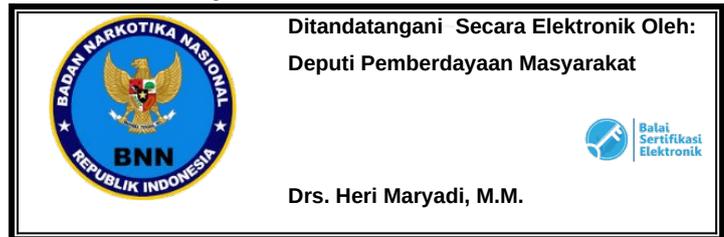
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
1	BNNP ACEH	3,32	0	3,29	0	3,31	Sangat Mandiri	A
2	BNNK SABANG	3,86	0	0	3,76	3,81	Sangat Mandiri	A
3	BNNK PIDIE JAYA	3,59	0	3,64	0	3,62	Sangat Mandiri	A
4	BNNK PIDIE	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
5	BNNK GAYO LUES	0	0	3,37	3,49	3,43	Sangat Mandiri	A
6	BNNK BIREUEN	3,27	0	0	3,37	3,32	Sangat Mandiri	A
7	BNNK BANDA ACEH	3,47	0	0	3,84	3,66	Sangat Mandiri	A
8	BNNK ACEH TAMIANG	3,72	0	0	3,67	3,70	Sangat Mandiri	A
9	BNNK ACEH SELATAN	3,33	0	3,28	0	3,31	Sangat Mandiri	A
10	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	3,84	0	3,68	0	3,76	Sangat Mandiri	A
11	BNN KOTA LANGSA	3,67	0	3,78	0	3,73	Sangat Mandiri	A
12	BNNP SUMATERA BARAT	0	0	3,69	3,76	3,73	Sangat Mandiri	A
13	BNNK SOLOK	0	0	3,77	3,8	3,79	Sangat Mandiri	A
14	BNNK SAWAHLUNTO	3,6	0	0	3,86	3,73	Sangat Mandiri	A
15	BNNK PAYAKUMBUH	0	0	3,83	3,86	3,85	Sangat Mandiri	A
16	BNNK PASAMAN BARAT	0	0	3,81	3,86	3,84	Sangat Mandiri	A
17	BNNP SUMUT	0	0	3,53	3,6	3,57	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18	BNNK TEBING TINGGI	0	0	3,383	3,451	3,42	Sangat Mandiri	A
19	BNNK TAPANULI SELATAN	3,79	3,67	0	0	3,73	Sangat Mandiri	A
20	BNNK TJ. BALAI	0	0	3,4	3,73	3,57	Sangat Mandiri	A
21	BNNK SIMALUNGUN	0	3,48	0	3,54	3,51	Sangat Mandiri	A
22	BNNK SERDANG BEDAGAI	0	0	3,45	3,17	3,31	Sangat Mandiri	A
23	BNNK PEMATANG SIANTAR	3,428	0	0	3,434	3,43	Sangat Mandiri	A
24	BNNK LANGKAT	0	0	3,47	3,55	3,51	Sangat Mandiri	A
25	BNNK MANDAILING NATAL	0	0	3,5	3,55	3,53	Sangat Mandiri	A
26	BNNK LABUHAN BATU UTARA	3,4368	0	0	3,6224	3,53	Sangat Mandiri	A
27	BNNK KARO	0	0	3,32	3,708	3,51	Sangat Mandiri	A
28	BNNK GUNUNGSITOLI	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
29	BNNK DELI SERDANG	3,76	0	0	3,7	3,73	Sangat Mandiri	A
30	BNNK BINJAI	0	0	3,68	3,53	3,61	Sangat Mandiri	A
31	BNNK BATUBARA	3,84	0	0	3,8	3,82	Sangat Mandiri	A
32	BNNK ASAHAN	0	0	3,41	3,43	3,42	Sangat Mandiri	A
33	BNNP SUMSEL	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
34	BNNK PRABUMULIH	3,92	0	0	3,88	3,90	Sangat Mandiri	A
35	BNNK PAGAR ALAM	0	0	3,54	3,53	3,54	Sangat Mandiri	A
36	BNNK OKU TIMUR	3,73	0	0	3,61	3,67	Sangat Mandiri	A
37	BNNK OGAN KOMERING ILIR	3,88	0	0	3,51	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
38	BNNK OGAN ILIR	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
39	BNNK MUARA ENIM	3,68	0	0	3,67	3,68	Sangat Mandiri	A
40	BNNK LUBUKLINGGAU	0	0	3,73	3,86	3,80	Sangat Mandiri	A
41	BNNK EMPAT LAWANG	3,75	0	0	3,53	3,64	Sangat Mandiri	A
42	BNN KAB MUSI RAWAS	0	0	3,48	3,36	3,42	Sangat Mandiri	A
43	BNNP LAMPUNG	3,32	0	0	3,56	3,44	Sangat Mandiri	A
44	BNNK WAY KANAN	3,56	0	0	3,54	3,55	Sangat Mandiri	A
45	BNNK TANGGAMUS	3,54	0	0	3,94	3,74	Sangat Mandiri	A
46	BNNK LAMPUNG TIMUR	3,25	0	3,47	0	3,36	Sangat Mandiri	A
47	BNNK LAMPUNG SELATAN	3,6	0	3,56	0	3,58	Sangat Mandiri	A
48	BNN KOTA METRO	3,62	0	0	3,53	3,58	Sangat Mandiri	A
49	BNNP RIAU	3,7	0	0	3,67	3,69	Sangat Mandiri	A
50	BNNK PELALAWAN	3,66	0	0	3,76	3,71	Sangat Mandiri	A
51	BNNK PEKAN BARU	3,9	0	0	3,8	3,85	Sangat Mandiri	A
52	BNNK KUANTAN SINGINGI	0	0	3,8	3,92	3,86	Sangat Mandiri	A
53	BNN KOTA DUMAI	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
54	BNNP KEP. RIAU	0	4	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
55	BNNK TANJUNGPINANG	0	0	3,68	3,778	3,73	Sangat Mandiri	A
56	BNNK KARIMUN	0	0	3,96	3,84	3,90	Sangat Mandiri	A
57	BNN KOTA BATAM	0	0	3,94	3,95	3,95	Sangat Mandiri	A
58	BNNP JAMBI	3,616	3,765	0	0	3,69	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
59	BNNK TANJAB TIMUR	3,88	0	0	4	3,71	Sangat Mandiri	A
60	BNN KOTA JAMBI	3,93	0	0	3,85	3,89	Sangat Mandiri	A
61	BNNK BATANGHARI	3,62	0	0	3,58	3,60	Sangat Mandiri	A
62	BNNP BABEL	3,381	0	0	3,397	3,39	Sangat Mandiri	A
63	BNNK PANGKALPINANG	0	0	3,7	3,5	3,60	Sangat Mandiri	A
64	BNNK BELITUNG	3,55	0	0	3,2	3,38	Sangat Mandiri	A
65	BNNK BANGKA SELATAN	0	0	3,96	3,96	3,96	Sangat Mandiri	A
66	BNNK BANGKA	3,62	0	3,7	0	3,66	Sangat Mandiri	A
67	BNNP BENGKULU	3,59	0	0	3,73	3,66	Sangat Mandiri	A
68	BNNK BENGKULU SELATAN	3,8	0	0	3,5	3,65	Sangat Mandiri	A
69	BNNK BENGKULU	0	0	3,69	3,49	3,59	Sangat Mandiri	A
70	BNNP DKI JAKARTA	3,05	0	0	3,52	3,29	Sangat Mandiri	A
71	BNNK JAKARTA SELATAN	3,24	0	2,81	0	3,03	Mandiri	B
72	BNN KOTA JAKARTA UTARA	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	3,55	0	0	3,67	3,61	Sangat Mandiri	A
74	BNNP BANTEN	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	0	0	3,74	3,36	3,55	Sangat Mandiri	A
76	BNN KOTA TANGERANG	0	0	3,39	3,32	3,36	Sangat Mandiri	A
77	BNN KOTA CILEGON	3,67	0	3,63	0	3,65	Sangat Mandiri	A
78	BNNP JAWA BARAT	0	3,52	0	3,54	3,53	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
79	BNNK SUMEDANG	3,75	3,67	0	0	3,71	Sangat Mandiri	A
80	BNNK SUKABUMI	3,83	0	0	3,83	3,83	Sangat Mandiri	A
81	BNNK KARAWANG	3,8	0	0	3,4	3,60	Sangat Mandiri	A
82	BNNK GARUT	0	3,78	0	3,78	3,78	Sangat Mandiri	A
83	BNNK CIMAH	3,65	0	0	3,45	3,55	Sangat Mandiri	A
84	BNNK CIANJUR	3,52	0	0	3,5	3,51	Sangat Mandiri	A
85	BNNK CIAMIS	3,6	0	0	3,57	3,59	Sangat Mandiri	A
86	BNNK BANDUNG BARAT	3,65	0	3,87	0	3,76	Sangat Mandiri	A
87	BNN KOTA TASIKMALAYA	3,56	0	3,8	0	3,68	Sangat Mandiri	A
88	BNN KOTA DEPOK	0	0	3,58	3,66	3,62	Sangat Mandiri	A
89	BNN KOTA CIREBON	3,88	0	0	3,93	3,91	Sangat Mandiri	A
90	BNN KOTA BANDUNG	3,8	0	0	3,43	3,80	Sangat Mandiri	A
91	BNN KABUPATEN BOGOR	3,4	0	0	3,59	3,50	Sangat Mandiri	A
92	BNNK KUNINGAN	3,345	0	0	3,32	3,33	Sangat Mandiri	A
93	BNNP JAWA TENGAH	3,78	0	3,46	0	3,62	Sangat Mandiri	A
94	BNNK TEMANGGUNG	0	0	4	4	4,00	Sangat Mandiri	A
95	BNNK TEGAL	0	3,36	0	3,36	3,36	Sangat Mandiri	A
96	BNNK PURBALINGGA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A
97	BNNK MAGELANG	0	0	3,72	3,64	3,68	Sangat Mandiri	A
98	BNNK CILACAP	0	3,52	0	3,48	3,50	Sangat Mandiri	A
99	BNNK BATANG	3,46	0	3,4	0	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
10 0	BNNK BANYUMAS	0	0	3,64	3,61	3,63	Sangat Mandiri	A
10 1	BNN KOTA SURAKARTA	3,42	0	0	3,52	3,47	Sangat Mandiri	A
10 2	BNN KAB. KENDAL	3,71	0	0	3,84	3,78	Sangat Mandiri	A
10 3	BNNP JAWA TIMUR	3,69	0	0	3,62	3,66	Sangat Mandiri	A
10 4	BNNK TULUNG AGUNG	3,73	0	0	4	3,87	Sangat Mandiri	A
10 5	BNNK TUBAN	3,55	0	3,71	0	3,63	Sangat Mandiri	A
10 6	BNNK TRENGGALEK	3,6	0	0	3,5	3,55	Sangat Mandiri	A
10 7	BNNK SUMENEP	0	0	3,68	2,96	3,32	Sangat Mandiri	A
10 8	BNNK SIDOARJO	0	0	3,84	3,76	3,80	Sangat Mandiri	A
10 9	BNNK PASURUAN	0	0	3,88	3,76	3,82	Sangat Mandiri	A
11 0	BNNK NGANJUK	3,54	0	3,88	0	3,71	Sangat Mandiri	A
11 1	BNNK MOJOKERTO	3,29	0	3,34	0	3,32	Sangat Mandiri	A
11 2	BNN KAB MALANG	3,72	0	0	3,72	3,72	Sangat Mandiri	A
11 3	BNNK LUMAJANG	3,56	0	0	3,56	3,56	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
11 4	BNNKAB KEDIRI	0	0	3,84	3,2	3,52	Sangat Mandiri	A
11 5	BNNK GRESIK	4	0	3,92	0	3,96	Sangat Mandiri	A
11 6	BNNK BLITAR	3,47	0	0	3,344	3,41	Sangat Mandiri	A
11 7	BNN KOTA SURABAYA	0	0	3,76	3,76	3,76	Sangat Mandiri	A
11 8	BNN KOTA MALANG	0	0	3,26	3,78	3,52	Sangat Mandiri	A
11 9	BNN KOTA KEDIRI	3,84	0	3,8	0	3,82	Sangat Mandiri	A
12 0	BNN KOTA BATU	3,52	0	0	3,72	3,62	Sangat Mandiri	A
12 1	BNNP D.I. YOGYAKARTA	3,66	0	3,59	0	3,63	Sangat Mandiri	A
12 2	BNNK SLEMAN	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
12 3	BNNK BANTUL	0	0	3,71	3,76	3,74	Sangat Mandiri	A
12 4	BNN KOTA YOGYAKARTA	0	0	3,69	3,56	3,63	Sangat Mandiri	A
12 5	BNNP BALI	0	3,79	0	3,55	3,67	Sangat Mandiri	A
12 6	BNNK KLUNGKUNG	3,47	0	3,96	0	3,72	Sangat Mandiri	A
12 7	BNNK KARANGASEM	3,48	0	3,32	0	3,40	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
12 8	BNNK GIANYAR	3,96	3,88	0	0	3,92	Sangat Mandiri	A
12 9	BNN KOTA DENPASAR	0	0	3,3	3,3	3,30	Sangat Mandiri	A
13 0	BNN KABUPATEN BADUNG	3,93	3,87	0	0	3,90	Sangat Mandiri	A
13 1	BNN KAB BULELENG	3,35	0	3,64	0	3,50	Sangat Mandiri	A
13 2	BNNP NTB	0	0	3,4	3,3	3,35	Sangat Mandiri	A
13 3	BNNK SUMBAWA BARAT	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
13 4	BNNK SUMBAWA	3,33	0	3,74	0	3,54	Sangat Mandiri	A
13 5	BNNK MATARAM	3,92	0	0	3,84	3,88	Sangat Mandiri	A
13 6	BNNK BIMA	3,74	0	3,8	0	3,77	Sangat Mandiri	A
13 7	BNNP NTT	3,47	0	0	3,48	3,48	Sangat Mandiri	A
13 8	BNNK KOTA KUPANG	3,69	0	0	3,39	3,54	Sangat Mandiri	A
13 9	BNNK BELU	0	0	3,62	3,36	3,49	Sangat Mandiri	A
14 0	BNN KAB. ROTE NDAO	0	0	3,34	3,37	3,36	Sangat Mandiri	A
14 1	BNNP KALIMANTAN BARAT	3,43	0	0	3,42	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
14 2	BNNK SINTANG	3,06	0	0	3,4	3,23	Mandiri	B
14 3	BNNK SANGGAU	3,86	0	0	4,05	3,96	Sangat Mandiri	A
14 4	BNNK PONTIANAK	0	0	3,86	3,64	3,75	Sangat Mandiri	A
14 5	BNNK MEMPAWAH	0	0	3,36	3,382	3,37	Sangat Mandiri	A
14 6	BNN KOTA SINGKAWANG	0	0	3,6	3,54	3,57	Sangat Mandiri	A
14 7	BNN KAB. KUBU RAYA	0	0	3,43	3,46	3,45	Sangat Mandiri	A
14 8	BNN KAB BENGKAYANG	0	0	3,45	3,73	3,59	Sangat Mandiri	A
14 9	BNNP KALIMANTAN SELATAN	3,4	0	3,2	0	3,30	Sangat Mandiri	A
15 0	BNNK TANAH LAUT	3,45	0	0	3,38	3,42	Sangat Mandiri	A
15 1	BNNK TABALONG	0	0	3,71	3,04	3,38	Sangat Mandiri	A
15 2	BNNK HULU SUNGAI UTARA	0	0	3,36	3,28	3,32	Sangat Mandiri	A
15 3	BNNK HULU SUNGAI SELATAN	0	0	3,68	3,64	3,66	Sangat Mandiri	A
15 4	BNNK BARITO KUALA	2,75	0	3,29	0	3,02	Mandiri	B
15 5	BNNK BANJARMASIN	3,62	0	0	3,78	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
15 6	BNNK BANJARBARU	0	0	3,55	3,92	3,74	Sangat Mandiri	A
15 7	BNNK BALANGAN	0	0	3,33	3,4	3,37	Sangat Mandiri	A
15 8	BNNP KALIMANTAN TENGAH	3,52	0	0	3,6	3,56	Sangat Mandiri	A
15 9	BNNK PALANGKA RAYA	0	0	3,56	3,52	3,54	Sangat Mandiri	A
16 0	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	0	0	4	3,88	3,94	Sangat Mandiri	A
16 1	BNNP KALIMANTAN TIMUR	3,7	0	3,68	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 2	BNNK SAMARINDA	3,75	0	3,62	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 3	BNNK BALIKPAPAN	3,64	0	3,76	0	3,70	Sangat Mandiri	A
16 4	BNN KOTA BONTANG	3,48	3,82	0	0	3,65	Sangat Mandiri	A
16 5	BNNP KALIMANTAN UTARA	0	0	3,56	3,57	3,57	Sangat Mandiri	A
16 6	BNNK TARAKAN	3,22	3,42	0	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 7	BNNK NUNUKAN	3,34	0	3,29	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 8	BNNP SULAWESI BARAT	3,24	0	0	3,47	3,36	Sangat Mandiri	A
16 9	BNNK POLEWALI MANDAR	3,6	0	0	3,6	3,60	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
17 0	BNNP SULAWESI TENGGERA	3,38	0	0	3,59	3,49	Sangat Mandiri	A
17 1	BNNK KOLAKA	3,79	0	0	3,98	3,89	Sangat Mandiri	A
17 2	BNNK BAU BAU	3,85	0	0	3,96	3,91	Sangat Mandiri	A
17 3	BNN KOTA KENDARI	0	0	3,45	3,99	3,72	Sangat Mandiri	A
17 4	BNNK MUNA	0	0	3,69	3,7	3,70	Sangat Mandiri	A
17 5	BNNP SULAWESI SELATAN	3,62	3,25	0	0	3,44	Sangat Mandiri	A
17 6	BNN KOTA PALOPO	0	0	3,36	3,87	3,62	Sangat Mandiri	A
17 7	BNNK TANA TORAJA	0	0	3,89	3,92	3,91	Sangat Mandiri	A
17 8	BNNK BONE	3,88	0	0	3,17	3,53	Sangat Mandiri	A
17 9	BNNP SULAWESI TENGAH	3,65	0	0	2,99	3,32	Sangat Mandiri	A
18 0	BNNK PALU	3,68	0	3,72	0	3,70	Sangat Mandiri	A
18 1	BNNK DONGGALA	3,84	0	0	4	3,92	Sangat Mandiri	A
18 2	BNNK BANGGAI KEP	0	0	3,82	3,53	3,68	Sangat Mandiri	A
18 3	BNN KAB TOJO UNA-UNA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18 4	BNN KAB POSO	3,27	0	0	3,76	3,52	Sangat Mandiri	A
18 5	BNN KAB MOROWALI	3,41	0	0	3,55	3,48	Sangat Mandiri	A
18 6	BNNP SULAWESI UTARA	2,93	0	0	3,07	3,00	Mandiri	B
18 7	BNNK BOLAANG MONGONDOW	3,68	0	3,12	0	3,40	Sangat Mandiri	A
18 8	BNN KOTA BITUNG	0	0	3	3,44	3,22	Mandiri	B
18 9	BNN KOTA MANADO	3,68	0	0	3,12	3,40	Sangat Mandiri	A
19 0	BNNK KEPULAUAN SANGIHE	3,42	0	0	3,4	3,41	Sangat Mandiri	A
19 1	BNNP GORONTALO	3,27	0	0	3,85	3,56	Sangat Mandiri	A
19 2	BNN KOTA GORONTALO	3,41	0	0	3,81	3,61	Sangat Mandiri	A
19 3	BNNK BONE BOLANGO	3,74	0	3,45	0	3,60	Sangat Mandiri	A
19 4	BNN KAB GORONTALO	3,75	0	3,76	0	3,76	Sangat Mandiri	A
19 5	BNNK GORONTALO UTARA	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
19 6	BNNK BOALEMO	3,44	0	0	3,54	3,49	Sangat Mandiri	A
19 7	BNNP MALUKU	3,12	0	3,08	0	3,10	Mandiri	B

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
19 8	BNNK TUAL	3,51	0	0	3,21	3,36	Sangat Mandiri	A
19 9	BNNK BURU SELATAN	3,53	0	0	3,25	3,39	Sangat Mandiri	A
20 0	BNNP MALUKU UTARA	0	0	3,69	3,57	3,63	Sangat Mandiri	A
20 1	BNNK PULAU MOROTAI	0	0	3,8	3,04	3,42	Sangat Mandiri	A
20 2	BNNK HALMAHERA UTARA	3,92	0	3,84	0	3,88	Sangat Mandiri	A
20 3	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	3,52	0	0	3,2	3,36	Sangat Mandiri	A
20 4	BNNP PAPUA	3,29	0	3,3	0	3,30	Sangat Mandiri	A
20 5	BNNK MIMIKA	3,35	0	0	3,25	3,30	Sangat Mandiri	A
20 6	BNNK JAYAPURA	0	0	3,31	3,31	3,31	Sangat Mandiri	A
20 7	BNNP PAPUA BARAT	3,48	0	0	3,45	3,47	Sangat Mandiri	A
TOTAL						3,59	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



	<p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Deputi Pemberdayaan Masyarakat</p>
	
	<p>Drs. Heri Maryadi, M.M.</p>



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKM, IKR
Dan Prosentase Peningkatan Kualitas Hidup
T.A 2023

Jakarta, 15 Januari 2024

Kepada

Yth. **Daftar Terlampir**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- f. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Kepala, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan rehabilitasi, Deputy Bidang Rehabilitasi telah melaksanakan evaluasi capaian kinerja melalui pengukuran kapabilitas lembaga pelaksana rehabilitasi (IKR), pengukuran kepuasan masyarakat penerima layanan rehabilitasi (IKM) dan pengukuran peningkatan kualitas hidup klien Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagaimana terlampir.

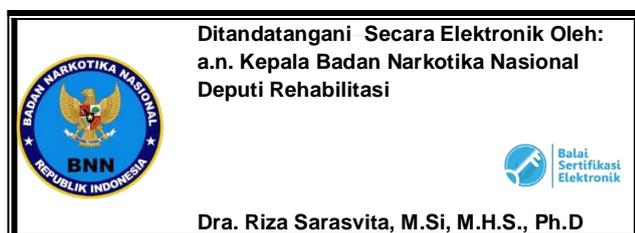
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala, untuk menjadikan hasil evaluasi dimaksud sebagai salah satu dasar penetapan kebijakan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja bidang rehabilitasi di wilayah kerja masing-masing.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.



**DAFTAR BNNP BESERTA JAJARAN DAN UPT REHABILITASI
YANG TELAH DILAKUKAN PENGUKURAN IKM, IKR DAN PENGUKURAN
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP T.A 2023**

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Barat
4. Kepala BNNP Bengkulu
5. Kepala BNNP Kepulauan Riau
6. Kepala BNNP Riau
7. Kepala BNNP Jambi
8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala BNNP Sumatera Selatan
10. Kepala BNNP Lampung
11. Kepala BNNP DKI Jakarta
12. Kepala BNNP Banten
13. Kepala BNNP Jawa Barat
14. Kepala BNNP DI Yogyakarta
15. Kepala BNNP Jawa Tengah
16. Kepala BNNP Jawa Timur
17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
18. Kepala BNNP Kalimantan Timur
19. Kepala BNNP Kalimantan Utara
20. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
21. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
22. Kepala BNNP Bali
23. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
24. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
25. Kepala BNNP Sulawesi Utara
26. Kepala BNNP Sulawesi Barat
27. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
28. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
29. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
30. Kepala BNNP Gorontalo
31. Kepala BNNP Maluku
32. Kepala BNNP Maluku Utara
33. Kepala BNNP Papua
34. Kepala BNNP Papua Barat
35. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido
36. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka
37. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah
38. Kepala Loka Rehabilitasi Kalianda
39. Kepala Loka Rehabilitasi Batam
40. Kepala Loka Rehabilitasi Deli Serdang

**HASIL PENGUKURAN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN REHABILITASI (IKM),
PENGUKURAN KAPABILITAS REHABILITASI (IKR) DAN
PROSENTASE KUALITAS HIDUP T.A 2023**

Satuan Kerja	IKR	IKM	Prosentase Kualitas Hidup
Aceh	3,27	3,67	86.68
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3,15	3,59	96.59
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	2,99	3,82	62.50
BNN Kabupaten Bireuen	3,60	3,56	90.12
BNN Kabupaten Gayo Lues	2,80	2,99	80.00
BNN Kabupaten Pidie	3,12	3,15	98.89
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3,00	3,75	92.11
BNN Kota Banda Aceh	3,61	3,53	98.00
BNN Kota Langsa	3,66	3,97	68.75
BNN Kota Lhokseumawe	3,15	3,87	87.50
BNN Kota Sabang	3,16	0	98.21
BNNP Aceh	3,62	3,37	80.60
Sumatera Utara	3,46	3,52	90.24
BNN Kabupaten Asahan	3,76	3,62	92.22
BNN Kabupaten Batu Bara	3,30	3,78	94.35
BNN Kabupaten Deli Serdang	3,66	3,14	88.68
BNN Kabupaten Karo	3,44	3,71	88.61
BNN Kabupaten Labuhan Batu Utara	3,38	3,71	100.00
BNN Kabupaten Langkat	3,32	3,76	81.55
BNN Kabupaten Mandailing Natal	3,62	3,52	92.50
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	3,21	3	88.46
BNN Kabupaten Simalungun	3,36	3,29	91.85
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2,88	3,31	87.78
BNN Kota Binjai	3,34	3,09	86.79
BNN Kota Gunungsitoli	3,39	3,88	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3,62	3,77	90.34
BNN Kota Tanjung Balai	3,66	3,83	86.21
BNN Kota Tebing Tinggi	3,15	3,67	97.64
BNNP Sumatera Utara	3,90	3,56	89.78
Sumatera Barat	3,32	3,44	64.66
BNN Kabupaten Pasaman Barat	3,38	3,06	93.18
BNN Kabupaten Solok	3,44	3,74	47.12
BNN Kota Payakumbuh	3,53	3,64	51.47
BNN Kota Sawahlunto	3,02	3,23	100.00
BNNP Sumatera Barat	3,22	3,40	56.25

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

Riau	3,24	3,54	80.51
BNN Kabupaten Kuantan Singingi	2,90	3,66	97.32
BNN Kabupaten Pelalawan	2,68	3,13	92.86
BNN Kota Dumai	3,37	3,69	82.73
BNN Kota Pekanbaru	3,69	3,67	75.00
BNNP Riau	3,57	3,5	69.83
Kepulauan Riau	3,49	3,62	70.69
BNN Kabupaten Tanjung Balai Karimun	3,41	3,57	90.52
BNN Kota Batam	3,26	3,66	88.24
BNN Kota Tanjung Pinang	3,16	3,57	75.83
BNNP Kepulauan Riau	3,62	3,68	60.42
Kepulauan Bangka Belitung	3,59	3,64	84.63
BNN Kabupaten Bangka	3,75	3,53	79.46
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3,76	3,20	76.09
BNN Kabupaten Belitung	3,79	3,71	95.31
BNN Kota Pangkal Pinang	3,45	3,80	98.00
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3,22	3,83	72.22
Bengkulu	3,56	3,76	71.03
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3,04	3,77	73.50
BNN Kota Bengkulu	3,90	3,77	65.77
BNNP Bengkulu	3,76	3,77	78.82
Jambi	3,34	3,63	85.59
BNN Kabupaten Batang Hari	3,52	3,52	96.43
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3,31	3,93	93.00
BNN Kota Jambi	3,38	3,42	94.44
BNNP Jambi	3,16	3,89	52.66
Sumatera Selatan	3,24	3,61	76.48
BNN Kabupaten Empat Lawang	3,13	3,52	100.00
BNN Kabupaten Muara Enim	2,98	3,51	75.00
BNN Kabupaten Musi Rawas	3,17	3,64	89.06
BNN Kabupaten Ogan Ilir	3,26	3,54	93.18
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3,42	3,94	61.86
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2,75	3,53	86.11
BNN Kota Lubuk Linggau	3,11	3,42	76.96
BNN Kota Pagar Alam	3,49	3,31	80.00
BNN Kota Prabumulih	3,56	3,66	71.30
BNNP Sumatera Selatan	3,56	3,68	62.80
Lampung	3,57	3,63	75.41
BNN Kabupaten Lampung Selatan	3,45	3,15	72.96
BNN Kabupaten Lampung Timur	3,42	3,59	76.82
BNN Kabupaten Tanggamus	3,80	3,44	73.94
BNN Kabupaten Way Kanan	3,71	3,59	91.80
BNN Kota Metro	3,41	3,38	58.73
BNNP Lampung	3,26	3,85	76.50
Banten	3,20	3,53	77.14

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kota Cilegon	3,23	3,81	74.29
BNN Kota Tangerang	3,12	3,62	84.62
BNN Kota Tangerang Selatan	3,08	3,58	85.45
BNNP Banten	3,35	3,15	63.30
DKI Jakarta	3,74	3,68	79.40
BNN Kota Jakarta Selatan	3,91	3,76	72.20
BNN Kota Jakarta Timur	3,62	3,21	57.94
BNN Kota Jakarta Utara	3,62	3,89	98.33
BNNP DKI Jakarta	3,86	3,61	82.50
Jawa Barat	3,42	3,54	77.54
BNN Kabupaten Bandung Barat	3,33	3,36	66.94
BNN Kabupaten Bogor	3,35	3,63	86.40
BNN Kabupaten Ciamis	3,13	3,42	94.53
BNN Kabupaten Cianjur	3,33	3,84	96.43
BNN Kabupaten Garut	3,52	3,72	51.92
BNN Kabupaten Karawang	3,46	3,93	93.45
BNN Kabupaten Kuningan	3,21	3,32	97.12
BNN Kabupaten Sukabumi	4,00	3,52	82.69
BNN Kabupaten Sumedang	3,05	3,4	99.19
BNN Kota Bandung	3,36	3,29	65.91
BNN Kota Cimahi	3,42	3,5	76.39
BNN Kota Cirebon	3,13	3,49	88.03
BNN Kota Depok	3,65	3,55	87.10
BNN Kota Tasikmalaya	3,42	3,41	76.09
BNNP Jawa Barat	3,66	3,52	67.62
Jawa Tengah	3,57	3,67	83.30
BNN Kabupaten Banyumas	3,28	3,93	90.74
BNN Kabupaten Batang	3,30	3,91	83.62
BNN Kabupaten Cilacap	3,46	3,86	99.19
BNN Kabupaten Kendal	3,33	3,59	89.29
BNN Kabupaten Magelang	3,80	3,69	73.40
BNN Kabupaten Purbalingga	3,70	3,65	77.50
BNN Kabupaten Temanggung	3,50	3,91	90.00
BNN Kota Surakarta	3,62	3,67	83.33
BNN Kota Tegal	3,87	3,46	95.00
BNNP Jawa Tengah	3,80	3,59	71.67
D.I. Yogyakarta	3,82	3,86	80.82
BNN Kabupaten Bantul	4,00	3,39	82.42
BNN Kabupaten Sleman	3,46	3,84	79.90
BNN Kota Yogyakarta	0	0	70.45
BNNP D.I. Yogyakarta	4,00	3,83	80.34
Jawa Timur	3,36	3,68	82.28
BNN Kabupaten Blitar	3,60	3,43	68.10
BNN Kabupaten Gresik	3,62	3,77	80.17
BNN Kabupaten Kediri	3,32	3,36	98.57
BNN Kabupaten Lumajang	3,01	3,76	80.95
BNN Kabupaten Malang	3,46	3,52	85.94
BNN Kabupaten Nganjuk	3,33	3,72	70.92

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kabupaten Pasuruan	3,14	3,04	95.00
BNN Kabupaten Sidoarjo	3,38	3,81	92.92
BNN Kabupaten Sumenep	2,85	3,15	76.56
BNN Kabupaten Trenggalek	3,26	3,96	95.00
BNN Kabupaten Tuban	3,62	3,76	82.05
BNN Kabupaten Tulungagung	3,17	3,98	66.50
BNN Kota Batu	3,71	3,55	82.05
BNN Kota Kediri	3,32	3,62	76.32
BNN Kota Malang	3,28	3,88	69.89
BNN Kota Mojokerto	3,60	4	83.75
BNN Kota Surabaya	3,47	3,48	90.35
BNNP Jawa Timur	3,28	3,99	93.15
Bali	3,17	3,79	90.18
BNN Kabupaten Badung	3,29	3,48	91.18
BNN Kabupaten Buleleng	3,16	3,91	93.56
BNN Kabupaten Gianyar	2,51	3,32	100.00
BNN Kabupaten Karangasem	3,59	3,98	97.92
BNN Kabupaten Klungkung	3,00	3,98	95.45
BNN Kota Denpasar	2,80	3,3	67.39
BNNP Bali	3,86	3,85	92.86
Nusa Tenggara Barat	3,47	3,81	81.33
BNN Kabupaten Bima	3,56	3,57	75.00
BNN Kabupaten Sumbawa	3,26	3,34	72.79
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3,07	3,98	78.06
BNN Kota Mataram	3,86	3,9	93.57
BNNP Nusa Tenggara Barat	3,61	3,81	76.39
Nusa Tenggara Timur	3,28	3,78	93.00
BNN Kabupaten Belu	2,96	3,08	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3,23	4	
BNN Kota Kupang	3,65	0	
BNNP Nusa Tenggara Timur	3,26	3,86	92.26
Kalimantan Barat	3,38	3,57	77.16
BNN Kabupaten Bengkayang	3,71	3,33	88.16
BNN Kabupaten Kubu Raya	3,33	3,75	65.00
BNN Kabupaten Mempawah	3,90	3,98	100.00
BNN Kabupaten Sanggau	2,42	3,58	45.00
BNN Kabupaten Sintang	2,89	3,38	72.56
BNN Kota Pontianak	3,52	3,91	68.48
BNN Kota Singkawang	3,60	3,3	92.00
BNNP Kalimantan Barat	3,62	3,26	59.00
Kalimantan Selatan	3,44	3,76	89.11
BNN Kabupaten Balangan	3,49	3,87	100.00
BNN Kabupaten Barito Kuala	3,36	3,72	82.01
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2,11	3,48	69.23
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,17	3,94	68.18
BNN Kabupaten Tabalong	3,55	3,72	92.50
BNN Kabupaten Tanah Laut	3,66	3,65	79.17
BNN Kota Banjarbaru	3,89	3,96	91.35

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kota Banjarmasin	3,86	3,63	92.55
BNNP Kalimantan Selatan	3,90	3,63	100.00
Kalimantan Tengah	3,60	3,65	69.41
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3,66	3,66	67.42
BNN Kota Palangkaraya	3,39	3,42	68.10
BNNP Kalimantan Tengah	3,76	3,81	71.43
Kalimantan Timur	3,61	3,69	77.64
BNN Kota Balikpapan	3,49	3,62	65.91
BNN Kota Bontang	3,70	3,14	82.14
BNN Kota Samarinda	3,80	3,93	83.14
BNNP Kalimantan Timur	3,42	3,51	76.14
Kalimantan Utara	3,49	3,29	88.12
BNN Kabupaten Nunukan	3,51	3,2	75.00
BNN Kota Tarakan	3,43	3,26	95.83
BNNP Kalimantan Utara	3,51	3,36	90.97
Sulawesi Utara	3,42	3,78	85.19
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3,46	3,83	88.33
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	3,52	3,89	71.67
BNN Kota Bitung	3,07	3,87	99.36
BNN Kota Manado	3,46	3,96	88.79
BNNP Sulawesi Utara	3,60	3,68	76.02
Gorontalo	3,33	3,39	87.76
BNN Kabupaten Boalemo	3,25	3,17	80.00
BNN Kabupaten Bone Bolango	3,90	3,33	99.22
BNN Kabupaten Gorontalo	2,84	3,4	62.50
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	3,80	3,01	85.00
BNN Kota Gorontalo	3,00	3,42	67.50
BNNP Gorontalo	3,19	3,49	87.64
Sulawesi Barat	3,48	3,34	88.16
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3,32	3,23	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3,65	3,38	85.00
Sulawesi Tengah	3,26	3,48	77.38
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	2,70	3,62	50.00
BNN Kabupaten Donggala	2,43	3,43	63.70
BNN Kabupaten Morowali	2,88	3,83	
BNN Kabupaten Poso	3,60	3,18	84.56
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	3,90	3,53	92.35
BNN Kota Palu	3,60	3,35	90.31
BNNP Sulawesi Tengah	3,70	3,46	25.00
Sulawesi Selatan	3,72	3,8	70.45
BNN Kabupaten Bone	3,34	4	75.54
BNN Kabupaten Tana Toraja	4,00	3,73	70.14
BNN Kota Palopo	3,90	3,6	64.66
BNNP Sulawesi Selatan	3,52	3,84	70.83
Sulawesi Tenggara	3,42	3,63	78.37
BNN Kabupaten Kolaka	3,40	3,63	75.60
BNN Kabupaten Muna	2,74	3,05	17.50
BNN Kota Baubau	3,90	3,95	92.24

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kota Kendari	3,66	3,56	76.61
BNNP Sulawesi Tenggara	3,41	3,57	87.50
Maluku	3,26	3,34	86.96
BNN Kabupaten Buru Selatan	2,97	3,18	
BNN Kota Tual	3,46	3,38	85.00
BNNP Maluku	3,35	3,53	85.00
Maluku Utara	3,07	3,36	73.39
BNN Kabupaten Halmahera Utara	3,22		
BNN Kabupaten Pulau Morotai	2,11		
BNN Kota Tidore Kepulauan	3,36	3,57	72.92
BNNP Maluku Utara	3,57	3,29	75.00
Papua	3,38	3,7	75.00
BNN Kabupaten Jayapura	2,98	3,86	69.44
BNN Kabupaten Mimika	3,74	3,29	35.00
BNNP Papua	3,42	3,68	100.00
Papua Barat	3,89	3,82	98.75
BNNP Papua Barat	3,89	3,82	98.75
Pusat	3,70	3,43	85.00
IPWL BNN Pusat	3,70	3,43	85.00
Grand Total	3,41	3,63	81.39





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/658/XII/IR/IR.04.05/2024/INS
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1
Perihal : Penyampaian Capaian Indikator
Kinerja Nilai Zona Integritas
Berdasarkan Penilaian Internal Pada
BNNP Tahun 2024

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepada

Yth. Para Kepala BNNP

di
tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, capaian indikator kinerja kegiatan Nilai Zona Integritas berdasarkan penilaian internal untuk BNNP Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

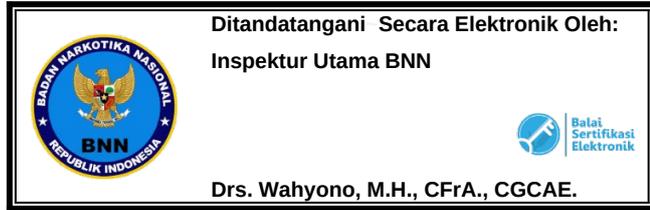
3. Berdasarkan dengan butir dua, diperintahkan kepada Kepala BNNP agar terus meningkatkan kualitas Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja dan

menjadikan capaian tahun 2024 sebagai acuan penentuan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BNNP Tahun 2025.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan.



Tembusan :
Sekretaris Utama BNN



**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI ZONA INTEGRITAS BERDASARKAN
PENILAIAN INTERNAL PADA BNNP TAHUN 2024**

No.	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI		
		Pengungkit	Hasil	Jumlah
1	BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta	55.51	36.43	91.94
2	BNNP Jawa Timur	53.21	34.98	88.19
3	BNNP Nusa Tenggara Barat	51.47	36.59	88.06
4	BNNP Sumatera Selatan	51.24	36.26	87.50
5	BNNP Sulawesi Selatan	49.82	36.90	86.72
6	BNNP Jawa Tengah	51.31	34.97	86.28
7	BNNP Bali	49.75	36.52	86.27
8	BNNP Kalimantan Selatan	50.66	34.86	85.52
9	BNNP Kalimantan Tengah	49.97	35.03	85.00
10	BNNP Lampung	50.42	34.53	84.95
11	BNNP Sumatera Barat	51.49	31.83	83.32
12	BNNP Banten	47.17	35.92	83.09
13	BNNP Jawa Barat	48.79	34.24	83.03
14	BNNP Sulawesi Barat	46.53	34.53	81.06
15	BNNP Kepulauan Riau	43.82	36.63	80.45
16	BNNP Sumatera Utara	45.59	34.44	80.03
17	BNNP Papua Barat	45.32	34.48	79.80
18	BNNP Kalimantan Timur	43.10	36.34	79.44
19	BNNP Riau	41.80	34.04	75.84
20	BNNP Maluku	43.62	32.05	75.67
21	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	39.30	35.99	75.29
22	BNNP Kalimantan Barat	40.72	34.33	75.05
23	BNNP Sulawesi Tenggara	41.54	33.50	75.04
24	BNNP DKI Jakarta	41.77	33.26	75.03
25	BNNP Aceh	41.74	33.28	75.02
26	BNNP Sulawesi Utara	31.94	36.87	68.81

LAMPIRAN
SURAT Inspektur Utama BNN
NOMOR : B/658/XII/IR/IR.04.05/2024/INS
TANGGAL : 30 Desember 2024

No.	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI		
		Pengungkit	Hasil	Jumlah
27	BNNP Jambi	32.60	35.97	68.57
28	BNNP Nusa Tenggara Timur	32.72	35.49	68.21
29	BNNP Kalimantan Utara	32.25	35.62	67.87
30	BNNP Bengkulu	43.83	22.50	66.33
31	BNNP Gorontalo	29.66	34.38	64.04
32	BNNP Maluku Utara	37.63	16.88	54.51
33	BNNP Papua	35.60	17.00	52.60
34	BNNP Sulawesi Tengah	31.25	1.25	32.50

